

ANARKISME POLITIK LOKAL • TOLERANSI AKIDAH BERAGAMA

BERITAINDONESIA®

Agustus 2005

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)



**Habis
BBM
Terbit BBA**

The Excellent Biography



Tokoh | **INDONESIA**[®]
www.tokohindonesia.com

No.2/Th.I/Agustus 2005



Sampul:
Eri Irawan
Karikatur:
Dandy Hendrias

BERITA HANKAM

17 TNI-ku Sayang, TNI-ku Malang

BERITA TOKOH

18 **Ratna Megawangi, Ph,D**
Pelopor Pendidikan Holistik
Berbasis Karakter

BERITA KESEHATAN

20 Memutus Rantai Flu Maut

BERITA IPEK

22 Windows Vista
Sistem Operasi Microsoft Terbaru

BERITA UTAMA

12 Habis BBM, Terbit BBA

14 **Ir. Rauf Purnama**
Memburu Sebuah Obsesi

16 Ditunggu Keppres Energi Alternatif

8

Solusi Krisis BBM ENERGI ALTERNATIF



HIGHLIGHT BERITA

23 Kaleidoskop Bulan Juli

BERITA NEWSMAKER

24 **Kuntoro Mangkusubroto**
Bertahan Untuk Tetap Bersih

BERITA NASIONAL

26 Titian Menuju Damai di 'Serambi Mekkah'

28 BERITA NUSANTARA

BERITA AGAMA

30 Kekerasan Atas Nama Agama

LINTAS MEDIA

33 "Ada Tommy Di Tenabang"

34 KARIKATUR BERITA

BERITA PEREMPUAN

43 Titian Menuju Damai di 'Serambi Mekkah'

BERITA POLITIK

44 Anarkisme Pesta Politik Lokal
45 Parpol Dibantu, Dukungan Diraih

BERITA PENDIDIKAN

46 Lain di Bibir Lain di Fakta
47 Lulus Tahun Depan, Lihatnya Tahun Ini

BERITA MANCANEGERA

48 AS Gagal, Militan Irak Membara

BERITA HUKUM

49 Mengkaji Ulang Jejak Joni
50 Ketika Rakyat Mulai Tak sabar
51 In Absentia Bagi Penilep BLBI

BERITA EKONOMI

52 Berebut Status bank Jangkar
53 Privatisasi Tak Terelakkan

BERITA KHAS

Kontroversi Aturan Ibu Menteri



36 LENTERA

Toleransi Akidah dalam Beragama

BERITA OPINI

58 Solusi Terbaik BBA
59 Kapolri Jangan "Kencang" di Awal

LINTAS TAJUK

60 Simalakama BBM

BERITA OLAHRAGA

62 Belajar dari Kasus Ellyas Pical
63 Stadion Jebol Penonton Tewas

BERITA INFOTAINMENT

64 Ikon Baru Seorang Demonstran

BERITA BUDAYA

65 Gamelan di Panggung Global

BERITA OBITUARI

66 Jaksa Agung yang Mumpuni

54



Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian**Pemimpin Umum:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Pemimpin Redaksi:

Ch Robin Simanullang

Redaktur Senior:MYR Agung Sidayu
Syahbuddin Hamzah
Dandy Hendrias
Suryo Pranoto**Redaktur:**Anis Fuadi
Nawawi
Hapason Tampubolon
M Udyiana Mulyadin
Sarjiman**Sekretaris Redaksi:**

Retno Handayani

Staf Redaksi:Henry Maruwas
Christian Natamado
M Subhan**Desain Grafis:**

Eri Irawan

Litbang, IT dan Pusat Data:Mangatur Lorieclide Paniroy (Kepala)
Sanita Retmi
Wilson Edward (Fotografer)**Penerbit:**PT Berita Satria Wiratama
Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia
dan PT Citraprinsip Publisitas Indoadprint**Komisaris:**

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

Direktur/ Pemimpin Perusahaan:

Ch Robin Simanullang

Wakil Pemimpin Perusahaan:

Samsuri

Iklan dan Promosi:Imam Supriyanto
Watty Soetikno**Keuangan dan Umum:**

Mangatur Lorieclide Paniroy

Sirkulasi dan Distribusi:Abdul Halim
Marjuka Situmorang**Harga:**

Rp 15.000 (Luar Jabodetabek Rp 16.500)

Percetakan:PT Temprint
(Isi di luar tanggung jawab percetakan)**Alamat Redaksi/Tata Usaha:**Jalan Cucakrawa No.14A
Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736
Fax. 9101871**E-mail:**redaksi@berindo.com
iklan@berindo.com**Website:**

www.beritaindonesia.co.id

Para eksponen Ma'had Al-Zaytun dan crew **BERITA Indonesia** di Wisma Al-Islah.**Assalamu alaikum Wr.Wb.
Salam Sejahtera!**

Pembaca! Pada Sabtu 30 Juli 2005, dalam suatu momentum sejarah, kami 'mengakutkan' kelahiran majalah ini. Acara itu berlangsung di Wisma Al-Islah, di kawasan Ma'had Al-Zaytun, sebuah lembaga pendidikan *pesantren spirit but modern system*, bermoto: *Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian*. Lembaga pendidikan bersetting global yang teguh mengimpikan Indonesia memasuki zona damai dan demokrasi (*zone of peace and democracy*).

Acara bersahaja, bersuasana ria, toleran dan damai yang dihadiri para eksponen Ma'had Al-Zaytun dan crew **BERITA Indonesia**, itu dimaknai dengan amanat penegasan visi demokrasi, toleransi dan perdamaian oleh Syaykh al-Ma'had Abdussalam Panji Gumilang, yang juga Pemimpin Umum majalah ini. Sebuah visi yang dalam kebebasan berpikir secara terus menerus selalu ditanamkan dalam proses belajar di Ma'had Al-Zaytun, diamanatkan untuk diimplementasikan dalam karya seni pemberitaan **BERITA Indonesia** pada tataran publik lintas agama, suku, golongan dan ras.

Pembaca! Itulah **BERITA Indonesia**. Jika dalam peliputan isi, hadir sebagai pemberita berita pilihan media massa, majalah ini mengusung moto *All in One*, maka dalam hal visi dan sasaran pembaca majalah ini bermoto *One for All* (satu untuk semua). Apa dan siapa pun dia, apa pun suku, agama, golongan dan rasnya, bacaannya **BERITA Indonesia**. Ibarat kata iklan: Apa pun makanannya, bacaannya **BERITA Indonesia!**

Amanat inilah yang diusung **BERITA Indonesia**. Amanat, yang pada acara kelahiran majalah ini, ditandai dan dimaknai kesepakatan kerjasama terpadu dan pemberian mandat (amanah) oleh Syaykh Panji Gumilang kepada Christian Robin Simanullang, selaku Pemimpin Redaksi, mewakili seluruh crew Berita Indonesia, dalam satu tim kerja terpadu. Bertugas menghadirkan majalah ini dalam satu visi *Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian*, serta moto *All in One, One for All*.

Di dalam edisi kedua ini, kami menyajikan krisis BBM yang boleh dibilang berada pada kondisi, Siaga Satu. Empat hal yang membuat krisis BBM menjadi semakin mencemaskan. *Pertama*, pola konsumsi yang tak terkendali. *Kedua*, kapasitas kilang minyak dalam negeri di bawah tingkat konsumsi yang terus tumbuh. *Ketiga*, merosotnya kemampuan produksi minyak bumi. Dan *keempat*, melonjaknya harga minyak bumi di pasar tunai internasional. Pemecahannya; penghematan BBM sambil mengembangkan bahan bakar alternatif (BBA).

Masih banyak banyak sajian menarik lainnya; misalnya, di rubrik **Berita Agama**, kami menyoroti aksi anarkis terhadap markas Jemaah Ahmadiyah dengan pro-kontra di kalangan agamawan dan cendekiawan Islam. Di **Lentera**, Syaykh Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, menulis artikel tentang masalah yang sedang *in, Toleransi Akidah Dalam Beragama*.

Selamat menyimak dan menikmati **BERITA Indonesia**.**Wassalamu alaikum Wr.Wb.**

Salut Berita Indonesia

Asalamualaikum Wr. Wb.

Luar Biasa! Hanya kata tersebutlah yang bisa disebutkan untuk Berita Indonesia ini.

Namun majalah ini masih butuh pembenahan seperti harga tidak dicantumkan dan yang tercantum hanya harga luar Jawa + ongkos kirim saja.

Saya kagum dengan rubrik lentera yang menyajikan liputan tentang pembangunan Masjid Rahmatan Lil 'Alamin di Ma'had Al-Zaytun. Luar Biasa!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Agus Triyono (Jatim)

idz_properti@plasa.com

Disiplin PNS dan TNI

Kami calon masa depan pejabat sipil, setelah mengkaji disiplin kinerja PNS dengan TNI dari tes masuk sampai perjalanannya, ternyata banyak hal yang berbeda dan sangat jauh dari harapan. Saya usulkan buat Pak SBY dan lembaga pemerintahan agar disamakan baik PNS

atau pun TNI sehingga disiplin dan lainnya bisa tak jauh berbeda.

Drs. Agusny Gunawan, MM. (orang tua alumni SMU TN Magelang)
litbang-pde@tasikmalaya.go.id

Standar Penerbangan

Ass.wr.wb. Nama saya Hisyam. Profesi saya sebagai *air traffic controller* yang bekerja di Bandar Udara Mutiara Palu sejak tahun 2000 sampai sekarang. Saya ingin memberikan masukan tentang dunia penerbangan yang ada di Indonesia khususnya tentang pengelolaan ruang udara Indonesia. Saat ini di Indonesia ada 4 provider yang menyelenggarakan pelayanan lalu lintas udara (*air traffic services*), dan yang anehnya lagi di Indonesia pengelolaan ruang udara digabung dengan pengelolaan bandar udara (dalam artian satu manajemen).

Jadi Kabandara atau *airport manager* sebagai pengelola bandara sekaligus pengelola ruang udara. Hal ini sangat

rancu. sedangkan di negara luar contohnya Asia, pengelolaan antara ruang udara dengan pengelolaan bandar udara dipisahkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan masing-masing dan terhindar dari KKN.

Saya berharap masalah bidang penerbangan ini dapat dilaksanakan sesuai aturan standar *internasional civil aviation organization* dimana hanya ada satu badan saja yang mengelola ruang udara yakni *Single Air Traffic Service Provider* sehingga pelayanan navigasi menjadi lebih berkualitas dan dapat mengikuti perkembangan *Future Air Navigation System* dan *Air Traffic Management* yang standar dan sempurna. Terima kasih.

Muhammad Hisyam

hisyam_atc42@hotmail.com

Dijangkau Semua Kalangan

Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca literatur mengenai Ma'had Al-Zaytun. Menurut saya, Al-Zaytun mem-

buat sekolah umum yang bisa dijangkau semua kalangan di seluruh nusantara. Apalagi dengan sistem yang Al-Zaytun terapkan seperti sekarang dan misinya yang spektakuler yaitu pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Terima kasih, walhamdulillah.

hardjanto mangoen karyo

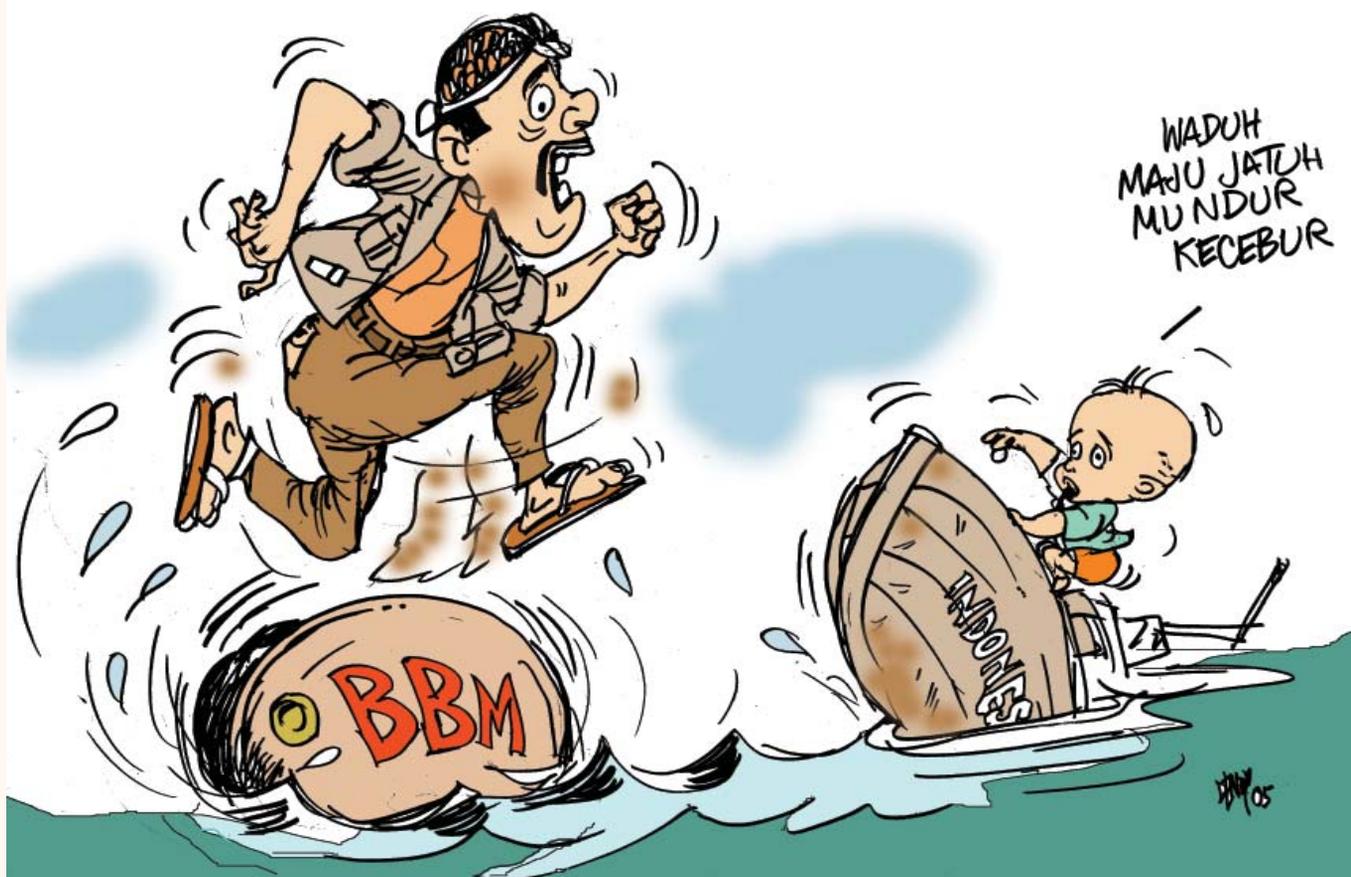
mangoen_karyo@yahoo.com

Menyapa Sang Pemimpin

Presiden yang bagus adalah presiden yang mau melihat rakyatnya secara dekat. Sebagai contoh, Bung Karno jika sedang berkunjung ke suatu tempat, mobilnya berjalan sangat pelan sekali agar rakyatnya bisa melihat dari dekat.

Jangan kayak presiden sekarang, mobilnya jika berjalan melejit sangat cepat sekali bagai pesawat jet tempur. Bagaimana rakyatnya bisa melambatkan tangan untuk menyapa sang pemimpin kalau begitu caranya. Sekali lagi lihatlah cara Bung Karno menyapa. Wahai sang presiden, pelanlah mobil mewah yang

BUNG WARTO



kau tumpangi, sapa lah rakyatmu, itulah jiwa pemimpin yang bermutu.

Edy Wahyudi, edy_ried@yahoo.com

Nasib Guru Bantu

Jika Guru Kontrak siap untuk dijadikan PTT, maka guru bantu akan dibawa kemana? Bagaimana nasibnya kelak? Apa cukup dengan jaminan dikontrak sebagai guru bantu sampai usia 60 tahun? Bagaimana dengan kesejahteraannya?

Lalu bagaimana dengan tuntutan tiap-tiap sekolah yang merasa berwenang terhadap kinerja guru bantu? Jika kewajiban guru bantu sama dengan guru PNS, bagaimana dengan haknya? Apa sedemikian tidak adilnya pemerintah memperlakukan guru bantu? Bukankah guru adalah ujung tombak

keberhasilan pendidikan di Indonesia?

Feti Anita T, rhodesia@boleh.com

Tanpa Persatuan

Bangsa ini hampir sempurna keahluannya. Tolonglah para pemimpin nasional terutama ormas dan parpol Islam agar bersatu sebelum bala' Allah diturunkan.

Jangan asyik membicarakan masalah kesejahteraan rakyat di gedung yang megah, tapi rakyat jelata selalu di permainan.

Apa yang bisa diperbuat tanpa persatuan?

Memet, memet0072@hotmail.com

Indonesia Bisa Maju

Menurut saya, Indonesia harus tetap maju. Indonesia harus jadi negara yang

ada di peringkat pertama dalam segala hal. Memang *kalo* dipikir lumayan sulit. Tapi jika diterapkan berbagai peraturan, Indonesia pasti bisa maju seperti Amerika. Contohnya pemberantasan KKN, Indonesia adalah salah satu negara korupsi yang terbanyak. Korupsi itu harus diberantas!

Fika, fika_anaksatu@yahoo.com

Kualitas SDM

Kualitas SDM Indonesia harus ditata dengan *scheme* tata nilai yang akurat. Semua dana yang dituang dalam proyek harus menciptakan nilai tambah pada pembangunan bangsa. Pada gilirannya menaikkan kualitas manusia. Jadi fokus pembangunan nasional sebaiknya berfokus pada *people*, jangan pada materi seperti sekarang ini.

Khususnya pada Depdiknas, dana yang dialokasikan paling besar jangan banyak bocornya dan harus memberikan nilai. Kalau tidak, kita akan berkeping-keping dipermainkan negara tetangga yang mengejar peningkatan SDM-nya seperti Singapore, Thailand, malah Vietnam dalam beberapa hal sudah melampaui kita.

Sastra, sra@cbn.net.id

Kepentingan Pribadi

Para politisi kita sekarang ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya dari pada kepentingan masyarakat umum. Mereka para politisi NKRI ini sudah melupakan tujuan esensial dari pembentukan negara ini.

Ir Dony Y Kusa Banunaek, MT
donikusa@yahoo.com

BERITA INDONESIA

Tarif Iklan

>>>> SARANA PROMOSI BISNIS BERNILAI TAMBAH

Halaman	Ukuran	Harga Penawaran
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Hlm Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Hlm Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Hlm Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
11/2 Hlm Vertical Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
11/2 Hlm Horizontal Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Hlm Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Hlm Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000
Jasa penulisan Advertorial (wawancara & penulisan)		Rp. 2.000.000
Iklan kuping (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan		@ Rp. 5.000.000

Pemasangan Iklan:

Jalan Cucakrawa No.14A, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan
Telp. (021) 70930474, 83701736 Fax. 9101871

Hikmah Krisis BBM

Tekanan krisis BBM mestinya memaksa kita berpikir dan bertindak untuk membenahi konsumsi dan mengembangkan bahan bakar alternatif (BBA). Ini mungkin hikmah yang harus dipetik dari krisis BBM.

Sadar atau tidak, ketersediaan BBM berada di ambang gawat darurat. Antrian BBM di hampir semua daerah merupakan bukti yang tak terbantahkan. Ironis. Untuk mengatasi krisis tersebut, DPR malah menyarankan pemerintah mengambil jalan pintas, menaikkan lagi harga BBM. Bisa jadi ini undangan bagi munculnya gejala sosial.

Secara makro, krisis BBM menekan APBN, menciptakan ekonomi biaya tinggi dan memicu laju inflasi. Di sektor anggaran, pemerintah, setiap tahun, harus menanggung subsidi puluhan triliun rupiah, sebagian ditutup dengan menaikkan harga BBM. Langkah ini dirasakan sebagai momok bagi sektor industri dan rumah tangga. Naiknya harga BBM dan biaya transportasi menjadi alasan yang tak terbantahkan bagi kenaikan harga barang-barang dan laju inflasi.

Gejolak harga minyak mentah di pasar tunai dunia tidak bisa diprediksi, apalagi diantisipasi oleh APBN. Pemerintah, tahun ini saja, harus menyesuaikan asumsi harga minyak dari 45 dolar AS sebarel di APBN 2005 menjadi 54 d/b di APBN Perubahan. Padahal harga minyak mentah di pasar dunia sudah melompat ke angka 61 d/b. Artinya, masih defisit 6 d/b.

Setiap kenaikan 1 d/b, pemerintah harus menutup defisit Rp 150 miliar sampai Rp 300 miliar. Diperkirakan, sampai akhir tahun ini pemerintah menanggung defisit Rp 150 triliun. Tentu, defisit alias subsidi BBM, akan bertambah bilamana harga minyak mentah melampaui angka 61 d/b. Bisa jadi, pemerintah akan mengubah lagi asumsi di APBN-P 2005. Belanja negara di APBN 2005, diperkirakan Rp 512,9 triliun, sedangkan pendapatan sekitar Rp 499,2 triliun.

Kerumitan tersebut diperburuk oleh impor minyak mentah 300.000 b/h untuk memenuhi kebutuhan kilang-kilang pengolahan minyak di dalam negeri. Itu pun masih terjadi defisit BBM

olahan sekitar 350.000 b/h akibat lonjakan konsumsi. PT. Pertamina harus mengimpornya dari Singapura dengan berbagai beban biaya tambahan, termasuk harga yang lebih mahal.

Mengapa kita mengimpor minyak negeri merosot tajam dari 1,5 juta menjadi hanya 991.000 juta b/h. Sedangkan konsumsi sudah melompat ke angka 1,115 juta b/h. Artinya sudah terjadi defisit 124.000 b/h. Padahal selaku anggota OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengeksport Minyak), Indonesia harus meng-

taan kendaraan pribadi dan umum. Mestinya kendaraan pribadi kedua, ketiga dan seterusnya dikenakan pajak yang berlipat untuk menekan konsumsi BBM dan mengurangi gaya hidup mewah. Angkutan kereta api mesti lebih dioptimalkan untuk mengurangi armada angkutan darat (truk dan bus) yang boros BBM. Puluhan juta rumah tangga akan meninggalkan minyak tanah jika tersedia bahan bakar pengganti yang lebih murah dan efisien.

Meski demikian penghematan bukan satu-satunya jalan keluar dari krisis BBM.

Mesti ada kemauan politik (*political will*), misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, untuk mendorong pengembangan BBA secara komersial. Kebijakan itu sangat penting, terutama untuk menjamin dukungan pendanaan dari sektor perbankan dan pemasaran oleh Pertamina.

Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), BPPT dan sejumlah perguruan tinggi sudah melakukan berbagai penelitian dan percobaan tentang kelayakan pengembangan BBA yang bisa diperbarui. Percobaan yang dilakukan BPPT, Usakti, UI, ITB dan Ma'had Al-Zaytun, mampu mengolah *bioetanol* dan *biodiesel* menjadi BBA.

Lahan, tersedia jutaan hektar untuk penanaman massal kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, ubi jalar dan jarak.

Tak diragukan lagi, pengembangan BBA berdampak multi-manfaat. Di luar BBA yang punya nilai komersial, kegiatan ini membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan para petani. Produk sampingannya untuk bahan baku industri pakan ternak, ampasnya diolah jadi bahan bakar rumah tangga (BBRT).

Jika itu yang dilakukan, pemerintah tidak akan lagi terlalu dipusingkan oleh kebijakan subsidi dan menaikkan harga BBM setiap tahun. Kebutuhan bahan bakar tidak lagi melulu bergantung pada BBM. Dan lebih banyak minyak mentah yang bisa diekspor.

Lakukan sekarang, jangan berpikir hanya buat sesaat. Jangkau 25 sampai 30 tahun ke depan. ■



eksport minyak mentah, sekarang sekitar 400.000 b/h.

Fakta-fakta tersebut menggambarkan betapa berat beban yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat, jika terus bergantung pada sumber energi fosil yang tidak bisa diperbaharui. Harus ada jalan keluar sebelum keadaan semakin memburuk. Jalan yang terbuka; menghemat BBM dan segera mengembangkan BBA.

Langkah penghematan BBM yang dianjurkan pemerintah dalam Inpres 10/2005 berjangka sangat pendek dan mencakup kalangan yang sangat terbatas. Misalnya, anjuran kepada para pejabat agar tidak mengenakan stelan jas untuk menghemat listrik, pemadaman listrik yang lebih awal di gedung-gedung pemerintah dan swasta serta pembatasan jam tayang bagi semua stasiun televisi.

Padahal pemboros BBM adalah ju-



SOLUSI KRISIS BBM

ENERGI AL

Era harga seliter bensin lebih murah dari seliter air mineral telah berakhir. Bahan bakar minyak (BBM) akan semakin mahal dan semakin sulit didapat. Dalam beberapa pekan sejak Juni, daerah-daerah berteriak kekurangan BBM. Para konsumen harus antri berjam-jam untuk memperoleh beberapa liter BBM.

Biaya untuk mendapatkan minyak mentah semakin mahal. Para kontraktor dan investor enggan melakukan eksplorasi sumur-sumur baru. Mereka lebih memilih menguras sumur-sumur lama. Sebab medan yang harus dijelajah semakin sulit dan biayanya semakin mahal serta peraturan semakin ketat. Dampaknya, produksi menurun tajam dari 1,5 juta menjadi 991.000 juta barel perhari (b/h). Tingkat konsumsi, 1,115 juta b/h, telah melampaui angka produksi.

Pad a k o n d i s i l a i n , untuk mengisi kebutuhan kilang-kilang minyak di dalam negeri, pemerintah harus mengimpor minyak mentah 300.000 b/h. Indonesia, untuk mempertahankan keanggotaannya di OPEC (Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak), harus punya kemampuan untuk mengeksplor minyak bumi, paling tidak sejumlah yang diimpor.

Jika dilihat dari kemampuan produksi dibandingkan dengan tingkat konsumsi, Indonesia tidak pantas lagi menjadi anggota OPEC. Akibat lonjakan konsumsi itu, Pertamina terpaksa membeli BBM olahan dari Singapura, 350.000 b/h. Tentu dengan harga Singapura, plus pajak dan biaya angkut.



SBY: Pada waktunya saya akan mengambil semua risiko akibat penyesuaian harga.

Seandainya sejak dulu pemerintah mengembangkan industri energi alternatif, pemerintah tak perlu panik dan terpaksa 'makan buah simalakama' seperti sekarang akibat krisis BBM.

TERNATIF



Ahli perminyakan, Kurtubi, di dalam wawancara khusus dengan **M. Subhan** dari *Berita Indonesia* (25/7) menjelaskan, biaya pengadaan BBM untuk seluruh Indonesia sangatlah besar. Sedangkan harga jual BBM dalam negeri, masih di bawah biaya pengilangan dan juga di bawah harga pasar dunia.

Akibatnya, jumlah dana yang harus disiapkan pemerintah untuk menutup subsidi BBM, bisa mencapai 120 triliun setahun.

Dari sisi pemasokan, pemerintah menghadapi dua masalah besar. Pertama, penurunan produksi minyak mentah yang cukup besar dalam enam tahun terakhir. Kedua, minimnya daya tampung kilang minyak dalam negeri, yang hanya berkapasitas sekitar 1.050.000 b/h. Kapasitas itu tidak pernah ditambah selama 12 tahun terakhir.

Kondisi ini, kata Kurtubi, akan terus berlangsung selama pemerintah tidak mampu meningkatkan produksi minyak

mentah, dan tidak mampu menambah kapasitas kilang minyaknya.

Karena itu, pemerintah harus meningkatkan produksi minyak mentah dan membangun kilang-kilang tambahan baru dengan kapasitas kilang sampai 1.400.000 b/h sehingga total kapasitas mencapai 350.000 b/h.

Dalam kondisi produksi yang tertatih-tatih ini, Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit. Harga minyak mentah di pasar tunai internasional melonjak dari 50 ke 60 dolar AS perbarel (d/b), hanya dalam tempo sebulan. Pemerintah dan DPR terpaksa berkali-kali merevisi asumsi harga minyak mentah dari 40 ke 45 kemudian 54 d/b di dalam APBN Perubahan.

Baru sehari angka terakhir ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, harga minyak di pasar tunai internasional melonjak lagi ke angka 60 d/b. Pemerintah tentu harus merevisi kembali asumsi tersebut jika tidak ingin terjebak dalam defisit ang-

garan yang menganga. Namun menaikkan asumsi harga berarti menaikkan angka subsidi BBM.

Dalam tajuknya *Kompas* (20/7) menilai, krisis BBM menempatkan kemampuan fiskal pemerintah pada kondisi sangat sulit. Naiknya harga minyak mentah dunia sampai 60 d/b, memaksa pemerintah menanggung subsidi BBM sekitar Rp 150 triliun sampai akhir tahun ini. Setiap kenaikan harga minyak 1 dolar AS, pemerintah menanggung defisit Rp 150 sampai Rp 300 miliar.

Dalam perhitungan Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie, dengan harga 60 d/b, subsidi BBM yang ditanggung pemerintah naik sampai Rp 135 triliun dari Rp 76 triliun yang dianggarkan semula pada tahun ini.

Kini, pemerintah terjebak di dalam dilema simalakama, harga BBM naik, rakyat menjerit. Apalagi, pada awal Maret silam, pemerintah telah menaikkan harga semua jenis BBM rata-



rata 36,2 persen.

Jika tidak dinaikkan, pemerintah akan terhimpit subsidi yang semakin berat. Artinya, kemampuan pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan dan pengentasan kemiskinan semakin terbatas, karena APBN sebagian besar tersedot untuk subsidi.

Momentum

Di tengah situasi dilematis dalam menetapkan kebijakan, yang ditingkahi pula oleh polemik dan sikap pro-kontra berkepanjangan atas rencana kenaikan harga BBM, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar isyarat tegas menyangkut langkah yang akan ditempuh pemerintah.

“Pada waktunya saya akan mengambil semua risiko akibat penyesuaian harga,” cetus Presiden SBY, ketika berada di Beijing, Cina (28/7), sebagaimana dikutip *Kompas* (29/7).

Presiden SBY menggarisbawahi adanya lima langkah fundamental untuk mengatasi krisis BBM: menaikkan harga, pemotongan subsidi, peningkatan produksi, penghematan, dan diversifikasi energi.

Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, segendang sepenarian dengan Presiden SBY ihwal kenaikan BBM sebagai solusi mengatasi krisis BBM. Hanya saja, “Ke-

naikan (BBM) tinggal menunggu hasil perhitungan teknis,” demikian argumen Jusuf Kalla, mengungkapkan dukungannya.

Dukungan kepada SBY-JK juga datang dari Senayan meski terpecah dalam dua kubu pendapat. Sebagian besar anggota DPR, termasuk Ketua DPR, Agung Laksono, mendukung rencana pemerintah dengan pertimbangan utama besarnya beban subsidi yang mesti ditanggung pemerintah, akibat melonjaknya harga minyak di pasaran dunia, bila BBM tidak dinaikkan.

Sebagian lagi anggota Dewan menolak keras kenaikan BBM. Wakil Ketua DPR, Soetardjo Soerjoguritno, dan Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahyo Kumolo, misalnya, berpendapat, kenaikan BBM akan semakin memberatkan ekonomi rakyat yang belum pulih akibat kenaikan harga BBM sebelumnya.

Merespons lima langkah fundamental mengatasi krisis BBM seperti yang diisyaratkan SBY, barangkali sekarang adalah momentum paling tepat bagi para pengambil kebijakan di negeri ini (Pemerintah dan DPR) untuk melakukan diversifikasi energi.

Pengembangan bahan bakar (energi) alternatif (BBA) merupakan solusi yang paling realistis untuk mengatasi krisis BBM yang akan terus menerpa Indonesia, sekaligus mengantisipasi ancaman habisnya cadangan minyak dalam negeri.

■ SH, CRS

KONDISI BBM

1. Produksi	991,000 juta b/h
2. Konsumsi	1,115 juta b/h
3. Impor MM	300.000 b/h
4. Eskpor MM	400.000 b/h.
5. Kapasitas Kilang DN	1.050.000 b/h
6. Kebutuhan Stok DN	1.400.000 b/h
7. Impor BBM Olahan	350.000 b/h
8. Harga MM di APBN	54 d/b
9. Harga MM Dunia	60 d/b
10. Subsidi BBM di APBN 2005	Rp 76 triliun
11. Subsidi BBM di APBN-P 2005	Rp 135 triliun
12. Total APBN 2005	Rp 511,92 triliun.

Keterangan:

1. MM : Minyak Mentah
2. DN : Dalam Negeri
3. BBM : Bahan Bakar Minyak
4. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
6. b/h : barel per hari
7. d/b : dolar per barel.

Diolah dari berbagai sumber

HABIS BBM TERBIT BBA

Fajar bahan bakar alternatif (BBA) telah menyingsing. Bahan bakar minyak (BBM) di ambang senja. Syaratnya, pemerintah harus mencabut subsidi.

Krisis BBM bisa jadi membawa hikmah. Di tengah sikap pro-kontra atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebagai imbasan dari melonjaknya harga minyak di pasar dunia, gagasan pengembangan sumber-sumber energi alternatif pengganti BBM mulai mengemuka.

Energi-energi alternatif yang dimaksudkan di atas menunjuk pada bioetanol dan biodiesel. Bioetanol (gasohol) dihasilkan dari tanaman pertanian seperti jagung, singkong, ubi jalar, dan tebu. Sedangkan biodiesel adalah hasil olahan dari buah/biji tanaman, misalnya, kembang matahari, kelapa sawit, dan jarak.

Sejumlah percobaan dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Institut Teknologi Bandung (ITB), mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Trisaksi Jakarta, dan Mah'ad Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat. Malah, Al-Zaytun kini tengah melangkah lebih jauh, mengurai air menjadi sumber energi.

Penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi alternatif sejati-



nya telah berlangsung lama. Tapi, mengapa industri energi alternatif tak juga dikembangkan?

Persoalannya, "Pemerintah seperti ini tidak pernah memiliki politik energi," ujar DR Jana Anggadiredja, Deputi BPPT Bidang Teknologi Pengembangan SDA, seperti dituturkannya kepada koran

Suara Pembaruan (20/7).

Karena itu ia meminta pemerintah untuk menerbitkan Keputusan Presiden terkait dengan penggunaan energi terbarukan (*renewable energy*).

Kebijakan ini diharapkan bisa memacu pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi pengganti BBM.

Di sisi lain, Jana mendesak pemerintah untuk mencabut subsidi BBM, dialihkan langsung ke masyarakat yang membutuhkan. Menko Perekonomian Aburizal Bakrie sudah mulai mempromosikan gagasan tersebut, tetapi baru sebatas wacana.

Pencabutan subsidi memberi peluang bagi sumber-sumber energi alternatif bisa lebih bersaing secara kompetitif. Hasil kajian BPPT, menunjukkan, harga bahan bakar buatan BPPT, seperti biodiesel, bioetanol, dan biooil lebih murah dibanding BBM yang sudah disubsidi.

Kemampuan BPPT mengembangkan sumber-sumber energi alternatif hanya sebatas pada proyek-proyek contoh. Atas dasar itu, Jana mempersilahkan pemerintah atau pihak swasta untuk mengembangkannya secara komersial.

Negara-negara, seperti AS, Australia, Jerman, Kanada, Kolombia, Brasil, Swedia dan Uni Eropa, sudah mengembangkan sumber-sumber energi alternatif dan terbarukan.

Sekadar catatan, biodiesel kelapa sawit sudah banyak diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan

Kecemasan itu terbukti

Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Rauf Purnama, sebenarnya sejak dua tahun lalu telah mengingatkan pemerintah tentang perlunya segera pengembangan dan pembangunan pabrik energi alternatif dari sumber-sumber yang bisa diperbaharui, yaitu dari biji, buah, dan minyak tanaman. Gagasan Rauf tidak terbatas pada bahan bakar, tetapi dipadukan dengan pabrik pakan ternak.

“Kalau tidak, Indonesia bisa mengimpor bahan bakar,” kata Rauf kepada wartawan majalah *Tokoh Indonesia* (April, 2003).

Dalam wawancara dengan tim wartawan majalah *Berita Indonesia* (15/7), Rauf yang kini menjabat Presdir PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), mengungkapkan bahwa keemasannya tadi menjadi kenyataan. Sayang, waktu itu, Rauf ibarat musafir yang berteriak di tengah padang pasir, suaranya tak mengema.

Bioetanol, menurut insinyur kimia ITB itu, hasil fermentasi dari jagung, ketela pohon, atau tetes tebu, bisa

transportasi, industri, pembangkit listrik dan rumah tangga. Sumber-sumber yang berasal dari fosil berupa minyak, batu bara dan gas alam. Umur deposit ketiga sumber energi tersebut terbatas. Menurut laporan BP Migas; batubara 50 tahun lagi, gas alam 30 tahun lagi dan minyak bumi 11 tahun lagi.

“Kalau itu sudah tidak ada mau pakai apa lagi?” tanya Rauf, seraya menambahkan, “Energi yang bisa diperbaharui tidak akan habis karena dihasilkan dari tanaman. Indonesia memiliki lahan yang sangat luas, sehingga bisa dijadikan sumber energi terbarukan.”

Belum lama ini, gagasan energi alternatif kembali Rauf sampaikan kepada pemerintah. Dalam dialog selama satu jam lebih dengan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla, di Istana Wakil Presiden, (12/7), Rauf Purnama mengemukakan pandangannya bahwa untuk jangka panjang pemerintah harus mulai memikirkan percepatan penggunaan energi yang terbarukan dan energi alternatif secara komersial.

Namun, Rauf beranggapan, selama BBM masih disubsidi, Indonesia tidak bisa mengembangkan energi alternatif secara komersial, sebab yang rugi petani.

“Selama ini para investor dan pelaku bisnis di bidang energi alternatif dan terbarukan belum berani berinvestasi karena BBM masih disubsidi pemerintah. Mereka berani berinvestasi kalau BBM sesuai harga pasar,” paparnya.

Karena itu, ia mengharapakan Indonesia menjadi pemimpin di dalam pengembangan energi alternatif dan terbarukan. Mau pakai jagung, ketela pohon, ubi jalar, tetes tebu, kelapa sawit atau jarak, semuanya bisa.

Mengembangkan energi biodiesel dari kelapa sawit atau kelapa relatif mahal. Di Eropa atau Australia bisa dikembangkan karena harga solar di sana Rp 7.000 perliter. Di Indonesia, harga solar Rp 2.200 perliter tapi bahan baku minyak sawit Rp 3.800 per liter.

Jadi, yang paling ekonomis-realistis untuk dikembangkan, dalam hemat Rauf, adalah industri biodiesel yang bersumber minyak jarak. Tapi, agar industri energi alternatif tersebut dapat berkembang dan penggunaannya dapat tumbuh, subsidi BBM harus dihapus secara bertahap hingga hanya 10-20 persen.

Langkah politis itu harus ditempuh demi merangsang minat para investor dan pelaku bisnis mengembangkan dan membangun industri energi alternatif dan terbarukan. ■ SH, CRS

Potensi Energi Terbarukan

NEGARA	JENIS	TAHUN	KAPASITAS	KONSUMSI
AS	Gasohol E-10	1978	70 ton/jam	6 jua kl/tahun
Brasil	Gasohol E-20	1975	20% bioetanol 80% premium	
UE	EN228-590		5% bioetanol-biodiesel, 95% bensin	

Diolah dari berbagai sumber.

Potensi Energi Terbarukan Indonesia

TAHUN	JENIS/JUMLAH	KAP.	T.KERJA	TEMPAT
2009	B.etanol/2 unit	60 kl/h	650.000	Lampung, Jatim, Sulsel
2009	B.diesel/25 unit	30.000 ton/thn	68.000	Sumatra, NTT, NTB, Sulawesi
2009	Biooil/30 unit	30-90 ton/thn	—	Sumatra, Kalimantan

Diolah dari berbagai sumber.

Australia. Di Jerman, penerapannya malah langsung untuk kendaraan dan mesin industri.

Menariknya pula, konsumsi biodiesel kelapa sawit secara besar-besaran justru terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Negara-negara itu, seperti halnya Indonesia, adalah produsen kelapa sawit yang cukup tinggi. (*Sinar Harapan*, 13 Juli 2005).

dijadikan energi. Sedangkan biodiesel diolah dari minyak-minyak tanaman, seperti minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak bunga matahari, minyak jarak. Di Jerman diolah dari lobak. Memang tidak langsung jadi. Harus diproses dulu. Ada teknologinya. Ada benda-benda atau material yang harus dihilangkan.

Energi digunakan untuk kebutuhan

Ir. Rauf Purnama

Memburu Sebu

Kecemasan Ir. Rauf Purnama dua tahun lalu jadi kenyataan. Apa yang diingatkannya terjadi juga. Kelangkaan BBM berminggu-minggu menimpa hampir semua daerah. Pemerintah panik. Rauf, sejak tahun 2003, mengingatkan pemerintah untuk mengembangkan sumber-sumber alternatif yang terbarukan (*renewable energy*). Tidak semata-mata bergantung pada sumber-sumber energi dari fosil (*unrenewable energy*). Ia punya gagasan membangun industri energi alternatif yang dipadukan dengan industri pakan ternak. Di tengah kelangkaan dan makin mahalannya BBM, bisa jadi obsesi Rauf terwujud.

Presdir PT Asean Aceh Fertilizer dan insinyur kimia tamatan ITB ini, membidani lahirnya sejumlah pabrik pupuk dan bahan kimia, seperti amoniak, urea, pupuk majemuk *phonska*, *gypsum plasterboard*, *hidrogen peroksida (H₂O₂)* dan *octanol*.

Di dalam wawancara dengan tim wartawan *Berita Indonesia*; Robin Ch. Simanullang, Syahbuddin Hamzah dan Haposan Tampubolon (15/7), Rauf berbicara panjang lebar tentang prospek pengembangan sumber energi alternatif. Berikut ini kutipannya.

Sekarang, bagaimana membangun industri energi alternatif?

Sebetulnya membangun industrinya gampang kalau pasarnya sudah ada. Pertamina bilang, sekarang kita impor solar Rp 10 triliun, Kalau dia bilang stop impor, bikin biodisel, banyak yang investasi dan bisa.

Kemarin saya ketemu orang IPB. Ia bicara bagaimana prosesnya. Saya bilang Anda jangan bicara proses, itu bagian saya. Bagian Anda bagaimana menanam jarak supaya lahan satu hektar bisa menghasilkan tiga atau lima ton. Supaya petani pendapatannya tinggi. Energi terbarukan, peluang untuk meningkatkan pendapatan petani.

Misalnya, tanaman jarak. Taruhlah hasilnya tiga ton per hektar. Biji jarak dilempar saja bisa tumbuh, tidak perlu pakai pupuk. Kalau ada 5 hektar dengan hasil 3 ton per hektar didapat 15 ton. Kalau harga jualnya Rp 1.000/kg, hasilnya Rp 15 juta. Petani yang tadinya tidak punya apa-apa, tidak pernah kerja, dapat duit sebanyak itu.

Kesempatan sekarang sebetulnya berkah dari Tuhan. Kalau saya dikasih

kesempatan, ada uang koperasi Rp 100 miliar, saya bangun pabriknya sekarang. Kumpulkan petani, tanam jarak masing-masing dua hektar. Ini kesempatan, hikmah. Prihatin dulu, Indonesia nanti akan kaya jika tidak impor minyak.

Siapa bilang Indonesia kaya minyak. Tidak. Kita penduduknya 220 juta, minyaknya cuma 1 juta barel/hari. Saudi Arabia, penduduknya 16 juta, produksinya 7 juta barel/hari, itu baru kaya.

Tetapi Indonesia memang negara kaya bila dibandingkan dengan Korea, Jepang, Singapura, Hongkong, Taiwan. Indonesia negara kaya, cuma tidak makmur. Korea, Jepang, Singapura, Hongkong, Taiwan negara miskin tapi makmur. Kenapa? Karena bisa meningkatkan nilai tambah.

Para pengambil kebijakan pemikirannya bagaimana?

Sebetulnya, siapa yang bisa jadi pengusaha, pemerintah seharusnya mendorong. Misalnya, tahun 2006 pemerintah tidak akan impor solar, diganti energi terbarukan. Pemainnya akan ramai. Pertamina bilang mau beli energi

terbarukan, tapi harganya juga jangan terlalu rendah.

Kalau ada jaminan pasar, saya juga akan bikin pabrik. Tak usah presiden yang ngomong, Pertamina saja. Tugas presiden sudah berat. Presiden cukup bilang bagus. Hanya politis, yang mikir itu kita.

Sekarang, misalnya, bisa nggak bikin biodisel dengan harga Rp 3.000/liter. Pertamina harus berani (bilang) begitu, saya akan beli, dibandingkan kalau (solar) diimpor Rp 4.000. Beli (solar) Rp 4.000, dijual Rp 2.200, subsidi kan Rp 1.800. Tapi kalau biodisel belinya dari kita, petani, Rp 3.000, subsidinya cuma Rp 800. Harus ada keberanian.

Apakah Inpres 10/2005 membuat kita berpikir?

Begini, saya pun begitu keluar dari ruang Wapres, bukannya ditanya soal PII, tapi soal energi. Saya bilang, penyelesaian soal energi harus dibagi tiga; jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.

Jangka pendeknya efisiensi. Inpres itu sudah benar. Efisiensi, apakah untuk transportasi, listrik atau untuk rumah tangga. Jangka menengahnya, membangun kilang baru, karena BBM kita masih impor. Kedua, mensubstitusi turbin-turbin pembangkit listrik yang memakai minyak diganti dengan yang gas



ah Obsesi

alam. Gas alam jangan diekspor. Jangka panjangnya bioenergi, termasuk untuk listrik ada juga geothermal, dari panas bumi.

Yang krusial kita hadapi, soal transportasi karena minyak akan habis sebelas tahun lagi. Kalau untuk rumah tangga masih bisa pakai batubara, kayu bakar, untuk listrik masih ada geotermal, tenaga air. Sedangkan untuk mobil, tak mungkin pakai batubara atau kayu bakar. Bisa digunakan bioetanol atau biodiesel.

Yang paling boros kan mobil?

Memang transportasi. Maka kun-

cinya, energi terbarukan. Indonesia harus jadi pemimpin. Dan ada satu hal penting lainnya, Indonesia telah meratifikasi Kyoto Protokol, di mana setiap negara harus mengurangi pemanasan bumi. Penyebabnya, banyaknya CO₂. Setiap yang dibakar menghasilkan CO₂ dan H₂O. Makin banyak CO₂, dunia makin panas.

Kalau CO₂ dari tanaman, tentu dari jagung, kentang, kelapa sawit, jarak, itu diambil dari tumbuhan, dibakar, keluar CO₂, diambil lagi oleh tumbuhan. Berputar, jadi di dunia tidak ada penambahan CO₂. Tapi kalau pakai fosil, fosilnya tidak mengambil kembali CO₂-nya.

Pada energi terbarukan tidak ada belerang, tidak ada racun. Kalau energi fosil ada belerang yang jadi racun SO₂ dan SO₃.

Bagaimana penggunaan minyak tanah untuk jutaan rumah tangga?

Pilihan energi untuk rumah tangga hanya; minyak tanah, LPG, briket batubara dan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar, mungkin tugasnya orang-orang pertanian, bagaimana menanam pohon yang cepat bisa dipakai untuk kayu bakar. Salah satu yang bagus di Thailand. Gabah dimasukkan ke dalam pabrik, keluar beras, menir, dan sekam. Sekam dipres, dijadikan gelondongan, jadi bahan bakar. Teknologinya sudah terbukti, hasilnya seperti bambu, dipakai jadi kayu bakar.

Itu, idenya bagus. Sekam kita banyak. Kalau hasil padi kita 52 juta ton, gabahnya 30 persen. Jadi 30 persen kali 52 juta ton, sama dengan 15 juta ton. Sekam sebanyak itulah yang dijadikan kayu bakar. Itu penyelesaiannya.

Saya sudah memikirkan ini semua sebelumnya. Saya sudah kirim surat ke presiden. Isinya, dalam upaya meningkatkan lapangan kerja, pajak, dan devisa. Pemecahannya harus di sektor riil. Prioritasnya, industri yang mendukung sandang, pangan, dan bahan bakar. Surat itu saya kirim Desember 2004. Jadi saya merasa tidak berdosa.

RS: Beliau ini penemu pupuk majemuk di Indonesia, Ponska.

Para pejabat pemerintah tertarik atau tidak?

Sebetulnya tertarik. Cuma harus dikemas sedemikian rupa supaya rakyatnya senang. Krisis BBM peluang untuk para petani. Saya sampai mikir, bagaimana dapat uang Rp 10 miliar. Saya mau bikin dulu pabrik yang bisa menghasilkan 300 ton/tahun, setara 300.000 liter BBM. Lumayan untuk kendaraan bermotor, turbin, dan untuk perahu nelayan.

Bagaimana menjual ide ini supaya ada investor yang mau menanam modal?

Sebetulnya gampang, asal Pertamina bilang, saya mau beli, akan ramai.

Tapi UU Migas memberikan kesempatan ke pihak lain menjadi operator diluar Pertamina?

Silakan saja, bebas menyiapkan. Tapi sekarang ini pemasaran dipegang Pertamina. Kalau mau terjun di situ harus berhubungan dengan Pertamina. Pertamina juga yang menjualnya supaya lebih gampang. Misalnya, saya punya bahan bakar 1.000 ton, ke mana menjualnya, semua SPBU milik Pertamina.

Bikin pabrik bioetanol atau biodiesel tak perlu riset dulu. Pakai saja spek yang ada. Saya kemarin ketemu orang, ini harus dites dulu, diuji, lama dong. Saya dulu pertama kali bikin pabrik, itu saya beli teknologinya.

Cina begitu, katanya, tanpa riset?

Cina bikin pabrik bioetanol (dari jagung) terbesar di dunia. Kapasitasnya, 650.000 ton/tahun. Thailand dari tebu dan ketela pohon. Brazil dari tebu. Bukan teknologi Cina, tapi dari Austria.

Bagaimana dengan energi alternatif terpadu. Kalau menggunakan jagung sekaligus bisa menjadi pakan ternak?

Bisa. Kalau nanti mengembangkan bioetanol, harga bensin Petramaks tidak disubsidi, misalnya Rp 5.000/liter seperti di Singapura. Kita bikin etanol ini dari tetes tebu. Gulanya bisa dimakan, hasil tetesnya dijadikan etanol yang paling bagus. Petaninya dapat pekerjaan, gula tidak impor, bensin tidak impor. Kalau dengan jagung dan singkong, hasil sampingannya bisa dijadikan makanan ternak. ■



Ditunggu Keppres Energi Alternatif

Gagasan pengembangan energi alternatif terus bergulir. Sekarang tinggal keputusan politik dari pemerintah.

Iptek okey. Lantas apalagi? Barangkali para investor dan pengusaha menunggu kebijakan pemerintah. Menristek Kusmayanto Kadiman yang merangkap Kepala BPPT sudah memberi lampu hijau.

Dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi, Indonesia sudah mengembangkan sumber-sumber energi alternatif. “Dari sisi Iptek putra-putra terbaik bangsa telah meneliti dan mengem-

bangkan energi alternatif,” kata Kadiman.

Kementerian Ristek dan BPPT sudah lama memiliki temuan-temuan sumber energi alternatif, seperti “*bioetanol*, *biodiesel*, *gasohol*, dan *biogas*.” Hasil-hasilnya berulang kali dipublikasikan, namun kurang mendapat sambutan dari kalangan industri. Mungkin mereka menunggu kebijakan pemerintah. Soalnya, menyangkut dukungan pendanaan, distribusi dan pemasaran.

“Pemakaian *biodiesel* dan *bioetanol*

tinggal tunggu waktu. Yang dibutuhkan saat ini prototipe kendaraan,” kata Kadiman. Dalam hal pengembangan energi alternatif, Menristek meminta kerja sama antara pemerintah, industriawan dan kalangan akademis agar semua hasil kajian Iptek bisa dirasakan manfaatnya.

Prof DR Koesmawan dari Universitas HAMKA juga setuju supaya pemerintah segera mengeluarkan payung hukum bagi pengembangan sumber energi alternatif. Soalnya, deposit minyak bumi berkurang, harga BBM semakin mahal.

Payung hukum, kata Koesmawan kepada M. Subhan dari *Berita Indonesia*, tidak hanya dibutuhkan untuk pengembangan sumber energi alternatif, tetapi juga berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan berinvestasi.

Ini memberi contoh, di tingkat pusat payung hukum sudah ada, tetapi sumber alamnya di daerah. Bisa saja keputusan tersebut berbenturan dengan UU Otonomi Daerah. Lantas disambut dengan demonstrasi.

“Kapan keputusan bisa dijalankan kalau terus dihadap para demonstran,” kata Koesmawan. ■ AF, SUB, SH.

Karya Anak Bangsa

Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Trisakti, Jakarta, BPPT, dan Ma'had Al-Zaytun sejak lama mengkaji berbagai sumber energi alternatif yang bisa menggantikan BBM cair. Berikut produk-produk energi alternatif yang berhasil diciptakan putra-putra bangsa yang sepatutnya mendapat apresiasi dari pemerintah.

• Gasohol BE-10

Gasohol (*gasoline alcohol*) adalah hasil percampuran bensin biasa dengan hasil olahan singkong. BBM yang diberi nama Gasohol BE-10 ini merupakan hasil studi penelitian tim peneliti di Balai Besar Teknologi Pati (B2PT) BPPT Lampung selama bertahun-tahun.

Gasohol BE-10 memang tidak murni 100 persen biodiesel, melainkan campuran dari 90 persen bensin dan 10 persen bioetanol namun punya kelebihan di bandingkan bensin premium. Hasil perpaduan dua unsur itu menghasilkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon yang lebih sedikit dibandingkan bensin premium yang banyak dikonsumsi dewasa ini.

Akan halnya bioetanol sendiri, menurut Kepala Bidang Teknologi Diversifikasi BPPT, Bambang Triwiyono, merupakan etanol atau bahan alkohol hasil proses fermentasi singkong. Bahan ini dimanfaatkan sebagai bahan bakar.

Studi terhadap bioetanol dilakukan sejak 1983 ketika produksi singkong di Provinsi Lampung melimpah ruah. Mengingat banyaknya produk singkong, sampai-sampai tidak ada pabrik yang sanggup mengolahnya menjadi produk jadi, timbul ide untuk mengembangkan bioetanol dari singkong.

Menristek Kusmayanto sendiri yang mencoba produk Gasohol BE-10 ini di halaman Gedung BPPT, saat diluncurkan pertama kali, pada Januari 2005.

• Biodiesel Buah Jarak dan Kelapa Sawit

Sumber BBM lain yang tak kalah menarik adalah minyak jarak. Energi alternatif pengganti BBM yang satu ini berhasil dikembangkan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) bekerja sama dengan Mitsubishi Research Institute, Jepang, sejak 2004.

Minyak jarak murni seratus persen biodiesel alami dan relatif mudah proses pengolahannya. Sebanyak 500 kilogram buah jarak (*jatropha curc*) dikukus selama satu jam. Setelah itu dihancurkan dengan blender dan diperas sampai keluar minyak.

Sungguh mencengangkan, dari 10 kilogram buah jarak bisa dihasilkan 3,5 liter minyak jarak yang sama kualitasnya dengan solar. Perbedaan keduanya sangat tipis. Pada minyak jarak terkandung lebih banyak oksigen dan lebih rendah nilai kalorinya dibandingkan solar. Dua kelebihan itu memungkinkan proses pembakaran pada minyak jarak lebih sempurna dan lebih bersih ketimbang solar.

Selain dari buah jarak, ITB juga mengembangkan BBM alternatif yang bersumber pada kelapa sawit. Untuk yang satu ini, ITB bekerja sama dengan Lembaga Minyak dan Gas (Lemigas) dan BPPT.

• Biodiesel Minyak Jelantah

Para mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Trisakti melakukan percobaan bahan bakar dari minyak jelantah (hasil sampingan minyak sawit) pada mesin diesel dan mobil. Hasilnya cukup memuaskan. Sumber energi alternatif ini bebas emisi dan polusi.

• Biodiesel Buah Jarak

Ma'had Al-Zaytun, sebuah pondok pesantren modern di Indramayu, Jawa Barat sedang melakukan uji coba minyak jarak untuk diolah menjadi bahan bakar mobil. Dalam waktu dekat, pihak Al-Zaytun akan mendatangkan seorang ahli dari Hong Kong untuk melakukan presentasi, pengolahan air menjadi sumber bahan bakar. ■ AF

Kusmayanto Kadiman, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT):

Pemerintah melalui BPPT telah melakukan sejumlah uji coba pengembangan bahan bakar berjenis biofuel, sebagai energi alternatif pengganti BBM.

Bahan berjenis biofuel ini sangat mudah diperoleh di negeri ini seperti dari hasil-hasil pertanian seperti minyak kelapa sawit

—populer disebut CPO (*crude palm oil*)— dan bahkan dari limbah pertanian sekalipun seperti limbah singkong. Dari bahan berjenis biofuel ini dihasilkan bahan bakar bioetanol (*gasohol*) dan biodiesel.

Secara ekonomi, Indonesia memiliki sedikit selisih harga lebih murah, bila menggunakan bahan bakar biodiesel dan bioetanol. Hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan harga bahan bakar biodiesel yang mencapai US\$ 30 sen perliter.

Harga itu diperoleh bila jumlah pemakai biodiesel mencapai dua persen dari total pemilik kendaraan. Pemakaian dua persen biodiesel oleh pengguna kendaraan bermotor berarti setara dengan pemakaian 800.000 kiloliter biodiesel. Itu setara dengan sejumlah 800.000 ton minyak sawit yang harus diolah.

Untuk menyediakan minyak sawit sebanyak itu dibutuhkan 230.000 hektar perkebunan baru. Untuk mengurus kebun dan bekerja di pabrik pengolahan dibutuhkan tenaga kerja baru paling sedikit 105.000 orang.

Begitu pun halnya bila pemerintah ingin mengembangkan pemakaian bahan bakar bioetanol. Bila dihasilkan 420.000 kiloliter bioetanol setiap tahun saja, maka diperlukan 2,5 juta ton singkong. Itu berarti dibutuhkan 91.000 hektar perkebunan singkong, yang akan mampu membuka lapangan kerja bagi 650.000 orang. ■



Dua pesawat TNI-AU jatuh pada hari yang sama. Tiga perwira tewas. Anggaran pemeliharaan yang terbatas dan embargo AS dianggap faktor penyebab kecelakaan.

Mendung menyelimuti keluarga besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU), pada Kamis, 21 Juli 2005. Dua buah pesawat milik TNI-AU, pesawat angkut CN-235 dan pesawat latihan/tempur OV-10 Bronco, terjatuh di dua lokasi berbeda.

Pesawat CN 235 yang diterbangkan Kapten Imam Subekti (pilot) dan Lettu Jamias (kopilot) terjatuh di dekat Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe, NAD.

Pesawat OV-10 Bronco, yang diawaki Mayor Pnb. Robby Ibnu Robel, Komandan FLT Ops "B" Skwadron 21, dan Lettu Pnb. Hercus Adiya Wing Wibowo jatuh ke jurang di hutan Magersari, Bukit Limas, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sekitar 15 km dari Pangkalan Udara (Lanud) Abdurachman Saleh, Malang.

Koran Tempo (22/7) memberitakan, pesawat CN-235 yang biasa menerbangi rute Sabang-Banda Aceh-Lhokseumawe itu mengangkut 23 penumpang termasuk sejumlah perwira yang akan mengikuti *briefing* dari Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Jumat (22/7).

Tiga orang perwira terbaik TNI-AD tewas di tempat, yakni Letkol Inf. Tugas Wignyo Kusbianto (Dan Yon 521/Brawijaya), Letkol Inf. Tito (Dan Yon 312/Siliwangi), dan Mayor Inf. Taufan (Kasdim 0105 Aceh Barat Daya).

Korban luka-luka, antara lain, Kolonel Reri Sutanto, Letkol Taufik Ismunandar,

Letkol Mudjia Widyanto, Letkol Itison, Kapten A. Tambunan, Lettu Nugroho.

Pesawat OV-10 Bronco yang tengah menjalani latihan "Garuda Perkasa" untuk persiapan peringatan "60 Tahun Indonesia" pada 17 Agustus nanti, ditemukan dalam keadaan tertancap dengan kemiringan 80 derajat. Kedua penerbangnya dipastikan meninggal dunia.

Anggaran terbatas

Kendati penyebab kecelakaan masih diselidiki, patut dipertanyakan apakah ada korelasi antara dua kecelakaan itu dengan kondisi pesawat?

Anggota DPR-RI yang membidangi masalah pertahanan Djoko Susilo, mengungkapkan rasa prihatin mendalam atas kondisi pesawat-pesawat yang dimiliki TNI-AU.

Anggota F-PAN itu mengaku pernah menaiki pesawat CN-235 saat melakukan kunjungan kerja bersama anggota Dewan lainnya ke perbatasan Kalimantan-Malaysia.

Djoko mengisahkan, karena kondisi pesawat tidak memungkinkan, jarak Kalimantan-Jakarta yang seharusnya bisa ditempuh dua jam akhirnya ditempuh selama empat jam.

Saat ini banyak pesawat TNI-AU yang tidak laik terbang, seperti F-4 Sky Hawk dan MK Hawk, pesawat pengintai yang masanya satu hingga dua tahun ke depan harus diganti. Yang masih layak terbang hanya pesawat tempur F-16. Itupun

hanya beberapa saja dari satu skuadron yang ada. Pesawat jenis Sukhoi tak memiliki persenjataan. Pesawat Hercules pun bisa dihitung dengan jari yang masih bisa beroperasi.

Yang memprihatinkan lagi, ujar Djoko, anggaran yang disediakan untuk merawat seluruh alat utama sistem senjata (Alutsista) TNI-AU hanya 5 persen. Tahun ini anggaran TNI-AU hanya Rp 2,7 triliun dari Rp 23 triliun anggaran yang disediakan untuk Mabes TNI dan Departemen Pertahanan.

"Anggaran ini sangat jauh dari cukup. Seharusnya anggaran untuk pertahanan ini senilai Rp 50 triliun," tandas Djoko Susilo, seperti dikutip harian *Seputar Indonesia* (22/7).

Terbatasnya anggaran pemeliharaan Alutsista TNI pernah dilontarkan Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono. Dari total anggaran tiap angkatan, hanya 30-35 persen dialokasikan untuk pengembangan dan perawatan Alutsista. Sedangkan 60-70 persen anggaran untuk personil dan operasional administrasi.

Namun Juwono tidak mau berspekulasi mengaitkan kecilnya anggaran itu sebagai faktor penyebab kecelakaan pesawat CN-235 dan OV-10 Bronco.

"Kami masih prihatin pada biaya pemeliharaan. Tapi kita tidak bisa berspekulasi apakah ada kaitan antara dana yang terbatas dengan kecelakaan itu. Kita tunggu hasil investigasi tim TNI-AU," ujarnya.

Menurut Kadispem TNI-AU, Marsekal Pertama TNI Sagom Tamboen, TNI-AU memiliki 122 pesawat dari berbagai jenis untuk menjaga lima juta kilometer persegi luas wilayah Nusantara.

Dia membenarkan, tingkat kesiapan operasional hampir seluruh pesawat itu sudah jauh menurun. Kondisi itu tidak terlepas dari embargo senjata AS.

Khusus untuk pesawat yang umurnya lebih dari 20 tahun, seperti OV-10 Bronco dan Hawk MK 53, kini dalam kajian TNI-AU untuk diganti dengan jenis pesawat yang punya kemampuan sama guna lebih mengoptimalkan sistem pertahanan udara.

Sebenarnya, kemampuan TNI-AU yang terbatas ini sudah tercermin ketika terjadi musibah bencana tsunami yang memporak-porandakan Aceh dan Pulau Nias. Pemerintah (Presiden SBY) yang menyadari, kesulitan mengevakuasi korban karena keterbatasan pesawat angkut, sehingga terpaksa meminta bantuan dari AS, Australia, Singapura, dan Malaysia untuk membantu proses evakuasi. ■ SP

Pelopori Pendidikan Holistik Berbasis Karakter

Ratna Megawangi, Ph.D

Ia pengusung ide perbedaan yang harus dipelihara secara harmoni, dalam hal apapun itu termasuk toleransi dalam beragama. Untuk menjemput Indonesia masa depan yang berakhlak mulia, baji-bijak dan takut kepada Tuhan, bersama suami ia memelopori pendirian pusat pendidikan holistik berbasis karakter.

Ratna Megawangi, Pendiri/Direktur Eksekutif Indonesia Heritage Foundation (IHF), dikenal sebagai perempuan yang cerdas dan berkepribadian kuat. Ia adalah pelopor pendidikan holistik berbasis karakter, yang setamat SMA tahun 1978 memilih masuk kuliah jurusan Makanan, Gizi dan Sumberdaya Keluarga (MGSK), Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (FP-IPB), karena alasan sederhana. Ia ingin menjadi insinyur sesegera mungkin. Kampus Darmaga ketika itu sedang menawarkan program kuliah cepat khusus bagi orang-orang pintar.

IHF adalah wadah bagi Ratna me-

nuangkan idealisme, mimpi dan harapan besar Indonesia akan berjaya sebagai bangsa berkarakter kuat. Ratna, bersama suami dan kawan-kawan pada tahun 2000 mendirikan Indonesia Heritage Foundation, atau Yayasan Warisan Luhur Indonesia sebagai pusat pendidikan holistik berbasis karakter yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini prasekolah. Dengan kapital awal hanya Rp 75 juta dan didukung 12 tenaga profesional, Yayasan memiliki tujuan mulia menyemaikan nilai-nilai universal yang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia, kepada anak-anak yang menjadi benih-benih bangsa supaya setiap generasi di masa depan memiliki karakter

yang kuat, akhlak yang mulia, takut kepada Tuhan dan bajik-bijak.

Sekolahnya diberi nama TK/SD Karakter serta Semai Benih Bangsa (SBB). Yang terakhir ini diperuntukkan gratis khusus bagi anak-anak dari warga tak mampu di lingkungan kumuh. Berkat dukungan para sponsor, TK/SD Karakter dan SBB yang diplot mampu menembus sekat perbedaan agama, suku, golongan hingga status sosial ekonomi, sehingga semua anak berkesempatan memperoleh pendidikan karakter, kini sudah berjumlah ratusan tersebar di berbagai pelosok tanah air. Lewat penanaman karakter sejak usia dini Ratna yakin bangsa ini akan kembali menjadi kuat seperti dahulu.

Temukan 'Makanan Jiwa'

Karena haus akan ilmu dan pengetahuan, maklumlah ia sangat brilian dalam berfikir bijak dalam bersikap, bermodalkan beasiswa dari Ford Foundation untuk tahun pertama dan tahun kedua dari World Bank, tahun 1986 Ratna berangkat ke Amerika Serikat mengambil program S-2, di School of Nutrition, Tufts University, Medford, Massachusetts bidang Ilmu Sosial dan Gizi. Ia yang setahun mendahului suami bermukim di negeri Paman Sam, menyelesaikan gelar M.Sc-nya pada tahun 1988.

Tak cukup sampai di situ, Ratna juga tertarik menempuh program doktor untuk meraih gelar Ph.D di bidang *International Food and Nutrition Policy*. Ia lulus tahun 1991 dalam usia relatif masih muda, 33 tahun. Di sana, sambil kuliah Ratna berperan pula sebagai istri bagi suami dan ibu bagi dua anak yang sudah dilahirkan, sekaligus 'nyambi' tenaga *research asisstant* di kampus sebagai bentuk lain dari beasiswa.

Berhubung Dr Sofyan Abdul Djalil, SH, MA, MALD, suami yang dinikahinya pada Mei 1982 belum menyelesaikan program S-3nya, di kampus sama Tufts University bidang *International Financial and Capital Market Law and Policy*, Ratna mengajukan proposal baru mengambil *post doctoral program*, dan diterima. Hanya saja Ratna harus 'keluar' dari pakem lama GMSK, sebab peluang yang tersedia hanya bidang pengembangan anak (*child development*), yang kelak banyak berbicara tentang pengasuhan anak, keluarga, dan orangtua.

Ratna menjalankan *program post doctoral*-nya pada tahun 1991-1993 sambil bekerja sebagai *independent research*. Ia mengadakan sejumlah riset tentang keluarga dan perkembangan

Ir Ratna Megawangi, M.Sc, Ph.D

Lahir: Jakarta, 24 Agustus 1958 **Jabatan:** Pendiri/Direktur Eksekutif Indonesia Heritage Foundation (IHF) **Agama:** Islam **Suami:** Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD **Anak:** Muhammad Rumi, lahir 1985, Safitri Mutia, lahir 1990, Muhammad Lutfi, lahir 1998, **Ayah:** Ayah Drs Harmonie Djaffar **Ibu:** Sri Mulyatie **Pendidikan:** Post Doctoral Fellow, Tufts University School of Nutrition, Medford, Massachusetts, AS bidang Keluarga, Pengasuhan Anak, Orangtua, 1991-1993-S-3, Tufts University School of Nutrition, Medford, Massachusetts, AS, bidang Kebijakan Internasional Makanan dan Gizi, 1998-1991-S-2, Tufts University, bidang Ilmu Sosial dan Gizi, 1986-1988-S-1, Institut Pertanian Bogor (IPB) Bogor, Fakultas Pertanian, Jurusan Makanan, Gizi, dan Sumberdaya Keluarga, 1978-1982 **Penghargaan:** Mahasiswa Lulusan Terbaik Fakultas Pertanian IPB Bogor, Mei 1982, Ford Foundation Fellowship Award, 1986-1987-Inter-University Center Fellowship Award, 1987-1988-Tufts University Graduate Fellowship Award, 1988-1989-Ford Foundation Fellowship Award, 1989-1991-Penghargaan “80 Tokoh Wanita Muslim Indonesia Terbaik”, Januari 2002, dimana profilnya ditulis dalam “Profil Tokoh Wanita Muslim Indonesia”, 2002 **Alamat Kantor:** Indonesia Heritage FoundationTK Karakter Jln. Raya Bogor KM 31 no: 46 (Depan Papatua Pizza Restaurant) Cimanggis, Depok 16954, Indonesia Telp. (021) 871.2022 (www.tokohindonesia.com)

anak di berbagai negara di dunia, yang hasilnya ia bukukan dan diterbitkan di Jepang.

Saat mengambil *post doctoral program* itulah Ratna merasakan keberhasilan baru menemukan apa ‘makanan jiwa’-nya yang sesungguhnya. Ia menyadari kesenangannya terletak pada sisi humaniora yang multidisiplin, yang menggabungkan beragam ilmu seperti sosial, sosiologi, psikologi, budaya, filsafat dan semacamnya. Ia bersikap baru tak mau lagi sekolah sebatas memenuhi naluri keilmuan yang seolah tiada mengenal batas.

“Sewaktu saya melakukan *post doctoral program*, saya merasa inilah yang rasanya menyentuh bukan saja *intellectual academic* saya, tetapi juga menyentuh hati saya, jiwa saya,” kata Ratna, sebagaimana ditulis oleh www.tokohindonesia.com sebuah situs menarik yang sedang dibangun menjadi plasa web para tokoh terkemuka Indonesia.

Gizi menurut Ratna adalah *food for the physical body*, sedangkan pendidikan anak dan keluarga merupakan *food for the soul*. “Keduanya sama saja makanan juga, bedanya yang satu makanan tubuh satu lagi makanan jiwa,” kata Ratna, wanita berkacamata minus peraih penghargaan “80 Tokoh Wanita Muslim Indonesia Terbaik” Januari 2002.

Selain menemukan makanan jiwa, Ratna banyak pula mengalami kontemplasi hidup yang intens bersama suami di AS. Secara khusus mereka berkenalan dengan sejumlah aliran dalam sufisme, yang membuat sejumlah ilmu, teori dan filsafat kehidupan melekat cukup erat dan dimengerti oleh keduanya.

“Membiarkan Berbeda”

Kembali ke Indonesia tahun 1993 Ratna segera saja berkarya. Sejak tahun 1994 ia aktif menulis sejumlah buku dan puluhan artikel yang dipublikasikan berbagai media massa,

terutama *Suara Pembaruan*, yang dalam hitungan Ratna telah memuat kurang lebih 30 buah artikelnya.

Ratna banyak membuka wacana baru tentang anak, keluarga dan perempuan. Kehadirannya yang begitu mengejutkan, dengan mengusung sejumlah ide-ide pembaharuan tentang anak, orangtua, perempuan dan keluarga dianggap bernada antagonis terhadap para penganjur gerakan feminisme. Maklum, feminisme adalah aliran baru yang sedang mekar-mekarnya menjadi wacana. Ratna di sini dicap sebagai *against the stream* bagi *mainstream* yang sedang berkembang.

Puncak keberanian Ratna menggagas ide pembaharuan adalah tatkala meluncurkan buku berjudul “Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender”, tahun 1999. Buku ini semakin memperjelas kesan sebagai antitesa terhadap gerakan feminisme yang sedang gencar memperjuangkan kesetaraan gender di semua level, sektor dan area kehidupan publik.

Ratna menulis bukunya sejak tahun 1997 dan selesai seminggu setelah tragedi nasional 14 Mei 1998, peristiwa dramatis yang sarat dengan penistaan terhadap anak, orangtua, dan keluarga terlebih terhadap perempuan. Buku itu diterbitkan oleh Mizan, Bandung tahun 1999 memuat berbagai postulat dasar, ideologi, paradigma dan contoh-contoh tentang kegagalan ide kesamarataan lelaki-perempuan di berbagai negara, terutama di negara komunis. Beragam pemikiran lain ikut dituangkan di situ, yang memberikan Ratna kesimpulan akhir bahwa lelaki dan perempuan adalah berbeda.

Ratna menyadari semua pihak sesungguhnya laki-laki dan perempuan tidak bisa dipersama-ratakan. Secara kodrati, genetika, psikis dan fisik keduanya berbeda yang semakin bisa diperlihatkan pada pembawaan peran masing-masing yang saling melengkapi. Karena-

nya, perbedaan haruslah dipelihara menjadi sebuah harmoni.

Tak Ada yang Berubah

Cita-cita, mimpi, gagasan dan idealisme Ratna membangun bangsa lewat pendidikan holistik berbasis karakter kepada anak-anak sejak usia dini pra-sekolah, tetaplah besar. Tak ada perubahan yang berarti dalam dirinya setelah suami diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Ratna dari awal memang telah terbentuk menjadi pribadi berintegritas tinggi dan independen dalam bersikap. Hanya pada sisi-sisi tertentu saja ia masih merasa amat sangat tergantung kepada suami, seperti secara emosional dan finansial. Sebab keduanya telah sepakat Ratna bergerak di jalur yang mendedikasikan diri kepada persiapan masa depan bangsa, sehingga praktis tak perlu memikirkan apa dan darimana sumber pendapatan keluarga, sedangkan Sofyan Djalil di jalur yang bekerja menghidupi keluarga secara finansial.

Ratna tak pernah membawa-bawa nama suami apapun aktivitas yang dia lakukan. Sehingga tak sedikit kalangan yang tak menyangka kalau Ratna adalah istri dari Sofyan Djalil. Posisi demikian memberikan nilai tambah tersendiri bagi Ratna. Ia menjadi tetap bisa memelihara daya kritisnya, termasuk terhadap pemerintahan. Sikapnya tak sedikitpun luntur kendati sang suami sudah merupakan bagian terdalam dari birokrasi pemerintahan pusat.

Ratna secara rutin menuangkan pikirannya dalam rubrik “Sudut Pandang”, setiap Kamis di harian sore *Suara Pembaruan* bergantian bersama Ketua Umum PGI Pdt Dr Andreas Yewangoe dan Bondan Winarno. Dalam tulisannya berjudul “Toleransi Beragama” (21/7), misalnya, Ratna secara khusus menyoroti aksi penyerangan jemaah Ahmadiyah di Bogor oleh sekelompok orang. ■ TI-HT

Memutus Rantai Flu

Kasus flu burung sudah terjadi sejak tahun 2003. Pemerintah baru melancarkan penanganan intensif tahun ini.

Kematian menda-dak Iwan Siswara Rapei (38) dan kedua puterinya, Sabrina Nur Aisah (8) dan Thalita Nurul Azizah (1) pada pertengahan Juli lalu menimbulkan dampak kepanikan di kalangan masyarakat.

Iwan adalah pegawai Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di bagian hubungan luar negeri. Kematian dan kedua puterinya mengundang perhatian Departemen Kesehatan yang kemudian mengirimkan sampel darah laboratorium rujukan WHO di Hongkong. Hasilnya diumumkan Rabu, (20/7). Dipastikan Iwan dan kedua anaknya positif terkena flu burung yang sumbernya belum diketahui sampai sekarang. Kasus ini merupakan kasus pertama flu burung menyerang manusia di Indonesia.

Berbagai media memuat peristiwa ini, bahkan dalam *headline*-nya beberapa hari berturut-turut. Bahkan majalah *Gatra* No. 36, 23 Juli 2005, memuatnya sebagai laporan utama.

Mengantisipasi kepanikan masyarakat, Menkes Siti Fadilah Supari kemudian menggelar penyuluhan di lingkungan kompleks perumahan Iwan, yakni Kompleks Villa Melati Mas, Serpong, Tangerang, Minggu (17/7). Pada kesempatan itu, seperti dilaporkan harian *Republika*, Senin, 18 Juli 2005, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik, sebab flu burung tidak menular antar manusia.

Namun pengawasan di lingkungan Depkes terhadap isteri Iwan, Lin Rosalina dan anak lakinya, Fariz Rizky, juga 315 orang yang teridentifikasi pernah melakukan kontak dengan pasien. Termasuk dokter dan perawat di Siloam Gleneagles dan Harapan Kita, juga te-

tangga dan rekan kantor Iwan di BPK.

Pemerintah juga sudah menyiapkan 44 rumah sakit di Indonesia sebagai tempat perawatan. Rumah sakit itu tadinya disiapkan untuk penanggulangan SARS, sehingga sudah mengetahui prosedur isolasi dan sebagainya.

Pemusnahan ternak

Flu burung telah menyerang 132 kota/kabupaten di 21 provinsi Indonesia. Menurut Dirjen Peternakan Departemen Pertanian Mathur Riyadi, sebanyak 9,53 juta ekor unggas mati dihitung sejak Agustus 2003 hingga 1 Juli 2005.



Serupa Tapi Tak Sama

Flu burung, pneumonia dan SARS memiliki gejala yang hampir sama. Tak heran jika Iwan Siswara sempat diduga terserang SARS atau pneumonia.

	Pneumonia	SARS
Penyebab	Bakteri dan virus	Korona virus
Gejala	Panas, sesak napas, batuk, nyeri dada, radang tenggorokan, batuk kering	Panas di atas 38C, nyeri otot, demam, sakit kepala, kesulitan bernapas
Efek	Penurunan kondisi tidak begitu drastis (mematikan)	Kondisi pasien lebih cepat memburuk (mematikan)

Maut

Bahkan, Departemen Pertanian menemukan virus flu burung pada lima ekor babi di Tangerang, Banten, pada Februari lalu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang, Didi Aswadi, mengatakan semuanya sudah dimusnahkan dengan cara dibakar pada Maret 2005.

Saat ini, dilaporkan harian *Republika*, Selasa, 19 Juli 2005, Departemen Pertanian sedang menganalisis sekitar 1.300 serum babi di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Anton Apriyantono juga meminta Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang untuk mengawasi secara ketat hewan-hewan ternak yang ada di Tangerang.

Juga akan diterapkan langkah pemusnahan ternak unggas dan babi dalam kawasan beradius tiga kilometer dari wilayah yang terkena virus flu burung. Hal itu untuk mencegah meluasnya penyebaran virus flu burung pada ternak, khususnya unggas.

Menurut Anton, seperti dikutip majalah *Tempo* edisi 31

Juli 2005, penanganan flu burung sudah dilakukan secara simultan sejak serangan awal tahun 2003, di antaranya dengan vaksinasi hewan karantina daerah endemik serta pemusnahan ternak yang terkena virus. Vaksin yang sudah disalurkan sebanyak 140,2 juta dosis.

Diakuinya virus flu burung, seperti virus lainnya yang biasa menyerang manusia, susah diberantas total. Dengan upaya simultan, diharapkan pada 2007 Indonesia sudah bebas dari virus ini, seperti sudah disepakati negara-negara ASEAN. Bahkan, Mathur Riyadi optimis bila cara pemusnahan ternak bisa sukses dilakukan, Indonesia bisa bebas dalam waktu enam bulan. Penyebaran virus jenis H5N1 ini sekarang tidak hanya menjangkiti unggas, melainkan babi. Pada hewan ini, virus menjadi lebih ganas. Virus ini juga bisa menyerang dan disebarkan kucing dan macan, seperti yang terjadi di Thailand. ■ RH

Hotline Posko Flu Burung: Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan untuk Wilayah Jakarta, Jawa Barat dan Banten: **021-4257125**

Sumber: Harian *Republika*

Flu Burung

Virus influenza tipe A

Panas, demam, batuk, nyeri dada dan otot, rasa lelah dan lemah, sakit tenggorokan.

Kondisi pasien lebih cepat memburuk (mematikan)

PETA TERJANGKITNYA FLU BURUNG DI INDONESIA

Sejak Agustus 2003 sampai 1 Juli 2005, sebanyak 21 provinsi dan 132 kabupaten/kota telah terjangkit wabah flu burung dengan total kematian unggas 9,35 juta ekor.

1. BANTEN

Tertular sejak Agustus 2003
Sampel kota Tangerang
Jumlah 388.000 ekor

2. DKI

Tak ada data
Sampel kota Jakarta Utara
Jumlah 23.500 ekor

3. JAWA BARAT

Tertular sejak Oktober 2003
Sampel kota Bogor
Jumlah 1.133.923

4. JAWA TENGAH

Tertular sejak November 2003
Sampel kota Sragen
Jumlah 700.500 ekor

5. D. I. YOGYAKARTA

Tertular sejak Oktober 2003
Sampel kota Kulonprogo
Jumlah 179.859 ekor

6. JAWA TIMUR

Tertular sejak Oktober 2003
Sampel kota Blitar
Jumlah 791.732 ekor

7. BALI

Tertular sejak November 2003
Sampel kota Tabanan
Jumlah 652.285 ekor

8. LAMPUNG

Tertular sejak November 2003
Sampel kota Tulang Bawang
Jumlah 313.987 ekor

9. KALIMANTAN TENGAH

Tertular sejak Oktober 2003
Sampel kota Waringin
Jumlah 32.745 ekor

10. KALIMANTAN SELATAN

Tertular sejak Oktober 2003
Sampel kota Tanah Laut
Jumlah 3.340 ekor

11. KALIMANTAN BARAT

Tertular sejak Januari 2004

Sampel kota Pontianak
Jumlah 10.638 ekor

12. SUMATERA SELATAN

Tertular sejak Januari 2004
Sampel kota Musirawas
Jumlah 20.892 ekor

13. SUMATERA BARAT

Tertular sejak Februari 2004
Sampel kota Pasaman
Jumlah 3.447 ekor

14. BENGKULU

Tertular sejak Agustus 2004
Sampel Bengkulu
Jumlah tak ada data

15. NUSA TENGGARA BARAT

Tertular sejak Maret 2004
Sampel Lombok
Jumlah 2.057 ekor

16. BANGKA-BELITUNG

Tertular sejak Januari 2004
Sampel kota Pangkalpinang
Jumlah tak ada data

17. NUSA TENGGARA TIMUR

Tertular sejak Oktober 2004
Sampel kota Kupang
Jumlah 4.375 ekor

18. SULAWESI SELATAN

Tertular sejak Februari 2005
Sampel kota Sidrap
Jumlah 273.583 ekor

19. JAMBI

Tertular sejak Februari 2005
Sampel kota Batanghari
Jumlah 16.676 ekor

20. SUMATERA UTARA

Tertular sejak April 2005
Sampel kota Simalungun
Jumlah 5.000 ekor

21. KALIMANTAN TIMUR

Tertular sejak Mei 2005
Sampel kota Kartanegara
Jumlah 15.091 ekor.

Sumber: *Koran Tempo*

Windows Vista Sistem Operasi Microsoft Terbaru

 **A**ntusiasme dan rasa penasaran para pengguna PC berbasis Windows kembali mencuat setelah Microsoft melalui situsnya (22/7/05) secara resmi mengumumkan bahwa Windows Vista yang semula hadir dengan nama kode Longhorn sudah bisa diperoleh di pasaran pada semester kedua 2006. Windows Vista yang akan menggantikan Windows XP ini menawarkan perpaduan keunggulan yang dimiliki Windows XP dengan Service Pack 2 dan Windows Server 2003 dengan Service Pack 1.

Microsoft mengumumkan nama tersebut pada konferensi divisi penjualan yang dihadiri sekitar 11.000 karyawan di Atlanta. Pengumuman itu disiarkan *online* lewat situs Microsoft. Namun bagi yang ketinggalan acara peluncuran tersebut, Microsoft menyediakan video peluncurannya. Dalam video tersebut Microsoft juga memperkenalkan moto Vista, yaitu 'Clear, Confident, Connected: *Bringing clarity to your world*' (Mem-bawa kejernihan bagi dunia anda).

Dari sisi fitur, Microsoft mengklaim Windows terbarunya ini menawarkan perbaikan mendasar dari sisi keamanan, realibilitas, kemudahan *deployment*, dan peningkatan performa, sejak Bill Gates mengumumkan sistem operasi ini untuk pertama kalinya Oktober 2003.

Pada Windows Vista terdapat sistem pencarian file dan informasi yang berbeda dengan Windows sebelumnya. Windows Vista memperkenalkan suatu konsep pengorganisasian baru yang dinamakan

Virtual Folder, dimana sistem *searching* secara otomatis dan instan akan bekerja ketika si pengguna membuka *folder*.

Fasilitas baru lainnya adalah setiap Explorer termasuk Internet Explorer akan disertakan *Quick Search* yang mempercepat pengguna mencari informasi di PC mereka. Selain itu, pada Windows Vista terdapat implementasi arsitektur untuk Web Services yang dikenal sebagai Indigo, serta mesin grafik baru yang dikenal dengan Avalon.

Sebagai tambahan, *Koran Tempo* edisi Selasa, 26 Juli 2005, menyebutkan fitur-fitur terbaru pada Windows Vista, yakni penyederhanaan aturan sejumlah tugas, seperti menambahkan PC ke jaringan rumah atau menghubungkan laptop ke proyektor ; mudah mengoperasikan PC sekaligus ; mendukung IPv6 (standar terbaru protokol internet) ; perubahan pola mesin sinkronisasi ; optimasi *hard drive* otomatis ; proses *boot up* yang aman, mencegah orang mengakses data jika laptop atau PC hilang atau dicuri.

Versi Beta 1 dari Longhorn, atau Windows Vista ini muncul awal Agustus 2005. Sementara Beta 2 diperkirakan muncul awal tahun 2006, yang kemudian diikuti dengan peluncuran versi final, akhir tahun 2006.

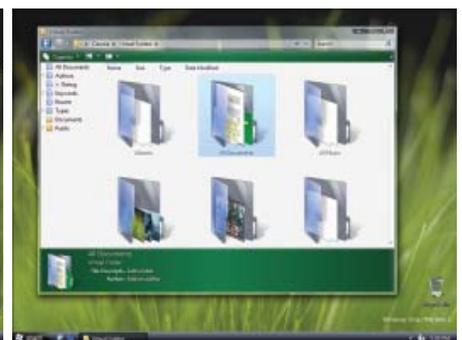
Sebagaimana sistem operasi Microsoft lain, Windows Vista terbilang rakus dalam hal persyaratan minimum yang dibutuhkanannya. Misalnya, RAM yang digunakan di PC disarankan 512 MB, kartu grafis *dedicated* dengan dukungan DirectX 9.0 dan prosesor berbasis Intel Pentium atau AMD Athlon. ■ MLP

SEJARAH WINDOWS

1983	Windows diumumkan (Nov 1983)
1985	Windows 1.0 diperkenalkan (Nov 1985)
1987	Windows 2.0 dirilis (9 Des 1987)
1987	Windows/386 atau Windows 386 diperkenalkan 9 Des 1987
1988	Windows/286 atau Windows 286 diperkenalkan Juni 1988
1990	Windows 3.0 dirilis 22 Mei 1990
1991	Windows 3.0a (with multimedia) dirilis Okt 1991.
1992	Windows 3.1 dirilis April 1992 (konon terjual lebih dari 1 juta copy dalam bulan pertama)
1992	Windows for Workgroups 3.1 dirilis Okt 1992
1993	Windows NT 3.1 dirilis Agustus 1993. Pada tahun 1993, jumlah pemakai windows berlisensi konon lebih dari 25 juta
1994	Windows for Workgroups 3.11 dirilis Febr 1994
1994	Windows NT 3.5 dirilis Sept 1994
1995	Windows NT 3.51 dirilis Juni 1995
1995	Windows 95 dirilis Agust 1995, terjual 1 juta copy dalam 4 hari pertama
1996	Windows NT 4.0 dirilis Agust 1996
1996	Windows CE 1.0 dirilis Nov 1996
1997	Windows CE 2.0 dirilis Nov 1997
1998	Windows 98 dirilis Juni 1998
1998	Windows CE 2.1 dirilis Juli 1998
1999	Windows 98 SE (Second Edition) dirilis Mei 1999
1999	Windows CE 3.0
2000	Windows 2000 dirilis Feb 2000
2000	Windows ME (Millennium) dirilis 19 Juni 2000
2001	Windows XP dirilis 25 Okt 2001
2003	Windows Server 2003 dirilis 28 Maret 2003
2006	Windows Vista (lebih dikenal dengan nama Longhorn)
2007	Windows Server 2007 (Longhorn Server)
2011	Windows dengan nama "Blackcomb"

SUMBER REFERENSI LAINNYA:

<http://www.microsoft.com/windowsvista/default.msp>
<http://msdn.microsoft.com/windowsvista/about/>
<http://www.winsupersite.com/faq/vista.asp>



Kaleidoskop Berita Indonesia:

1 Juli 2005: JW Menre Diberhentikan

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Hendarman Supandji, memberhentikan JW Menre sebagai Ketua Tim Penyidik Kasus Kredit Macet Bank Mandiri terkait dengan PT Arthabhama Textindo senilai Rp 52 miliar. Baringin Sianturi ditunjuk sebagai pengganti.

2 Juli 2005: SBY Bintang Asia

Majalah *Business Week Asia* edisi 11 Juli 2005 menganugerahi Penghargaan "Stars of Asia" kepada Presiden SBY. SBY termasuk satu dari 25 tokoh dan inovator di Asia yang mendapat penghargaan itu. SBY menempati urutan pertama kategori *agenda setters*, berkat kepiawaiannya mengelola penanganan bencana tsunami di Aceh (*crisis management*).

3 Juli 2005: Taufik Hidayat Juara Singapura Terbuka

Taufik Hidayat, pebulutangkis Indonesia, untuk ketiga kalinya menjuarai turnamen bulutangkis Singapura Terbuka, setelah mengalahkan pemain China Chen Hong 15-9, 15-3.

4 Juli 2005: Ribuan awak PPD Mogok

Ribuan awak perusahaan umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), mogok. Mereka menuntut pembayaran gaji selama tiga bulan yang telat dibayarkan. Banyak penumpang yang telantar.

5 Juli 2005: Mendiknas Tolak Turunkan Standar Kelulusan

"Ibarat main voli, bukan netnya yang diturunkan tapi permainannya diperbaiki," kata Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menolak menurunkan standar kelulusan pada ujian akhir nasional demi memperbaiki kualitas pendidikan.

6 Juli 2005: London Tuan Rumah Olimpiade 2012

London akhirnya terpilih sebagai tuan rumah Olimpiade 2012. Dalam pemungutan suara di Raffles City Convention Center, Singapura, London unggul atas rival beratnya, Paris.

7 Juli 2005: Bom Guncang London

Ledakan bom secara beruntun mengguncang tiga stasiun kereta bawah tanah dan merobek sebuah bus tingkat di pusat kota London pada jam sibuk. Serangan diklaim oleh organisasi Al-Qaeda jihad di Eropa, sedikitnya 33 orang tewas.

Kapolri Baru Dilantik

Jenderal Pol. Sutanto resmi dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Kepala Polri yang baru menggantikan Jenderal Pol. Da'i Bachtiar.

8 Juli 2005: Jusuf Kalla Minta Maaf

"Saya minta maaf atas kesulitan BBM yang pada hari-hari ini menjadi pembicaraan umum," kata wakil presiden Jusuf Kalla dalam pidato sambutan tanpa teks saat penutupan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah ke 45 di Malang.

9 Juli 2005: Guru Bantu Tuntut jadi PNS

Ribuan guru bantu dari seluruh Indonesia menuntut pemerintah agar segera merealisasikan janjinya untuk mengalihkan status mereka menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka menyampaikan tuntutan mereka kepada Dirjen Pendidikan Nasional Fasli Jalal dalam Temu Nasional dan seminar guru bantu Indonesia tahun 2005 di Taman Budaya Solo, Jawa Tengah.

10 Juli 2005: Impres Hemat Energi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan impres No. 10 tahun 2005 tentang penghematan energi kemarin. Impres tersebut berkaitan dengan kelangkaan BBM akibat lonjakan harga minyak mentah dan meningkatnya pemakaian di masyarakat. Inti impres tersebut adalah mengambil langkah penghematan energi di lingkungan semua instansi pemerintah.

11 Juli 2005: Menhut Laporkan 40 Nama cukong

Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban melaporkan 40 nama cukong kayu kepada Kapolri Jenderal Pol. Sutanto.

12 Juli 2005: Presiden Resmikan Tol Cipularang

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) yang menghubungkan Jakarta-Bandung.

13 Juli 2005: Tabrakan Tiga KA di Pakistan tewaskan 150 orang

Tiga kereta api yang sarat penumpang bertabrakan di dekat kota Ghotki, 600 kilometer dari Karachi. Sedikit 150 orang tewas dan sekitar 1.000 lainnya luka-luka.

14 Juli 2005: Lin Che Wei Pimpin Danareksa

Kementerian BUMN merombak total jajaran direksi PT. Danareksa. Mantan analis pasar modal Lin Che Wei alias Weibianto Halimdjati dilantik menjadi direktur utama menggantikan Zas Ureawan.

15 Juli 2005: Bupati Temanggung Diberhentikan

Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf resmi menonaktifkan Totok Ary Prabowo dari jabatannya sebagai Bupati Temanggung. Keputusan ini diambil setelah Totok ditetapkan sebagai terdakwa korupsi dan Pengadilan Negeri Temanggung mulai menyidangkan kasusnya.

16 Juli 2005: DPR Ngotot Gaji Rp 51 Juta/Bulan

Kendati keuangan negara sedang krisis, seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tetap *ngotot* agar *Take Home Pay* pendapatan mereka dinaikkan 82-104 persen. Anggota Dewan dari Rp 28,37 juta menjadi Rp 51,87 juta, pimpinan dari Rp 40,1 juta naik menjadi Rp 82,1 juta.

17 Juli 2005: RI-GAM Sepakat Damai

Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka mencapai kesepakatan damai dalam perundingan putaran kelima di Helsinki, Finlandia. Draft perjanjian yang dikirimkan ke Jakarta telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu (16/7).

18 Juli 2005: Iwan Dipastikan Positif Flu Burung

Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari memastikan Iwan Siswara Rafei, 37 tahun, positif terkena virus *avian influenza* H5N1 atau flu burung. Namun, kedua anaknya yang juga meninggal dunia tidak mengidap virus flu burung.

19 Juli 2005: Blair Temui Tokoh Muslim

Perdana Menteri Tony Blair dan para tokoh Perwakilan Dewan Muslim Inggris bertemu guna mendiskusikan solusi untuk menangani berbagai kelompok radikal Islam. Para pemimpin muslim juga mengeluarkan fatwa yang menyatakan serangan bunuh diri itu sangat "dilarang".

20 Juli 2005: Ketua DPRD Kediri Usul Togel Dilegalkan

Ketua DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, Bambang Harianto, mengusulkan judi toto gelap dilegalkan melalui peraturan daerah. Alasannya untuk meningkatkan PAD dan karena pemberantasan judi selama ini sekadar slogan.

21 Juli 2005: Israel Akan Hancurkan Sinagoga

Sumber militer Israel mengatakan, tentara Israel akan menghancurkan semua sinagoga dan sekolah agama Yahudi di pemukiman Yahudi di Jalur Gaza. Penghancuran setelah semua pemukiman meninggalkan wilayah yang sudah direncanakan akan menjadi milik warga Palestina itu. Hal tersebut diutarakan sebuah sumber di militer Israel.

22 Juli 2005: Perdagangan Ayam Anjlok 30-50%

Perdagangan ayam potong di pasar tradisional anjlok 30 persen hingga 50 persen. Turunnya pembeli diyakini terjadi sejak merebaknya isu flu burung di Indonesia.

23 Juli 2005: Ledakan di Mesir, 88 Orang Tewas

Tiga ledakan bom yang dahsyat mengguncang resort wisata terkenal di Mesir setelah pukul satu dini hari waktu setempat atau sekitar pukul lima pagi WIB. Akibat ledakan itu, 88 orang tewas dan setidaknya 200 orang cedera.

24 Juli 2005: Lance Armstrong Rebut Gelar Tujuh Kali Berturut-turut

Lance Armstrong, pembalap sepeda asal Amerika Serikat membuat sejarah baru di dunia balap sepeda. Dia menjadi orang pertama yang sukses merebut gelar tujuh kali berturut-turut di lomba balap sepeda Tour de France, yang berakhir 24 Juli 2005. Armstrong tergabung dalam Tim Discovery Channel.

25 Juli 2005: Amuk Massa di Kaur

Aksi perusakan dan pembakaran beberapa kantor pemerintah, rumah dinas, dan kendaraan terjadi di Bintuhan, ibukota Kabupaten Kaur, Bengkulu. Aksi perusakan itu dipicu unjuk rasa 2.000 orang yang menolak hasil pilkada Kaur.

26 Juli 2005: Separuh BUMN Bakal Dipangkas

Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan, pemerintah akan memangkas jumlah BUMN dari 158 menjadi 70-80 perusahaan. Di antaranya melalui penjualan kepada investor strategis, penawaran saham, perdana, dan merger antara BUMN, baik secara vertikal (*holding company*) maupun horizontal.

27 Juli 2005: Amnesti bagi Anggota GAM

Pemerintah Indonesia akan memberikan amnesti kepada anggota GAM, yang terkait makar, baik yang sedang menjalani hukuman maupun dalam status tahanan mencapai 2.053 orang, sebanyak 469 di Pulau Jawa dan 1.584 di Aceh, setelah 15 hari nota kesepahaman bersama (MoU) ditandatangani pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia.

7.098 Kasus HIV/AIDS di Indonesia

Penybaran HIV/AIDS di Indonesia tergolong cepat. Sampai Juli 2005, jumlah kasus HIV/AIDS di Indonesia mencapai 7.098 kasus. Dari jumlah kasus itu, sebanyak 3.358 kasus AIDS dan 3.740 HIV. Ada sekitar 150 ribu orang di Indonesia yang berpotensi tertular HIV/AIDS.

28 Juli 2005: K.H.M.A. Sahal Mahfudh, Ketua Umum MUI Baru

K.H.M.A. Sahal Mahfudh terpilih kembali sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) masa bakti 2005-2010, dalam Munas VII MUI, di Jakarta. Ketua umum PP Muhammadiyah, H. Din Syamsuddin, dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum.

29 Juli 2005: Jefry Noer Kembali Pimpin Kampar

Mendagri M Ma'ruf mengaktifkan kembali Jefry Noer sebagai Bupati Kampar, Riau, terhitung efektif sejak 29 Juli 2005. Keputusan itu menganulir SK Mendagri Hari Sabarno, yang ditandatangani pada 26 Maret 2004.

Kader PKS Wajib Laporkan Kekayaan

Pejabat negara dan pejabat partai dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diwajibkan melaporkan kekayaannya setiap tahun kepada sebuah badan penegak disiplin partai. Tujuannya mencegah kader PKS bermasalah dengan pengadilan.

30 Juli 2005: Indonesia Bebas Flu Burung pada 2007

"Pemerintah menargetkan dapat membasmi flu burung pada 2007. Saat ini, baru secara bertahap karena dana terbatas," kata Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, di Batu, Malang, Jawa Timur.

31 Juli 2005: Jumlah Orang Miskin 54 Juta Jiwa

Direktur Utama PT (Persero) Asuransi Kesehatan Orie Andari Sutadji mengatakan, pada semester kedua tahun 2005, orang miskin di Indonesia yang mengharapkan pelayanan kesehatan melalui PT Askes mencapai lebih kurang 54 juta orang. ■

Kuntoro Mangkusubroto

BERTAHAN UNTUK TETAP BERSIH



Satu yang tak berubah dari Kuntoro Mangkusubroto, ia masih saja tetap bertahan sebagai pribadi yang bersih, teguh memegang prinsip, dan berintegritas tinggi sampai-sampai nyaris dituduh melakukan *contempt of parliament*.

Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan namanya sebagai Kepala BP-BRR Aceh-Nias (Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara), reaksi masyarakat biasa-biasa saja. Jabatan baru setingkat menteri itu seolah dianggap sebagai pemberian belaka, kepada seorang mantan pengusaha pelat merah (BUMN) dan birokrat yang sepanjang karirnya dikenal bersih, teguh memegang prinsip dan berintegritas tinggi.

Seusai dilantik Kuntoro segera buka hati dan kuping lebar-lebar. Ia mendengar semua aspirasi dan harapan masyarakat, memastikan semuanya tertampung dalam rencana induk, dan mengupayakan par-

tisipasi masyarakat Aceh-Nias yang memiliki kekayaan budaya bisa mencapai titik optimal. Ia banyak berbicara kepada media massa, terutama media asing demi meyakinkan para negara donor bahwa bantuan mereka tidaklah sia-sia. Kepada majalah *Time* edisi Asia, misalnya, Kuntoro hari Sabtu (28/6) bersedia menjawab 10 pertanyaan.

Kuntoro sudah berketetapan hati untuk hanya mengabdikan bekerja membangun kembali Aceh-Nias, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, ia menjadi tidak terlalu perlu peduli terhadap berbagai konflik kepentingan politik yang masih saja selalu mewarnai bumi serambi Mekkah, termasuk gejolak gerakan bersenjata. Ia juga memastikan, "Tidak peduli dengan status, apa itu darurat sipil dan lain-lain, kita bekerja untuk rakyat. Jadi saya tidak peduli dengan politik," ujarnya, seperti ditulis situs Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, www.depkominfo.go.id.

Anggaran besar Rp 46,1 Triliun
Badan *superbody* pimpi-

nan Kuntoro beranggotakan 11 orang, bertanggungjawab langsung kepada Presiden, bertugas selama empat tahun, dan diproyeksikan menghabiskan biaya sebesar Rp 46,1 triliun, termasuk Rp 8,3 triliun harus sudah digunakan hingga akhir tahun 2005.

Dana puluhan triliun rupiah akan Kuntoro manfaatkan untuk merehabilitasi dan merekonstruksi ulang Aceh-Nias, supaya menjadi lebih baik dibanding sebelum terjadi gempa dan tsunami, sekaligus lebih indah serta sejajar dengan daerah-daerah Indonesia lain yang telah lebih dahulu maju. Bahkan, Kuntoro berkeyakinan, sebagaimana pesan Presiden, pembangunan kembali Aceh-Nias akan dijadikan sebagai model pembangunan daerah-daerah lain di Indonesia.

Kuntoro sudah memulai langkah pembangunan kembali Aceh-Nias sejak Minggu (18/7) lalu, ketika secara simbolis mengucurkan dana Rp 3,967 triliun untuk dimanfaatkan di beberapa sektor. Sejumlah pejabat lokal Aceh dihadirkan untuk menerima dana itu. Mereka, sebelum itu dimintakan

kesediaan mendatangi kontrak dan komitmen moral, untuk tidak menerima dan meminta 'jatah' dari para rekanan kontraktor pelaksanaan pembangunan Aceh.

"Kontrak komitmen moral itu harus ditaati serta tidak akan mengkorupsi dana yang sudah dialokasikan untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh, termasuk meminta honor atau bentuk lainnya dari rekanan kontraktor pelaksana," kata Kuntoro, sebagaimana ditulis kantor berita *Antara* (18/7).

Pun, ketika berbicara di hadapan delegasi badan dunia PBB, perwakilan Bank Dunia, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat lokal dan asing yang berkunjung ke Aceh (13/5), Kuntoro sudah lebih dahulu berkomitmen memastikan bahwa tidak akan ada korupsi di BRR. Ia menegaskan BRR adalah satu-satunya lembaga di tanah air yang memiliki satuan tugas anti-korupsi. Itulah sebab, seperti ditulis situs koran Medan *Sinar Indonesia Baru* (SIB), karena sudah menjadi kebijakan umum BRR maka semua pelaku rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh-Nias

Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc

Lahir: Purwokerto, 14 Maret 1947 **Agama:** Islam **Isteri:** Tuti Hermiatin Anak: Lima orang **Pendidikan:** S1 Teknik Industri ITB (1972), Stanford University, Industrial Engineer (1976), S2 Stanford University, Civil Engineer (1977), S3 ITB, Ilmu Teknik bidang Ilmu Keputusan (1982) **Karir :** Dosen Jurusan Teknik Industri, ITB (1972-sekarang), Staf Ahli Menteri Muda UP3DN (1983-1988), Pembantu Asisten Administrasi Menteri Sekretaris Negara RI Safaruddin Husada (1984), Dirut PT Tambang Batubara Bukit Asam (1988-1989), Direktur PT Tambang Timah (1989-1994), Direktur Jenderal Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1993-1997), Deputy Bidang Perencanaan, Badan Kordinasi Penanaman Modal (1997-1998), Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan VII (1988), Menteri Pertambangan Kabinet Pembangunan Reformasi (1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara (2005) **Kegiatan Lain:** Sekjen IA ITB periode 1987 - 1992, Ketua ITB School of Business Alamat Rumah: Jalan Kesemek Blok S No. 1 Kalibata Indah, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon 021-7972248

harus menandatangani surat pernyataan tidak melakukan korupsi. "Saya siap dicambuk jika melakukan korupsi, karena korupsi melanggar undang-undang Syariat Islam di daerah Serambi Mekah ini," tulis *SIB*, yang mengutip berita dari *Antara*.

Dituduh Menghina Parlemen

Komitmen Kuntoro untuk bertahan memelihara diri agar tetap bersih dari segala bentuk penyelewengan, seperti korupsi, nyaris saja menenggelamkan nama baiknya secara politis saat sedang berada di lingkungan para politisi Senayan.

Kuntoro dituduh melakukan penghinaan terhadap parlemen (*contempt of parliament*), ketika berujar tidak menerima permintaan anggota DPR untuk mengadakan pertemuan di kamar, *coffee shop* atau tempat lain, selama berhubungan dengan anggaran. Situs stasiun televisi *SCTV Liputan6.Com*, menggambarkan pernyataan pembuka dari Kuntoro itu disampaikan secara dingin.

Dan majalah *Tempo*, yang menuliskan peristiwa itu dua minggu kemudian (17/7), melukiskan pernyataan Kuntoro sebagai bernada tegas dan tajam. "Saya sudah perintahkan ke seluruh deputi agar tak menerima anggota DPR dalam rapat setengah kamar atau *coffee shop* jika menyangkut soal anggaran," kutip *Tempo*.

Pernyataan Kuntoro sontak mendapat reaksi keras dari sejumlah anggota Dewan, termasuk Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang meminta klarifikasi dan kejelasan siapa nama anggota Dewan yang Kuntoro

maksudkan.

Walau ramai dicecar, *Tempo* menyebutkan, Kuntoro makin tancap gas saja. "Pernyataan saya jelas: saya memerintahkan. Dan saya akan jelaskan dalam rapat tertutup dengan pimpinan," kata Kuntoro, yang akhirnya bisa berdamai dengan seluruh anggota Dewan, setelah di akhir rapat meminta maaf jika kata-katanya menyinggung.

Siapakah Kuntoro?

Kuntoro mempunyai ayah seorang pengacara dan ibu dosen bahasa Inggris di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Purwokerto, Jawa Tengah. Berasal dari keluarga terpelajar. Dia menjalani pendidikan SD hingga SMA di kota lulus 1972.

Dia langsung mengabdikan sebagai dosen di almamater. Ia berkesempatan memperdalam ilmu di bidang *industrial engineering*, di Stanford University, AS, selesai tahun 1976. Ia juga mendalami bidang *civil engineering* di kampus sama (1977), meraih gelar doktor dari ITB (1982) dengan disertasi tentang analisa keputusan.

Tak lama kemudian, Kuntoro (1983) ditarik ke kantor Sekretaris Negara, diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Muda UP3DN Ginandjar Kartasasmita, dan Pembantu Asisten Administrasi Menteri Sekretaris Negara (1984). Lima tahun kemudian (1988) ia diangkat menjabat Direktur Utama PT Tambang Batubara Bukit Asam, berkantor di Tanjung Enim, Palembang. Setelah itu ia diangkat menjadi Direktur

Utama PT Tambang Timah (TT), pada Desember 1989 sampai 1994.

Situs online *Ensiklopedia Tokoh Indonesia* menuliskan, dalam masa kepemimpinan Kuntoro Tambang Timah untuk pertamakali berhasil mencatat prestasi tidak mengalami kerugian. Kuntoro, disebut-sebut berhasil memperbaiki kinerja BUMN, mengangkatnya ke permukaan dari sebelu m n y a s sangat memprihatinkan.

Di bawah kendali Kuntoro TT terselamatkan hanya dalam tempo satu tahun. Dia melakukan kebijakan restrukturisasi besar-besaran meliputi empat aspek, yakni reorganisasi, relokasi kantor pusat dari Jakarta ke Pangkal Pinang, pelepasan aset dan rekonstruksi. Dalam rangka reorganisasi ia melakukan rasionalisasi, separoh karyawan "pensiun dipercepat" dari 24 ribu menjadi 12 ribu tanpa menimbulkan gejolak.

Keberhasilan itulah menghantarkan Kuntoro menjabat Dirjen Pertambangan Umum, Deptamben (1993). Pemikiran-pemikiran suami dari Tuti Hermiatin, dan ayah dari lima orang anak ini mendominasi kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan industri pertambangan Indonesia.

Namun tanpa diduga tahun 1996 ia dipecat karena kasus penambangan emas Busang, Kalimantan Timur. Saat itu, banyak orang, termasuk dirinya sendiri, memperkirakan karirnya sudah tamat. "*I was finished*," katanya kala itu. "Saya setuju kata 'dipecat'. Dan lebih dalam lagi, seakan kasus ini merupakan *part of the mis-*

take ada pada saya. Ini resiko dari sesuatu yang saya pegang dan percayai," katanya tahun 1998, sebagaimana dikutip *Kompas* (18/3).

Sikapnya yang *gentle*, selalu berpikir positif serta bersikap optimis membuat jalan karirnya ternyata belum tamat. Bahkan, terjadi kejutan-kejutan baru. Bukan hanya dia yang merasa terkejut, tapi banyak orang terkejut pula ketika Presiden Soeharto memintanya menjabat Menteri Pertambangan dan Energi, tahun 1998.

"Saya tidak menyangka sama sekali akan mendapat kepercayaan sebesar itu. Saya juga tidak pernah bermimpi," tutur Kuntoro, terharu, saat 14 Maret 1998 ia ditelepon Pak Harto bersamaan dengan hari ulang tahunnya ke-51.

Ketika Pak Harto lengser, digantikan Presiden BJ Habibie, ia tetap bertahan sebagai Menteri. Namun dalam pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, pencinta olah raga mendaki gunung itu digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Wahid malah mengangkat Kuntoro menjadi Direktur Utama PLN, 12 Januari 2000. Lalu Maret 2001 ia digantikan Eddie Widiono Suwondho, membuatnya kembali ke habitat asli sebagai dosen dan Ketua ITB Business School, hingga kemudian diangkat Susilo menjadi Kepala BRR Aceh-Nias.

Satu yang tak berubah dari Kuntoro Mangkusubroto, ia masih saja tetap bertahan sebagai pribadi yang bersih, teguh memegang prinsip, dan berintegritas tinggi sampai-sampai nyaris dituduh melakukan *contempt of parliament*. ■ HT

Kekerasan dan pertumpahan darah di Aceh diharapkan segera berakhir. Nota Kesepahaman hasil perundingan informal RI-GAM di Helsinki segera ditandatangani.

Angin segar ke arah terciptanya suasana damai di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mulai berhembus. Setelah melalui dialog yang cukup alot, perundingan RI-GAM putaran kelima di Helsinki, Finlandia membuahkan hasil. Perundingan yang diprakarsai mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari selaku ketua CMI (*Crisis Management Initiative*) ini menyepakati untuk menghentikan konflik di NAD.

Kesepakatan ini dituangkan dalam draft Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang telah diparaf kedua pemimpin delegasi. "Memorandum itu memuat kesepakatan dan prinsip-prinsip yang akan menuntun proses transformasi di Aceh", demikian isi pernyataan bersama delegasi RI dan GAM sebagaimana diberitakan sejumlah media cetak dan elektronika (18/7).

Beberapa media seperti *Kompas*, *Media Indonesia*, dan *Koran Tempo* mengangkatnya menjadi berita utama edisi hari itu. MoU itu menurut rencana akan diteken secara resmi pada 15 Agustus 2005 di Finlandia.

Dalam perundingan putaran kelima ini delegasi Indonesia dipimpin Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dengan anggota Menkoinfo Sofyan Djalil, Deputy Menko Kesra Farid Husein, Deputy Menko Polhukam Usman Basyah dan pejabat Deplu I Gusti Agung Wesaka Pudja. Sedangkan pihak GAM dipimpin Malik Mahmud dengan anggota Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, M. Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman.

Ahtisaari dalam jumpa pers usai perundingan menyebutkan, segala peperangan akan berakhir setelah penandatanganan MoU. Kedua pihak sepakat perubahan yang nonsubstansil akan dimasukkan ke memorandum sebelum ditandatangani, terutama yang menyangkut tuntutan GAM untuk mendirikan partai politik lokal.

Dalam kesepakatan itu pihak GAM setuju mengesampingkan keinginannya untuk merdeka dan menuntut dibentuknya partai lokal. Anggota delegasi GAM, Munawar Riza, menyatakan Indonesia telah menyetujui tentang partai lokal ini.

Hasil kesepakatan damai ini mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Setidaknya kesepakatan ini akan menjadi titik tolak bagi terciptanya suasana damai di negeri *Serambi Mekah* yang sudah lebih dari 30 tahun dilanda konflik berdarah.

Masa konflik yang berkepanjangan tersebut sangat dirasakan akibatnya oleh masyarakat di Aceh. Suasana mencekam senantiasa menyelimuti warga sipil. Mereka selalu was-was akan terjadi kontak senjata yang setiap saat bisa merenggut nyawa serta berbagai bentuk ancaman lainnya. Dalam masa konflik itu

lebih dari 120 ribu jiwa menjadi korban. Meninggalkan ribuan janda dan puluhan ribu anak yatim

Berdasarkan catatan *Berita Indonesia*, upaya mewujudkan perdamaian di Tanah Rencong sebenarnya sudah dilakukan sejak era Presiden B.J. Habibie yang kemudian diteruskan di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sekarang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati demikian hasilnya belum dinikmati secara nyata oleh warga masyarakat di Aceh.

Tokoh masyarakat asal Aceh, Usman Hassan maupun Ketua DPRD NAD Sayed Fuad Zakaria, seperti dikutip *Suara Karya* (19/7), menyatakan masyarakat Aceh kini mendambakan hidup dalam kondisi damai secara permanen, bukan hanya teori.

Kesepakatan menghentikan kekerasan ini membuka pintu ke arah per-



Titian Menuju Da

damaian yang memungkinkan masyarakat bisa kembali hidup secara normal.

Terlebih lagi negeri itu sempat dilanda musibah gempa bumi dan tsunami yang menewaskan ratusan ribu penduduk dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Bencana itu juga menambah kesengsaraan rakyat karena menghancurkan ribuan rumah, kantor-kantor, sekolah dan berbagai fasilitas umum lainnya.

Sidang kabinet

Hasil perundingan Helsinki secara khusus dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin langsung Presiden SBY didampingi Wapres Jusuf Kalla.

Menko Polhukam Widodo AS menjelaskan, salah satu substansi kesepakatan menyangkut *security arrangement*. Yakni menyangkut penarikan pasukan nonorganik TNI yang dilakukan secara paralel dengan penyerahan dan

penghancuran senjata GAM.

“Dilakukan mulai pertengahan September dan diharapkan selesai pada 31 Desember 2005,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden SBY menyatakan, jika konflik dinyatakan selesai, secara bertahap dalam kurun waktu tiga bulan, GAM akan meletakkan senjata dan senjata-senjata itu akan dimusnahkan. Dengan demikian akan terjadi proses demobilisasi, pembubaran GAM.

“Setelah itu berlangsung, tentu pihak Indonesia tidak harus memelihara jumlah pasukan yang begitu besar (di NAD), baik TNI maupun Polri,” ujar SBY.

Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto sebagaimana diberitakan *Republika* (19/7) ingin melihat sejauhmana komitmen GAM menyerahkan seluruh senjatanya.

“Kalau serius kita syukuri. Tapi kalau nanti di lapangan berbeda dengan kesepakatan, kita kirim lagi pasukan. *Gampang* saja.” Penarikan pasukan TNI dari Aceh dilakukan setelah seluruh senjata GAM diserahkan.

Jurubicara militer GAM, Sofyan Dawood, menyatakan siap memusnahkan senjata. “Untuk melaksanakan kesepakatan itu sangat dibutuhkan sikap saling percaya. Sebagai tentara kami tunduk kepada pemimpin sipil kami yang berunding di Helsinki,” tegasnya.

Untuk mengawasi kesepakatan damai ini akan dibentuk *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Tim monitoring ini akan terdiri atas lima negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Brunei Darussalam) serta Uni Eropa. Tim akan mulai bekerja setelah kesepakatan damai ditandatangani.

Substansi kesepakatan lainnya adalah pemberian amnesti, mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka UU, penggunaan hak-hak sipil dan politik mantan GAM termasuk masalah partai politik.

Seluruh draf MoU kesepakatan damai ini akan dijelaskan kepada DPR dalam rapat konsultasi. “Segala yang memerlukan persetujuan DPR, pemerintah akan konsultasikan sebelum ditandatangani secara resmi. Konsultasi akan dilakukan sebelum 15 Agustus, tetapi secara informal dengan DPR sudah dilakukan,” ujar

Menkominfo Sofyan Djalil.

Pemerintah juga akan menyampaikan isi kesepakatan damai itu secara umum kepada DPR termasuk amandemen UU Otonomi Khusus NAD. Amandemen ini diperlukan untuk memungkinkan adanya partai lokal di Aceh.

Panglima TNI menilai wajar soal pelibatan unsur-unsur asing dalam proses perundingan hingga implementasinya di lapangan. “Penandatanganan itu difasilitasi pihak luar, maka logis bila pihak luar bisa memonitor” ujarnya.

Menlu Hassan Wirayudha, Senin (19/7) lalu menyatakan telah menyurati beberapa menlu ASEAN dan penanggungjawab urusan luar negeri Uni Eropa, Javier Solana, berkaitan dengan pembentukan AMM. Dalam pertemuan para menlu ASEAN dan Uni Eropa AMM akan dirancang tugas, mandat dan metode kerja AMM.

Kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan informal ini berbeda dengan *the Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA, perjanjian penghentian permusuhan). CoHA hanya bersifat gencatan senjata sementara (*cease fire*), sedangkan hasil kesepakatan Helsinki bersifat permanen.

Mensesneg Yusril Ihza Mahendra kepada pers (19/7) menjelaskan pemerintah tengah mempertimbangkan pemberian izin pendirian parpol. Namun tidak diwadahi dalam UU No.31/2002 tentang Parpol. Salah satu jalan tengah – walaupun segalanya tergantung pada DPR- Parpol lokal itu akan diatur dalam UU tentang Otonomi Khusus NAD.

Kalangan DPR sebagaimana diberitakan *Sinar Harapan* (19/7) akan meminta pemerintah menyerahkan semua hasil perundingan dengan GAM. Ini untuk mempelajari dan memahami beberapa tuntutan GAM yang kontroversial seperti pembentukan parpol lokal. “DPR meminta hasil perundingan informal mulai dari tahap pertama sampai tahap kelima”, ujar Ketua DPR Agung Laksono.

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif menyatakan, Dewan akan memanggil pemerintah. Karena bagaimana pun kesepakatan damai RI-GAM harus mendapat persetujuan dari DPR. Selamat datang damai di Aceh. ■ SP



mai di 'Serambi Mekkah'

Medan

Tukar-Guling Bandara Polonia

Pembangunan Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diperkirakan menelan biaya Rp 6,7 triliun, akan terwujud. Syaratnya, Bandara Polonia Medan harus lebih dulu dijual kepada pihak ketiga. Untuk itu, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumut akan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera menerbitkan payung hukum berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penjualan Bandara Polonia.

Usulan itu terungkap usai tiga anggota DPD asal Sumatera Utara, Nurdin Tampubolon, Raja Inal Siregar, dan Yopie S. Batubara mengadakan pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Sumatera Utara, di Medan.

Harian *Waspada* (14/7) memberitakan, sebelum ini empat anggota DPD Sumatera Utara, termasuk Abdulhalim Harahap, sudah pernah mengajukan permohonan penjualan Bandara Polonia langsung kepada Menteri Perhubungan

Hatta Radjasa, di Jakarta.

"Ketika pertemuan, Pak Hatta setuju, namun untuk menguatkan penjualan bandara itu butuh semacam Inpres, agar semua pihak dapat menerima penjualan lahan itu", ujar Yopie Batubara, yang menjabat pula Ketua Forum DPD Wilayah Sumatera.

Menhub saat itu berjanji akan menyampaikan aspirasi DPD kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Usulan penerbitan Inpres Penjualan Bandara Polonia seluas 442 hektar, milik Angkasa Pura dan TNI-AU, sangat didukung Raja Inal Siregar dan Nurdin Tampubolon.

"Kalau dihitung-hitung, lahan seluas 442 hektar ini dihargai lebih dari Rp 7 triliun. Sementara biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan Bandara Kuala Namu sekitar Rp 6,7 triliun," kata Nurdin,



pengusaha sukses kelahiran Desa Siabalabal, Pematang Siantar yang terjun ke dunia politik untuk semakin memberikan lebih banyak karya nyata kepada masyarakat luas. ■ SP

Solo

Guru Bantu Berjuang PNS

Sejumlah perwakilan guru bantu Solo, yang tergabung dalam Persatuan Guru Bantu Indonesia (PGBI), berhasrat kuat menemui langsung Ketua DPR RI Agung Laksono, dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka merumuskan permintaan supaya semua guru bantu di seluruh Indonesia diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan harus tanpa tes pula.

Ayub Joko Pramono, Wakil Ketua PGBI Solo, kepada koran *Tempo* (18/7) mengatakan, pemerintah telah berkomitmen untuk memprioritaskan pengangkatan pegawai negeri dari

guru bantu. Karena itu pihaknya akan menagihnya langsung kepada Presiden. Ia mengingatkan pula pernyataan Pemerintah, yang sudah berjanji akan mengangkat guru bantu untuk menjadi pegawai negeri sipil pada tahun ajaran 2005/2006.

Ayub dan rombongan perwakilan PGBI Jawa Tengah merasa perlu menemui Agung Laksono, untuk mendesak DPR agar mau memfasilitasi perjuangan aspirasi mereka kepada pemerintah. Mereka juga akan menyampaikan hasil dan rekomendasi pertemuan nasional para guru bantu, yang sudah berlangsung di Solo, 10 Juli lalu.

Salah satu poin penting pertemuan

PGBI Solo, para guru bantu meminta supaya diangkat menjadi pegawai negeri tanpa melalui tes. Sebab, saat diseleksi menjadi guru bantu mereka telah dites lebih dulu oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga telah memiliki jam terbang mengajar yang cukup sehingga tidak perlu diragukan lagi kompetensinya. Hal inilah yang juga akan disampaikan kepada Ketua DPR dan Presiden.

Ayub menyebutkan di Solo saat ini terdapat 1.600 orang guru bantu yang sudah layak diangkat menjadi PNS. Mereka semua telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional untuk mengajar. "Tapi, perjuangan menghadap DPR dan Presiden ini juga untuk memperjuangkan nasib guru bantu secara nasional, dan bukan hanya Solo atau Jawa Tengah," kata Ayub. ■ SP

Surabaya

Gelora Pantjasila Terancam Lepas

Gelanggang Olahraga (Gelora) Pantjasila, yang merupakan kebanggaan sekaligus ikon warga “Kota Buaya” Surabaya, terancam lepas ke tangan swasta. Rencana penjualan Gelora Pantjasila bersumber dari Pj. Walikota Surabaya, Drs Chusnul Arifien Damuri, yang memohon persetujuan DPRD Kota Surabaya untuk melepas aset Gelora Pantjasila (GP). Untung saja para wakil rakyat masih bertekad mempertahankan aset bernilai sejarah itu. Dewan, bahkan berencana membentuk Pansus untuk memanggil semua pihak yang terkait, supaya mengetahui duduk perkara sesungguhnya lepasnya Gelora Pantjasila secara yuridis ke pihak swasta, PT Setia Kawan Abadi.

Sebagaimana diberitakan harian *Surya* (16-18/7), Chusnul Arifien meminta DPRD agar menyetujui pelepasan tanah seluas 7.196 m² di kompleks GP, yang keseluruhannya mencapai 25.780 m².

Pelepasan aset seluas itu, tempat dimana di atasnya berdiri bangunan GP, sebut Chusnul merupakan konsekuensi



dari keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 24 November 2004, yang membatalkan Hak Pakai No. 39/Kelurahan Darmo (kompleks GP) atas nama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. BPN Surabaya dalam suratnya 7 April 2005 juga *segendang-sepenarian*, mencabut hak Pemkot Surabaya atas aset warisan kolonial Belanda itu.

“Selanjutnya, persetujuan tersebut (dari DPRD) kami gunakan sebagai dasar untuk mengubah luasan tanah yang tercantum dalam Daftar Inventaris Aset Pemerintah Kota Surabaya”, tulis Damuri, dalam suratnya kepada Ketua

DPRD tertanggal 30 Juni 2005.

Sejumlah anggota DPRD menentang habis-habisan rencana pelepasan GP oleh Chusnul. Salah satu alasannya, pejabat walikota tidak boleh melakukan kebijakan strategis dan pelepasan aset (GP) yang berpotensi merugikan Pemkot Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Baktiono, menyatakan, GP yang pembangunannya diarsiteki Presiden RI pertama, Ir. Soekarno, sudah merupakan kebanggaan warga Surabaya. Sebab itu pelepasan GP kepada pihak swasta harus dipikirkan masak-masak. ■ SP

Karimunjaya

Fasilitas Kapal Wisata

Kawasan wisata Kepulauan Karimunjawa di pantai utara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) akan dilengkapi fasilitas kapal wisata antarpulau. Komisi D DPRD Jateng sudah sepakat menyediakan anggaran pengadaan kapal tersebut pada pembahasan perubahan APBD 2005.

Suara Merdeka (14/7) menuliskan, rencana pengadaan kapal wisata tersebut sebelumnya diajukan oleh Pemerintah Provinsi Jateng, melalui Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi (Dishubtel) Jateng.

Kepala Dishubtel Abdul Rohim, usai rapat dengan Komisi D menyatakan, jumlah kapal wisata diharapkan lebih dari satu. Namun dia belum bisa menyebutkan berapa besar anggaran yang dibutuhkan, karena tergantung jumlah kapal yang disetujui eksekutif dan legislatif. “Harapan kami jumlahnya lebih dari satu agar mampu melayani para wisatawan”, jelas Rohim.

Nantinya, kapal wisata itu akan melayani rute antarpulau di Kepulauan Karimunjawa. Saat ini yang sudah beroperasi adalah kapal/perahu motor wisata milik masyarakat setempat. Sementara Pemprov belum memiliki fa-

silitas tersebut.

Data Pemprov Jateng menyebutkan, luas Kepulauan Karimunjawa 111.625 hektar. Terdiri atas 7.033 hektar daratan dan 104.592 hektar perairan. Gugusan kepulauan ini meliputi 27 pulau besar dan kecil. Lima diantaranya adalah Karimunjawa (4.302,5 ha), Kemujan (1.501 ha), Parang (690 ha), Genteng (135 ha) dan Nyamuk (125 ha). Jumlah penduduk sekitar 8.070 jiwa sebagian besar bermata pencaharian nelayan.

Sejak tahun 1988 kawasan ini dinyatakan sebagai Taman Nasional Laut Karimunjawa. Di taman ini dilindungi terumbu karang, ikan hias, burung Garuda, hutan bakau, kayu Dewandaru/Setigi/Kalimasada. ■ SP

Kekerasan Atas Nama Agama

Penyerangan dan pengusiran Jemaah Ahmadiyah telah menihilkan toleransi, perdamaian, dan penghargaan atas hak asasi manusia. Bukankah perbedaan pendapat dalam Islam adalah rahmat?

Parung, Bogor, 15 Juli 2005. Ribuan massa beratribut Islam dengan beringas merangsek ke Kampus Mubarak, pusat kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan merusak sejumlah fasilitas di sana. Sekitar 800-an pengikut JAI dari seluruh penjuru tanah air yang seyogianya tengah mengikuti pertemuan tahunan diusir keluar lokasi tersebut bagaikan pesakitan. Kampus Mubarak pun disegel sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Serbulan dan aksi kekerasan itu dilatarbelakangi persepsi bahwa JAI menyimpang dari ajaran Islam. Se-



Mirza Sahib along with Mirza Niaz Baig, Mirza Yaqoob Baig and Mirza Ayub Baig Sahibs

akan menjadi justifikasi atas aksi tersebut, sehari sebelumnya, MUI Kabupaten Bogor mengeluarkan fatwa bahwa JAI sesat dan menyesatkan. MUI Pusat pada 1980 juga pernah mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah tidak masuk kategori Islam.

Persoalannya, haruskah perbedaan diselesaikan dengan kekerasan? Amir Nasional JAI, Maulana H. Abdul Basith Sy, sangat menyesalkan perusakan dan aksi massa di Kampus Mubarak.

Pihaknya jelas menolak segala bentuk kekerasan atau tindakan anarkis sesama umat Islam. Apalagi, Ahmadiyah seperti juga kelompok Islam lainnya memiliki ke-

yakinan serupa: sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, menjalani rukun Islam dan rukun Iman.

Dalam pandangan Basith, baik Ahmadiyah maupun kelompok Islam lainnya di Indonesia, tidak memiliki perbedaan mendasar. Hanya, dia mengakui, perbedaan itu adalah mengenai persepsi atau pemahaman mengenai Alquran, sunah, dan hadis. Kendati demikian, Abdul Basith siap berdialog dan bersilaturahmi dengan sesama umat Islam untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Mengenai sumber ajaran Ahmadiyah yang didesas-desuskan berasal dari kitab Tazkirah, Mubaligh JAI Cabang Yogyakarta Ahmad Ma'sum Kanz membantah itu. Kitab tersebut hanya kumpulan wahyu dan ilham yang diterima Mirza Ghulam Ahmad yang oleh para sahabat-

Profil Jemaah Ahmadiyah

Paparan apa dan bagaimana profil Jemaah Ahmadiyah di bawah ini, dikutip dan diolah Berita Indonesia dari situs resmi Ahmadiyah Indonesia, ahmadiyah.or.id, dan situs resmi Ahmadiyah International, alislam.org.

Jemaah Ahmadiyah adalah suatu organisasi keagamaan dengan ruang lingkup internasional yang memiliki cabang di 174 negara tersebar di Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Eropa. Saat ini jumlah anggota di seluruh dunia lebih dari 150 juta orang.

Jemaat Ahmadiyah didirikan pada 1889 oleh Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) di Qadian, desa kecil di daerah Punjab, India. Kota yang berjarak 40 mil sebelah timur Amritsar, di mana terletak kuil emas kaum Sikh yang pada pertengahan 1984 menjadi pusat per-

hatian dunia, itu adalah tanah kelahiran Mirza Ahmad.

Dia mendakwakan diri sebagai pembaharu (*mujadid*) yang diharapkan datang di akhir zaman dan beliau adalah Seseorang Yang Ditunggu kedatangannya oleh semua masyarakat beragama (Mahdi dan Al-Masih).

Pada Konferensi Tahunan "American Academy of Religions" yang diselenggarakan di Canton Upper State New York, dan pada seminar di Universitas Pennsylvania, Philadelphia, Mei 1985 (?), Profesor Louis J. Hammann, Ph.D., ahli ilmu perbandingan agama, pengajar ilmu agama di Gettysburg College, anggota perkumpulan Kristen (anti peperangan dan persumpahan) kolega dari Friend's Meeting di Gettysburg College, dan anggota United Church of Christ (Persekutuan Gereja Kristus), mempresentasikan hasil penelitiannya tentang Gerakan Ahmadiyah.

Pada salah satu bagian ceramahnya, Hammann mengutip sejumlah pernyataan Mirza Ahmad tentang status dirinya



Amir Nasional JAI

setelah mendapatkan wahyu dari Tuhan.

"...Adalah jelas bagiku berdasarkan wahyu Tuhan bahwa Al-Masih yang kedatangannya telah dijanjikan di antara orang Islam sejak awal, dan Mahdi yang kedatangannya telah ditetapkan Tuhan di saat merosotnya Islam dan tersebarnya kekeliruan, dan akan dibimbing secara langsung oleh Tuhan, dan mengajak orang turut ambil bagian dalam perjamuan surgawi, dan kedatangannya telah dikabarkan oleh Nabi Suci SAW seribu tiga ratus tahun yang lalu, adalah aku sendiri."

Selanjutnya, "...Agar mendapatkan



nya dibukukan jauh setelah dia meninggal pada 1908. Sumber ajaran Ahmadiyah tetap pada Qur'an, Sunnah, dan Hadits.

Kontroversi Tazkirah yang ditulis dalam dua bahasa: Urdu dan Arab, pernah dibahas Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Departemen Agama pada 2002. Poin tertentu dari hasil telaah tersebut juga didiskusikan dan diklarifikasi JAI. Namun, hasil dan klarifikasi telaah itu tidak dipublikasikan, dan telaah itu sendiri juga tidak ber-kelanjutan.

Kata Ma'sum, yang menjadi pembeda antara ajaran JAI dengan yang lain adalah apa yang mereka yakini tentang wafatnya Nabi Isa Almasih, dan wahyu Allah SWT yang belum putus sampai saat ini.

Dari perspektif Islam yang diyakininya, wahyu dari Allah SWT belum putus dan masih akan diturunkan kepada siapapun yang dikehendakiNya. Wahyu

ridha Allah, aku dengan ini memberitahu kamu semua pentingnya kenyataan bahwa Tuhan Yang Maha Perkasa, di awal abad ke-14 ini, memilih aku yang berasal dari-Nya bagi kebangkitan dan pendukung kebenaran ajaran Islam."

Akhirnya, "...Tidak ada keraguan padaku untuk mengakui bahwa akulah Imam zaman ini," ungkap Hammann, mengutip maklumat Mirza Ahmad.

Anjurkan toleransi dan perdamaian

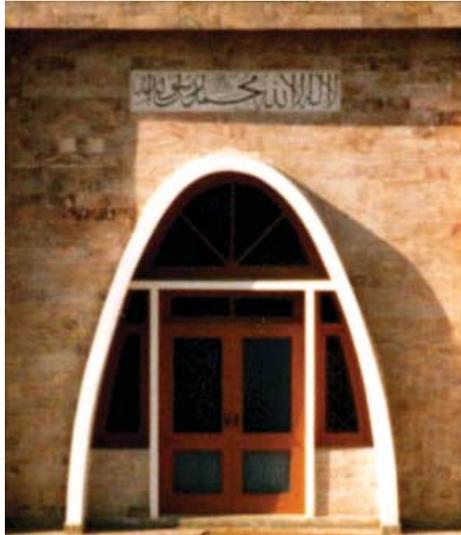
Seperinggal Mirza Ahmad pada 26 Mei 1908, Ahmadiyah dipimpin para Khalifah. Saat ini tampuk pimpinan Ahmadiyah dipegang Hz. Mirza Masroor Ahmad, yang terpilih sebagai Khalifatul Masih (Pemimpin Yang Dijanjikan) V pada 2003.

Belakangan, Ahmadiyah terpecah dua aliran: Ahmadiyah Qodiani dan Ahmadiyah Lahore. Ahmadiyah Qodiani mengakui Mirza Ahmad sebagai nabi terakhir, setelah Nabi Muhammad SAW.

Sedangkan Ahmadiyah Lahore menganggapnya hanyalah seorang pembaharu.

itu bisa turun pada orang biasa, seperti Maryam, Aisyah, atau Mirza Gulam Ahmad.

Menyangkut fatwa MUI, dalam wawancara dengan *Koran Tempo* (31/7), menegaskan pendiriannya: "Kalau Ahmadiyah menyatakan dirinya Islam, tidak ada yang bisa menyatakan Ahmadiyah bukan Islam."



Koordinator Mubaligh Ahmadiyah DKI Jakarta, Zafrullah A. Pontoh, menentang fatwa itu. Fatwa dalam bahasa Arab berarti nasihat atau pendapat. Atas dasar itu, baginya, fatwa itu boleh diterima dan boleh ditolak.

Mereka tetap meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir.

Di manapun berada, demikian situs Ahmadiyah menulis, Jemaah Ahmadiyah berusaha memberikan peranan dalam pembangunan Islam lewat proyek-proyek sosial, lembaga-lembaga pendidikan, pelayanan kesehatan, penerbitan literatur-literatur Islam dan pembangunan mesjid-mesjid.

Gerakan Jemaah Ahmadiyah dalam Islam mendorong dialog antaragama dan senantiasa membela Islam, serta berusaha untuk memperbaiki kesalah-pahaman mengenai Islam di dunia Barat. Gerakan ini juga menganjurkan perdamaian, toleransi, kasih dan saling pengertian di antara para pengikut agama yang berbeda.

Ditegaskan pula, gerakan ini sebenarnya percaya dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran: "Tidak ada paksaan dalam agama" (2:257) serta menolak kekerasan dan teror dalam bentuk apapun untuk alasan apapun.

Beberapa pengikut Jemaah Ahma-

Kecaman

Banyak pihak yang menyesalkan dan mencela tindak kekerasan terhadap JAI, terlepas benar atau salah ajaran yang dianut kelompok Ahmadiyah. Terlebih, segala permasalahan dapat diselesaikan dengan dialog.

DR. Komarudin Hidayat, misalnya. Pakar ilmu perbandingan agama ini



mengingatkan, jika ada sikap tidak senang pada satu keyakinan seharusnya sikap itu ditampilkan dengan argumentasi.

"Bukan sebuah pemikiran dilawan dengan batu," tandas Komarudin.

Direktur Program Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah ini menyayangkan langkah pemerintah dan MUI yang tidak memfasilitasi pertemuan antara pihak yang pro dan kontra. "Justru atas nama agama dan kebenaran tapi merusak hak asasi orang lain. Itu saya tidak setuju!"

diyah (disebut Ahmadi) telah dikenal karena prestasi dan jasa-jasanya oleh masyarakat dunia, seperti almarhum Sir Muhammad Zafrullah Khan (Menteri Luar Negeri pertama Pakistan; Presiden Majelis Umum U.N.O yang ke 17; Presiden dan Hakim di Mahkamah Internasional di Hague) dan Dr. Abdus Salam (peraih hadiah Nobel Fisika tahun 1979).

Ahmadiyah Qadiani pertama kali dibawa ke Indonesia pada 1925 oleh Rahmat Ali di Tapaktuan, Nangroe Aceh Darussalam, dilanjutkan di Padang sampai 1930, dan ke Jakarta.

Ahmadiyah Lahore pertama kali diperkenalkan di Yogyakarta pada 1924 oleh Mirza Wali Ahmad Baig dan Maulana Ahmad. Maulana kembali ke Lahore. Mirza Wali menetap di Jawa hingga 1936.

Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) didaftarkan menjadi organisasi berbadan hukum sejak 1953 dengan nama Anjuman Ahmadiyah Qodiyah Departemen Indonesia. Kini, sekitar 500-an ribu anggotanya tersebar di tersebar di 309 cabang seluruh Indonesia. ■ **RF**



ujar Komarudin.

Pada 17 Juli 2005, dua ribu kaum muslim menggelar doa dan zikir bersama di Masjid Baitul Ihsan di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Peserta sebagian besar berasal dari Jamiyah Thariqah Al-Mutabarrah dan Yayasan Haqqani Indonesia.

Doa dan zikir bersama yang dihadiri Ketua Majelis Tinggi Islam Amerika (ISCA) Syekh Muhammad Hisham Kabani itu dimaksudkan meningkatkan silaturahmi antarpenganut agama Islam, sekaligus agar umat Islam dalam menyelesaikan masalah, termasuk bila ada ajaran yang dianggap berbeda, bisa dilakukan secara bersama-sama.

Sejumlah organisasi Islam dan tokoh antaragama yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kebebasan Beragama turut memberikan sikap. Aliansi itu meliputi International Conference on Religion and Peace (ICRP), Wahid Institute, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), KontraS, Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Jaringan Islam Liberal (JIL), dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM).

Dalam pernyataan bersama di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta (17/7), Aliansi menilai, aksi massa terhadap JAI merupakan bentuk pengingkaran terhadap kebebasan beragama. Para pelakunya harus diproses secara hukum.

Menurut Sukidi, Pendeta Weinata Sairin, dan Romo Benny, ketiganya

anggota Aliansi, tindakan pengusiran dan penyerangan itu adalah bentuk kegagalan dari pemerintah dalam melindungi kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya, sekaligus kriminalisasi terhadap kebebasan beragama dan hak sipil masyarakat.

"Aparat malahan memberi perlindungan terhadap pelaku pengrusakan yang jelas-jelas telah melanggar aturan. Hal ini menunjukkan bentuk negara yang tidak beradab karena memberi ruang yang terbuka bagi kelompok yang tidak beradab melakukan pelanggaran hukum," kata Sukidi.

"Itu ciri-ciri hancurnya keadaban publik dan dampak akhir dari pembiaran kekerasan yang dilakukan sekelompok orang oleh negara. Perbedaan bukanlah sesuatu hal yang harus dihancurkan," sambung Romo Benny.

Pembiaran atas aksi pengrusakan itu, tambah Weinata Sairin, akan menjadi preseden buruk dari negara yang seharusnya menjamin kehidupan berbangsa termasuk kebebasan beragama.

"Ini bukan soal agama, tetapi bagaimana membangun fungsi bangsa dan negara. Peran pemerintah yang kerap gagal dalam menampilkan sikap kenejarawan seperti dalam kasus tersebut, juga harus diakhiri," kata Weinata Sairin.

Dawam Rahardjo, juga dari Aliansi, mengkritik pemerintah karena terkesan mendukung aksi kekerasan yang bisa disamakan dengan tindakan terorisme itu. "Perbedaan seharusnya jangan ditentang melainkan menjadi pendukung berkembangnya peradaban," ujar Da-

wam, seraya mengkhawatirkan tindakan serupa akan merembet ke kelompok lain yang memiliki pemikiran yang berbeda seperti halnya JAI.

Dawam juga mengkritisi sikap MUI karena organisasi muslim seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah belum mengeluarkan komentar resmi tentang JAI. "Padahal mereka (NU dan Muhammadiyah) juga orang muslim," tukas menesalkan.

Bagi Siti Musdah Mulia, anggota Aliansi lainnya, peristiwa itu adalah simbol kegagalan umat Islam menunjukkan bahwa Islam agama yang santun dan menjunjung tinggi pluralisme.

Kepada *Berita Indonesia*, pimpinan Ma'had Al-Zaytun, Syaykh DR. AS Panji Gumilang menilai, kejadian di parung sangat berbahaya bagi integritas Indonesia dan umat manusia. Manusia sejagat sedih menyaksikan kejadian di Parung.

Dia mengingatkan, Tuhan telah memberikan kebebasan kepada umat manusia. Jadi, sungguh aneh apabila manusia yang satu justru membatasi kebebasan manusia lain.

"Tuhan itu begitu liberalnya. Makhluknya mau ingkar diperbolehkan, mau taat kepada-Nya pun dipersilahkan. Ini *kok* sekarang umat manusia yang sebenarnya sangat terbatas kemampuannya malah membatasi kemampuan orang dalam memaknai kehidupan. Al-Quran yang diturunkan Allah SWT dan dimuliakan umat Islam terkadang bisa menjadi wacana. Apalagi untuk sebuah ekspresi keberagaman manusia yang masih harus makan dan minum itu, seperti Ahmadiyah," kata Syaykh lugas.

Kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak boleh eksklusif. Harus inklusif. Makna individu tidak akan tergeser atau tergeser oleh inklusivitas. Makna kelompok tidak akan hilang oleh sikap hidup yang inklusif.

"Tuhan sangat memuliakan Bani Adam dan mengangkat derajatnya di muka bumi dan langit. Itu konsep hak asasi menurut Tuhan. Menghormati hak asasi adalah pesan Ilahi. Tuhan menginginkan sikap hamba-Nya untuk saling toleran apapun agamanya. Dari toleransi tumbuhlah perdamaian. Damai itu dari Tuhan. Siapa pun yang antipadai berarti tidak mengikuti sikap Tuhan. Dan itu bukan sikap Tuhan."

Kalau begitu, mungkin belum terlambat bagi bangsa yang besar dan heterogen ini untuk bisa bersikap inklusif, saling menghargai, toleran, dan menerima perbedaan sebagai sebuah rahmat. Semoga. ■ **AF, SH, SB**

“Ada Tommy Di Tenabang”

• Judul di atas tertera di sampul majalah *Tempo* (edisi 18-24 Juli 2005).

Tommy yang dimaksudkan *Tempo* kali ini bukan pengusaha Tomy Winata yang sempat bersengketa secara hukum dengan majalah tersebut, melainkan Hutomo Mandala Putra, putra mantan Presiden Suharto, alias Tommy Soeharto. Tommy berencana mengikuti tender pembangunan kembali pasar Tanah Abang. Berita menarik lainnya yang diangkat adalah Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2005 yang menyerukan gerakan hemat energi.

• “**Menguak Misteri Kelangkaan BBM**” menjadi judul andalan *Tempo* (edisi 11-17 Juli 2005). Majalah ini juga menyajikan berita tentang ledakan bom yang mengguncang tiga stasiun kereta api bawah tanah di jantung kota London, Inggris, dan menewaskan 50 orang dan melukai 700 orang lainnya.

• “**Bola Panas Mahkamah Agung**” adalah judul sampul *Forum Keadilan* (Edisi 12-17 Juli 2005). Majalah ini menyoroti keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SK Mendagri (saat itu dijabat Hari Sabarno) tentang pembatalan Alzier Dianis Tabrani sebagai Gubernur Lampung. Kasus ini menjadi menarik karena baru pertama kali terjadi di Indonesia.

Pada edisi 31 Juli 2005, *Forum* menulis laporan utama soal aksi penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah dan kampus Mubarak di Parung, Bogor, oleh sekelompok massa yang mengaku dari LPPI, FPI dan GPU.

• “**Rupiah Semakin Terbakar**” menjadi judul pilihan majalah ekonomi dan bisnis *Trust* (Edisi 41/11-17 Juli 2005). *Trust* melukiskan keresahan sejumlah pengusaha akibat melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap

dolar AS. Kurs rupiah memang sempat menyentuh level Rp 10.000 per dolar akibat melonjaknya harga minyak di pasar dunia sampai US\$ 61 per barel, bahkan diprediksi bakal merangkak ke level US\$ 70 per barel sepanjang tahun ini.

Dalam edisi 25-31 Juli 2005 *Trust* menyoroti rencana PT Telkom mengakuisisi PT Bukaka SingTel, mitra KSO-nya di Indonesia Timur. Terlontar sinyalemen itu adalah balas budi bos Telkom, Arwin Rasyid, kepada Wapres Yusuf Kalla, salah seorang pemilik kelompok usaha Bukaka.

• Di bawah judul “**Jawara-jawara Wealth Management**,” majalah *Investor* (edisi 26 Juli-08 Agustus 2005) menuliskan cerita yang beredar di antara para *wealth manager* Indonesia bahwa sekitar 70 persen dana pihak ketiga kategori *private banking* di Singapura adalah milik orang Indo-

nesia.

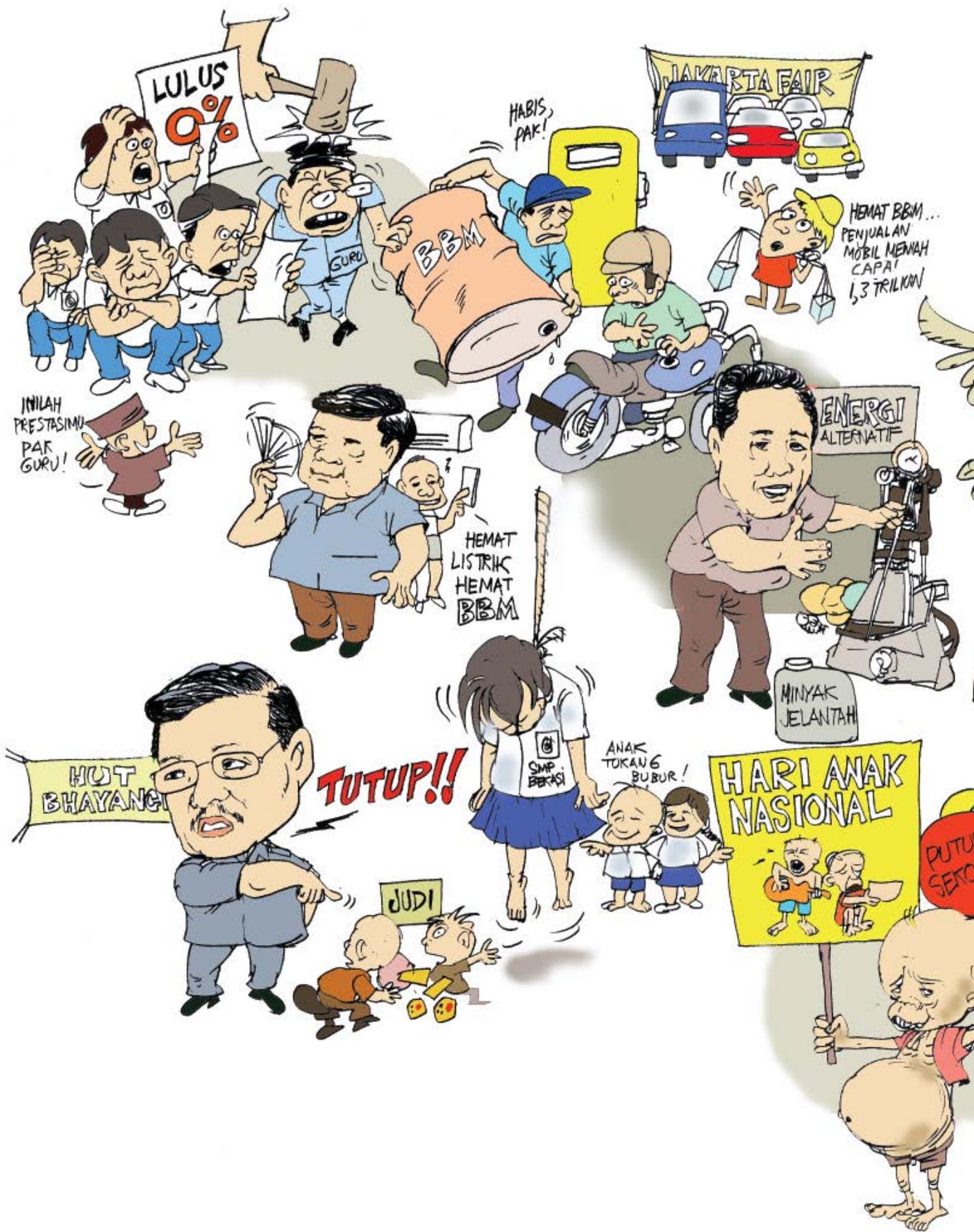
Sedangkan pada edisi 12-17 Juli 2005 diturunkan berita utama tentang standar minimum (modal, SDM, TI, CGC) yang akan diberlakukan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan asuransi di tanah air guna melindungi pemegang polis agar tidak menjadi korban sia-sia ketidakberesan perusahaan asuransi. Pemerintah sedang merumuskan cetak biru (*blue print/road map*) asuransi Indonesia, yang disebut *Arsitektur Perasuransian Indonesia* (API).

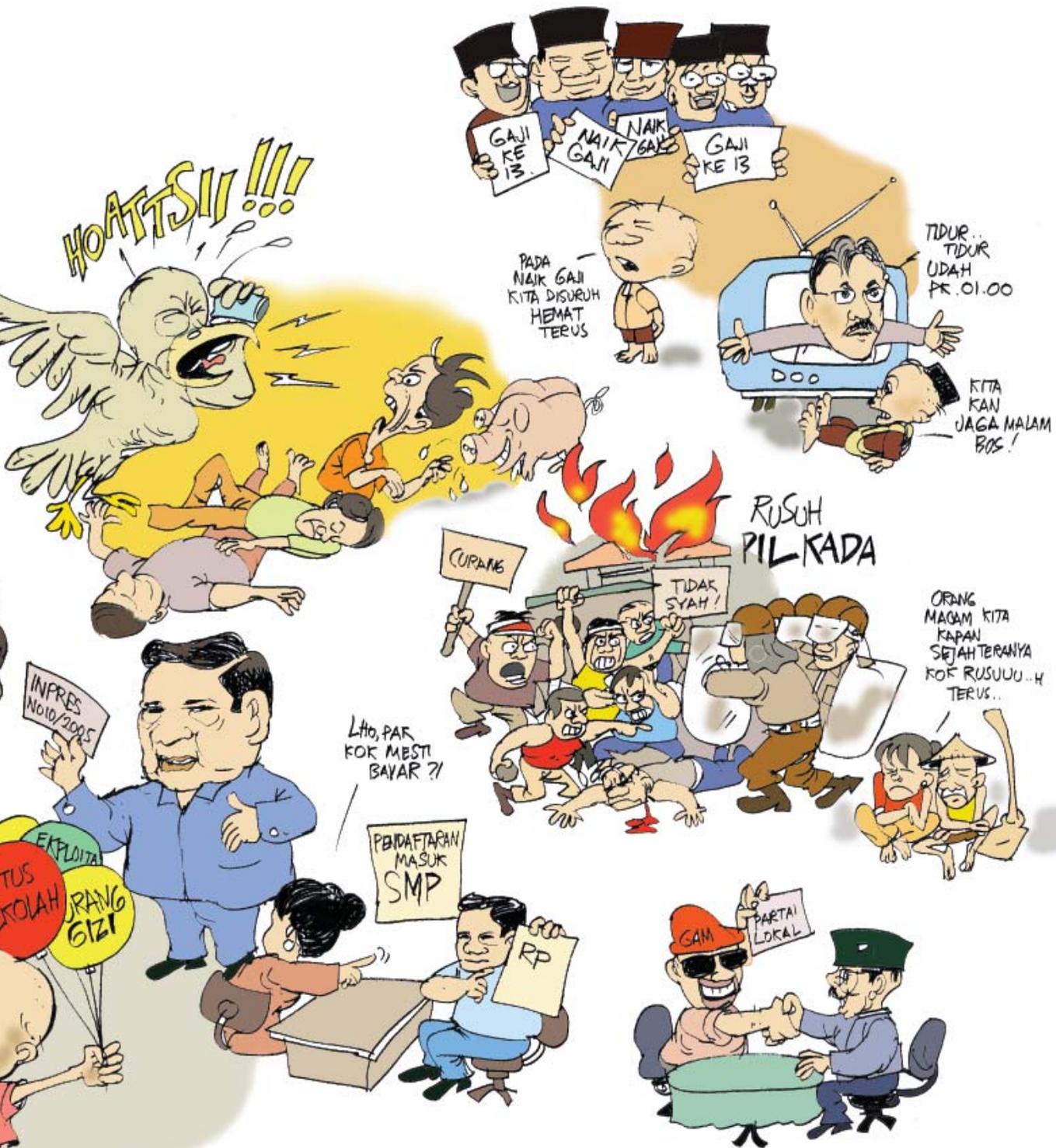
• Dengan berita sampul “**Mereka Dituding Antek Azhari**,” majalah *Gatra* (Edisi 16 Juli 2005) mengangkat berita investigatif tentang kinerja kepolisian dalam melacak keberadaan dua teroris yang jadi buronan, DR Azhari dan Noor Din Mohd. Top, termasuk aksi polisi menangkap sejumlah orang yang dicurigai bersinggungan dengan dua buronan itu.

• Edisi 23 Juli 2005, majalah berita mingguan itu menurunkan laporan utama ‘**Siaga Merah Flu Burung: Jakarta, Banten, dan Jawa Barat Terancam**’, menyusul kasus meninggalnya Iwan Siswara Rapei (38) dan dua putrinya Sabrina Nurul Azizah (8) dan Nurul Azizah (1) yang dinyatakan positif akibat virus flu burung.

• ‘**Mahkamah Agung Obral PK**’. Dengan judul itu, majalah *Konstan* (Edisi Juli 2005) menyoroti secara kritis kinerja MA sebagai benteng terakhir peradilan. Misalnya, kemandulan MA dalam melawan hakim-hakim yang nakal serta terlalu gampangnya lembaga yang dipimpin Prof Bagir Manan ini mengeluarkan Peninjauan Kembali (PK). ■ **AF,SB**







Oleh Syaykh Dr. Abdussalam Panji Gumilang

Pengakuan adanya kekuatan Yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Allah, God, Yahweh, Elohim, yang disertai ketundukan, merupakan fitrah (naluri) yang dimiliki oleh setiap manusia. Kendati demikian, manusia tetap memerlukan adanya pemberi peringatan agar tidak menyeleweng dari fitrahnya. Mereka adalah para nabi dan rasul.

Perasaan tunduk kepada Yang Maha Tinggi, yang disebut iman, atau itikad, yang kemudian berdampak pada adanya rasa suka (*rughbah*), takut (*ruhbah*), hormat (*ta'dzim*) dan lain-lain, itulah unsur dasar *al-din* (agama). *Al-din* (agama) adalah aturan-aturan atau tata-cara hidup manusia yang dipercayainya bersumber dari Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Berbagai agama telah lahir di dunia ini dan membentuk suatu syariat (aturan) yang mengatur kehidupan manusia, yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik agama *samawi* (yang bersumber dari wahyu Ilahi) maupun yang terdapat dalam agama *ardli* (budaya) yang bersumber dari pemikiran manusia. Semua agama-agama, baik *samawi* maupun *ardli*, memiliki fungsi dalam kehidupan manusia. Berbagai fungsi tersebut adalah: (i) menunjukkan manusia kepada kebenaran sejati; (ii) menunjukkan manusia kepada kebahagiaan hakiki; dan (iii) mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bersama.

Dari hakikat dan fungsi agama seperti yang disebutkan itu, maka pemeluk agama-agama yang ada di dunia ini, telah memiliki strategi, metoda dan teknik pelaksanaannya masing-masing, yang sudah barang tentu dan sangat boleh jadi terdapat berbagai perbedaan antara satu dengan lainnya. Karenanya, umat manusia dalam menjalankan agamanya, sang Pencipta agama telah berpesan dengan sangat, "Kiranya umat manusia tidak terjebak dalam perpecahan tatkala menjalankan agama masing-masing, apalagi perpecahan itu justru bermotivasikan keagamaan".

Kembali kepada Fitrah Beragama

Dalam kesempatan ini, kami mengajak pembaca untuk fitrah beragama, yaitu toleransi yang harus ditegakkan sebagai keyakinan pokok (akidah) dalam beragama.

Itu maknanya, pengamalan toleransi harus menjadi suatu kesadaran pribadi dan kelompok yang selalu dihabitualisasikan dalam wujud interaksi sosial. Toleran maknanya, bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan pendirian, pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan lain-lain yang

TOLERANSI Akidah dalam



Beragama

Syaykh Dr. Abdussalam Panji Gumilang

berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Toleransi/toleran dalam pengertian seperti itu terkadang menjadi sesuatu yang sangat berat bagi pribadi-pribadi yang belum menyadarinya. Padahal perkara tersebut bukan mengakibatkan kerugian pribadi, bahkan sebaliknya akan membawa makna besar dalam kehidupan bersama dalam segala bidang, apalagi dalam domain kehidupan beragama. Toleran dalam kehidupan beragama menjadi sangat mutlak adanya, dengan eksistensinya berbagai agama samawi maupun agama *ardli* dalam kehidupan umat manusia ini.

Dalam kaitan ini Tuhan telah mengingatkan kepada umat manusia dengan pesan yang bersifat universal, dalam Q.S. 42 A. 13:

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama, apa yang telah diwahyikan kepada Nuh, dan apa yang telah diwahyikan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah diwahyikan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah dalam urusan agama.”

Pesan lainnya terkandung dalam Q.S. 3 A. 103:

“Dan berpegang teguhlah kamu kepada agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.”

Pesan universal ini merupakan pesan kepada segenap umat manusia tidak terkecuali, yang intinya dalam menjalankan agama harus menjauhi perpecahan antarumat beragama maupun sesama umat beragama.

Tegakkanlah agama dan jangan berpecah belah dalam beragama, merupakan standar normatif Illahiyah, sebagai patokan baku untuk pembimbingan perilaku umat manusia dalam beragama. Standar yang bersifat universalistik ini bermakna ruang lingkungannya berlaku di mana pun dan kapan pun. Yakni umat beragama dalam berinteraksi antaragama wajib mengutamakan standar universal ini.

Perintah ini juga merupakan standar yang bersifat partikularistik, yang ruang lingkungannya berlaku bagi kelompok pemeluk agama tertentu di tempat mereka berada. Dalam menjalankan agama hendaknya menjauhi perpecahan sesama agama, terlebih perpecahan itu dibungkus oleh orientasi motivasional maupun orientasi nilai keagamaan.

Tindakan manusia beragama itu selalu memiliki orientasi, berarti selalu diarahkan kepada tujuan. Ada dua elemen penting dalam orientasi tindakan



Ma'had Al-Zaytun

Sifat dan sikap toleran ini perlu disosialisasikan, agar setiap individu mampu mengamalkan dalam kehidupan nyata di masyarakat luas.

manusia termasuk tindakan manusia dalam beragama yaitu orientasi motivasi dan orientasi nilai. Orientasi motivasi adalah yang berhubungan dengan keinginan individu yang bertindak itu untuk memperbesar kepuasan dan mengurangi kekecewaan, atau dalam makna lain, motivasi untuk memperbesar kepuasan jangka panjang dan jangka pendek.

Sedangkan elemen lainnya adalah orientasi nilai. Orientasi ini menunjuk kepada standar-standar normatif yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang dicapai dan alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu.

Walhasil, kebebasan individu dalam bertindak, dibatasi oleh standar-standar normatif yang ada dalam masyarakat, baik yang bersifat Illahiyah maupun budaya. Segala norma-norma itu bukan berarti mengeliminir kebebasan manusia dalam beragama, justru menawarkan berbagai alternatif dalam bertindak, bermakna juga bahwa manusia itu dalam beragama mempunyai kebebasan penuh yang dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki orang selainnya.

Ini bermakna, dapat kita lihat bahwa individu-individu itu dalam beragama memungkinkan dapat menggunakan agama sebagai kekuatan yang mempersatukan dan sebaliknya juga dapat menggunakannya sebagai pencerai-beraian, yang mengakibatkan timbulnya konflik.

Toleransi sebagai Nilai dan Norma

Toleransi dalam pengertian yang telah disampaikan, yang merupakan keyakinan pokok (akidah) dalam beragama, dapat kita jadikan sebagai nilai dan norma. Kita katakan sebagai nilai karena toleransi merupakan gambaran mengenai apa yang kita inginkan, yang pantas, yang berharga, yang dapat mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu.

Dan nilai (toleransi) akan sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat. Demikian juga toleransi, dapat kita jadikan suatu norma, yaitu suatu patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang, dan memungkinkan partisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial.

Sifat dan sikap toleran ini perlu disosialisasikan, agar setiap individu mampu mengamalkan dalam kehidupan



Ibrahim Fadilo, tokoh ekonomi Islam Eropa saat berkunjung di Ma'had Al-Zaytun.

nyata di masyarakat luas. Dalam lingkungan keluarga, kehidupan yang toleran harus disosialisasikan sejak dini terhadap anggota keluarga (anak-anak). Dan inilah yang menjadi sosialisasi dasar dalam kehidupan umat manusia, yang dari padanya dikembangkan sosialisasi lebih lanjut sebagai *follow-up*.

Hidup beragama yang toleran sekaligus menjadi sikap dasar dalam kehidupan sosial masyarakat, yang selalu disosialisasikan dalam tingkat rumah tangga, merupakan sosialisasi primer, dan sosialisasi sekunder terjadi sesudah sosialisasi primer itu terjadi. Dan sesungguhnya sosialisasi primer itu merupakan dasar bagi sosialisasi sekunder. Jika yang berperan dalam sosialisasi primer adalah seluruh keluarga dalam rumah tangga, maka yang berperan dalam sosialisasi sekunder adalah luar rumah tangga, yang dalam kehidupan sekarang ini adalah arena pembelajaran sekolah.

Maknanya bahwa sosialisasi terhadap kehidupan toleran itu merupakan proses yang tak henti-hentinya, dan terus mencari dan mendapatkan yang lebih baik. Terus berlangsung seumur hidup umat manusia.

Toleran dan Prinsip Hidup

Berinteraksi dengan jiwa toleran dalam setiap bentuk aktivitas, tidak harus membuang prinsip hidup (beragama) yang kita yakini. Kehidupan yang toleran justru akan menguatkan prinsip hidup (keagamaan) yang kita yakini. Segalanya menjadi jelas dan tegas tatkala kita meletakkan sikap mengerti dan memahami



terhadap apapun yang nyata berbeda dengan prinsip yang kita yakini. Kita bebas dengan keyakinan kita, sedangkan pihak yang berbeda (yang memusuhi sekalipun) kita bebaskan terhadap sikap dan keyakinannya.

Dialog disertai deklarasi tegas dan sikap toleran telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam Q.S. 109:

“Wahai orang yang berbeda prinsip (yang menentang). Aku tidak akan mengabdikanmu. Dan kamu juga tidak harus mengabdikanmu kepada apa yang menjadi pengabdianmu. Dan sekali-kali aku tidak akan menjadi pengabdianmu. Juga kamu tidak mungkin mengabdikanmu kepada pengabdianmu. Agamamu untukmu. Dan agamaku untukku.”

Sikap tegas penuh toleran, tanpa meninggalkan prinsip seperti itu dilaksanakan pada saat masyarakat lingkungannya tampil dengan budaya represif, yang sistem sosialnya dalam proses tidak menghendaki perubahan, bertahan dengan struktur yang ada (morfofostatis). Sedangkan Nabi Muhammad saw sedang memulai pembentukan kelompok (*formation group*) menuju perubahan. Ternyata sikap toleran sangat menentukan proses terjadinya bentuk serta perubahan atau perkembangan suatu sistem maupun struktural atau penyederhanaannya (*morfofogenesis*).

Sikap toleran membuahkan kemampuan yang sangat signifikan dalam menetapkan pilihan yang terbaik. Mampu mendengar berbagai ungkapan dan menyaring yang terbaik daripada semua itu.

Sikap toleran juga melahirkan kemampuan mengubah perilaku individu (*self correction*) terhadap pola yang selama itu dilakukan, yang tak berdaya mengubah masyarakat tradisional, tertutup dan represif, sehingga tujuan yang dicita-citakan dapat dicapai. Toleran, tidak menciptakan individu yang *wangkeng*, yang tidak mau mengubah perilakunya, walau tujuannya tidak tercapai. Secara apologi bersikap dan mengatakan bahwa: Tujuan itu tidak tercapai karena belum waktunya, atau nasibnya memang demikian dan tidak mau mengubah diri.

Sikap toleran, mampu menemukan jalan keluar dan *problem solving* yang pantas dan mengangkat martabat dan harga diri dalam berbagai bidang kehidupan.

Dengan sikap toleran, Rasulullah bermigrasi (hijrah) meninggalkan kehidupan dan tatanan sosial tradisional represif yang belum mampu diubahnya menuju kepada tempat dan kelompok masyarakat yang telah dipersiapkannya untuk dapat menerima perubahan dan bahkan menjadikannya sebagai agen perubahan di zamannya serta zaman selanjutnya. Bersama kelompoknya kemudian berinteraksi membaaur ke dalam berbagai kelompok dalam masyarakat yang majemuk baik ras maupun agama. Interaksi yang sedemikian itu mampu menciptakan kehidupan yang saling membutuhkan dan saling memerlukan, dalam bentuknya yang saling bertanggung jawab dalam membela masyarakatnya.

Para Rasul Allah sebagai Rujukan Bertoleransi

Para rasul Allah telah memberi teladan dan menunjukkan serta mengajarkan bersikap toleran. Darinya tumbuh berbagai norma yang mencerminkan sikap toleran. Nabi Muhammad saw mencontohkan, setibanya ke tempat tujuan migrasi (Yatsrib/Madinah), yang ditempuh pertama kali adalah terciptanya *brotherhood* dan penyatuan diri antara kelompok migran dengan berbagai kelompok penghuni asal (pribumi).

Kemudian menciptakan sistem sosial baru, sebagai wahana berbagai kegiatan dari berbagai orang dan kelompok yang saling berhubungan secara konstan. Sistem baru itu dilegalisir dalam bentuk norma timbal-balik untuk menciptakan

keseimbangan yang memadai antara berbagai kelompok yang terlibat dalam hubungan sosial di tempat yang baru (Yatsrib). Norma itu terpatri dalam *Sohifah al Madaniyyah* (lebih kita kenal dengan Piagam Madinah).

Piagam Madinah di samping bersifat norma hubungan timbal balik yang memadai bagi masyarakat berbilang kaum, juga merupakan perjanjian, undang-undang politik, tatanan bernegara yang mengandung aturan-aturan kehidupan bersama dalam sistem sosial besar berbentuk negara, bagi segenap warganya yang berbilang kaum: Muslim, Yahudi, Nasrani, dan lain-lain di sebuah negara yang bernama Madinah.

Di tengah kemajemukan masyarakat (negara Madinah), Nabi Muhammad SAW sebagai pimpinan negara, berusaha sedaya-upaya untuk meletakkan dan mendasarkan filosofi misi yang diebanyakan dalam membangun tatanan hidup bersama yang mencakup seluruh golongan, sehingga penduduk

negara dapat hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

Prinsip-prinsip umum Piagam Madinah:

1. Monoteisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, Tauhid.
2. Persatuan dan kesatuan; penegasan bahwa seluruh warga Madinah adalah satu umat, perlindungannya adalah satu, seluruh warga menanggung pembiayaan negara.
3. Persamaan keadilan bagi seluruh warga negara, semua berstatus sama di hadapan hukum, penegakan keadilan bagi semua.
4. Kebebasan beragama, semua pemeluk agama bebas menjalankan agamanya, sebagaimana Muslim menjalankan agamanya.
5. Pembelaan negara, merupakan kewajiban bersama.
6. Pengakuan dan pelestarian adat kebiasaan yang baik.
7. Supremasi aturan dan ajaran Ilahi.
8. Politik damai dan proteksi internal.

Piagam Madinah merupakan manifestasi sikap toleran, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, keadilan, dan kedamaian, yang permanen adanya. Masyarakat modern dan sehat manapun pasti mengakui hakikat maknawinya secara jujur. Toleransi dan perdamaian yang terkandung di dalam-

Sikap tegas penuh toleran, tanpa meninggalkan prinsip.



Mr. Jhon Ratt, Atase Kedutaan Amerika Serikat disambut Syaykh Dr. AS Panji Gumilang di Ma'had Al-Zaytun.

Para rasul Allah telah memberi teladan dan menunjukkan serta mengajarkan sikap toleran.

nya sangat kental, masyarakat kontemporer patut mengadopsinya, demi terciptanya dunia yang penuh toleransi dan perdamaian.

Berkaitan dengan Q.S. 42 ayat 13 yang telah disampaikan terdahulu, Allah menyebut nama-nama para utusannya yang bertugas membimbing umat dengan syariat agama-Nya, yaitu Nuh AS, Muhammad SAW, Ibrahim AS., Musa AS, dan Isa Almasih. Dari para utusan Allah inilah agama samawi berkembang sampai hari ini dan kelak kemudian. Mereka memiliki sifat-sifat toleran dan kesabaran yang prima yang perlu diteladani terus-menerus.

Pertama, Nabi Nuh AS. Beliau adalah bapak leluhur umat manusia setelah sirnanya hampir seluruh manusia di muka bumi. Dijuluki sebagai Pahlawan Air Bah. Nuh disifati sebagai seorang yang benar, benar bersumber dari keteguhan imannya, dekat kepada Tuhannya, orang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya yang telah terbenam dalam taraf hidup moral yang sangat rendah dan hina, dan kepada orang-orang semacam inilah Nuh AS menyampaikan dakwah tentang kebenaran abadi.

Dalam dakwahnya Nuh AS tergolong tidak berhasil membawa mereka kepada iman, namun dalam menata kembali umat manusia dan peradabannya setelah kehancurannya dari libasan air bah, Nuh

menjadi pahlawan umat manusia dan lingkungannya. Nabi Nuh AS, terkenal dengan doanya yang diabadikan dalam Al-Qur'an : S. 71 A. 26,27 , 28.

Nuh berkata: *"Ya, Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.*

Kedua, Nabi Ibrahim, adalah leluhur bangsa Yahudi, Arab, dan bangsa-bangsa lain. Imannya sangat teguh, terkenal sebagai *Khalilullah* (sahabat Allah), keturunannya melalui Ismail dan Ishaq. Hidupnya dijadikan teladan iman terhadap Tuhan oleh orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya dalam bahasa Ibrani Avram (Abram) dan selanjutnya berganti menjadi Abraham dan Ibrahim (bahasa Arab) yang berarti bapak sejumlah besar bangsa. Ibrahim berakidah monoteis, mentauhidkan Allah bertentangan dengan politeisme nenek moyangnya. Iman Ibrahim kepada Allah totalitas dalam bentuk ketaatan dan kesiapannya melakukan apapun perintah Tuhan.

Sebagai Nabi Akbar yang menerima perjanjian Tuhan, Ibrahim memainkan peranan yang unik baik dalam tradisi Yahudi dan Islam.

Ketiga, Nabi Musa, disebut sebagai pemimpin ulung pemberi hukum, perantara (Allah) membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Ia membina mereka menjadi suatu umat untuk mengabdikan kepada Allah, dan membawa mereka sampai ke perbatasan negeri yang dijanjikan Allah kepada nenek moyang mereka. Musa bukan berasal dari keturunan yang dapat dicatat dengan jelas oleh sejarah, hanya putra seorang pembantu di istana Firaun.

Musa adalah salah seorang putra yang terselamat dari maklumat Firaun (yang memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani), sang ibu menyelamatkan Musa dengan berbagai cara yang dimiliki sebagai penghuni pinggir sungai. Dalam kisahnya putri (istri) Firaun memperanakkannya (mengadopsinya), dan dalam kesehariannya justru diasuh oleh sang ibu di dalam istana

Firaun, sampai menjadi dewasa tanpa diketahui oleh siapa pun.

Namun Musa tak pernah putus asa menghadapi bangsa yang tegar tengkuk dan pencemooh. Musa memiliki iman dan ketegaran baja kepada Allah, dan sangat bergiat bekerja atas nama Allah. Musa juga diceritakan sebagai orang yang berkemampuan jurnalistik, menulis berbagai dokumen ringkas tentang hukum Allah, kitab perjanjian, risalah perjalanan di padang gurun dan lain-lain, Q.S. 87 A. 18-19 mengabadikan kemampuan jurnalistik Musa itu.

Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab yang dahulu, (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

Keempat, Nabi Isa Almasih, diimani oleh kaum muslimin sebagai salah seorang nabi besar utusan Allah, yang dilukiskan di dalam Q.S.61a.6:

Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata."

Bagi umat Islam mengimani para nabi Allah adalah merupakan rukun iman yang asasi. Keimanan terhadap para nabi Allah tidak dibeda-bedakan dalam inti kandungan ajaran Islam.

Dalam Alkitab dijelaskan bahwa topik pokok ajaran Yesus Kristus adalah total baru dan revolusioner dan pada dasarnya ajarannya bukan hanya baru tapi juga unik.

Ensiklopedi Alkitab Masa Kini menyatakan bahwa ajaran Yesus dapat diklasifikasikan dengan judul-judul sebagai berikut: etika, metafisika dan teologi, sosial, penyelamatan dan eskatologi (ajaran teologi mengenai akhir zaman, seperti hari kiamat, kebangkitan segala manusia dan sorga). Dan seluruh ajarannya menyatu pada dirinya sendiri. Inti ajarannya ialah pengumuman mengenai dirinya sebagai juruselamat dunia.

Dan yang kelima adalah Rasul Allah Muhammad saw. Ia adalah penerus ajaran para nabi Allah sebelumnya, nabi akhir dan penutup para nabi dan para rasul Allah, membenarkan keberadaan



Rombongan Kepala Kantor Perwakilan Dagang dan Ekonomi Taiwan Mr. David Lin, dalam sebuah acara di Ma'had Al-Zaytun.

para nabi terdahulu dengan segala ajarannya, yang dideklarasikan sebagai pemegang kitab Allah, yang penganutnya disebut sebagai ahlu kitab. Ajarannya mempunyai ciri:

1. Ajaran Tauhid, tentang keesaan Allah, yang harus diyakini setiap pemeluknya.
2. Bersifat universal, yakni Islam untuk semua umat manusia tanpa batasan teritorial.
3. Menghapus sistem perbudakan.
4. Persamaan hak bagi umat manusia.
5. Ajaran moral, sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pergaulan umat manusia di dunia.
6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dengan wujudnya berbagai syariat yang mampu menciptakan tolong menolong antar sesama manusia.

Dan sikap adil dalam segala kehidupan, dan lain-lain kebaikan yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Perkembangan Agama Dunia

Kini dan Mendatang

Apa yang telah diuraikan itu barulah agama-agama yang bersifat samawi, tentunya masih banyak agama-agama ardi, sama-sama berkembang pesat sepesat agama samawi. Bahkan dalam kehidupan umat manusia di masa kini masih sangat banyak mereka yang tidak memeluk agama apapun, termasuk umat manusia yang meletakkan dirinya pada pilihan sebagai ateis.

Jika umat manusia dengan agamanya, kemudian mengembangkannya, itu sudah menjadi fitrah manusia. Sebab semua

orang beragama merasa wajib untuk mengembangkan dan menyampaikan keyakinannya kepada siapapun di dunia ini. Di sinilah letaknya sebuah toleransi, siapapun umat beragama bebas untuk mendakwahkan agamanya dan siapapun manusia bebas menerima maupun menolak ajakan itu.

Sesuatu yang menjadi sangat penting dan terpenting adalah tertanamnya suatu sikap bagi seluruh umat beragama, bahwa tujuan dasar beragama adalah tercapainya kebahagiaan (kedamaian) dunia maupun dalam kehidupan setelah dunia, kiranya sesuatu yang sangat esensial ini tidak ternodai oleh perselisihan justru atas nama kesejahteraan dunia akhirat tersebut, hal yang sangat ironis jika hal itu justru yang dikedepankan dalam sikap hidup umat beragama. Sekali lagi sikap toleransi yang dapat mengatasinya.

Kita coba membaca perkembangan umat manusia dengan keagamaannya dewasa ini. Dari data yang dapat dikumpulkan dari "Ensiklopedi Britannica" tahun 2001, tercatat bahwa penduduk dunia yang tersebar di dalam 238 negara di lima benua dan Oceania berjumlah 6.128.512.000 orang.

Dari sejumlah ini, pemeluk Agama Kristen (Katolik, Protestan, Ortodoks, Anglikan, Independen, Kristen Marginal dan Kristen yang tidak berafiliasi) berjumlah 2.019.052.000 orang = 32,9% yang tersebar di seluruh negara dunia (238 negara).

Muslim, 1.207.148.000 orang (belum termasuk mereka yang pernah menjadi penduduk di bawah pengawasan komunis Uni Soviet Rusia) = 19,7%, terdiri dari 83% Sunni dan 16 % Sy'i'i serta 1% lain-lain, tersebar di 204 negara di seluruh dunia.

Hindu, 819.689.000 = 13,4 %, tersebar di 114 negara di dunia. Tidak

Berbahagialah umat yang mencita-citakan kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh warga dunia, yaitu kehidupan yang toleran dan damai.



Syaykh al-Ma'had.

Dalam menegakkan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai di muka bumi ini peranan Muslim Asia dimotori oleh Indonesia.

beragama 771.345.000 orang, tersebar di 236 negara dunia = 12,6%. Agama Rakyat Cina, 387.167.000 orang = 6,3 %, tersebar di 99 negara dunia. Buddhists, 361.985.000 orang = 5,9% yang tersebar di 126 negara. Atheist, 150.252.000 orang = 2,5% tersebar di 161 negara. Sedangkan Jews (Yahudi) 14.484.000 orang = 0,2%, tersebar di 134 negara.

Dari catatan perkembangan agama-agama dunia yang ada pada abad ini, agama samawi menduduki tempat teratas, baik Kristen maupun Islam, sedangkan Yahudi persentasenya di bawah 1 %, dan agama-agama ardl menduduki posisi 3 besar dunia. Namun orang-orang yang tidak beragama dan atheis justru lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan agama Hindu = 15,1 %.

Inilah gambaran perkembangan agama-agama dunia, dengan dipaparkannya gambaran seperti ini, kiranya kita dapat mengerti apa yang harus dilakukan umat beragama, khususnya kita selaku Muslim.

Posisi Umat Islam Indonesia

Hampir seluruh Muslim di Asia Tenggara membentuk bagian dari wilayah budaya Melayu. Komunitas Muslim di wilayah ini adalah yang terbesar di dunia, tersebar di Indonesia, Malaysia, Phil-

pina, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam, jumlahnya tidak kurang dari 206.584.000 orang = 17,11 % dari jumlah umat Islam sedunia. Benang merah yang menghubungkan praktik dan keyakinan keagamaan mereka di wilayah ini adalah ungkapan budaya yang dimiliki bersama termasuk penggunaan bahasa Indonesia maupun Melayu yang dapat dipergunakan sebagai bahasa komunikasi keagamaan.

Dalam menegakkan kehidupan keagamaan yang toleran dan damai di muka bumi ini peranan Muslim Asia dimotori oleh Indonesia, mestinya dapat lebih mewarnai Dunia Islam kontemporer. Berbagai syarat untuk itu ada dalam lingkungan wilayah ini baik berupa bahasa, budaya dan adat kebiasaan yang dimiliki oleh Muslim di wilayah ini.

Pengembangan dan pembentukan diri bagi Muslim di wilayah ini tidak lagi harus tergantung pada wilayah tempat asal mula munculnya agama Islam (Timur Tengah). Kemampuan untuk berkembang membentuk diri untuk tampil sebagai umat beragama yang toleran dapat ditunjang oleh kemampuan Muslim di wilayah ini, sejalan dengan perkembangan peradaban umat manusia yang semakin maju yang dapat diakses oleh setiap Muslim di Asia Tenggara, khususnya Indonesia.

Untuk menuju ke arah itu, kita sebagai masyarakat/kelompok sosial ini harus menanamkan visi pada diri kita masing-masing, kiranya dengan aktivitas yang selama ini kita tekuni sebagai masyarakat pendidikan, terus bergerak ke arah kehidupan beragama atau kegiatan lainnya selalu mengedepankan sikap toleran. Ini maknanya, lingkungan kita ini harus sanggup menjadi wahana pengkaderan bangsa dan umat yang orientasinya adalah terciptanya sikap toleran dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara.

Kita harus yakin bahwa penanaman sikap toleran ini akan tercapai dengan seksama hanya melalui pendidikan, dalam artian pembiasaan yang tiada hentinya, sampai sikap itu menjadi darah daging yang tak terpisahkan (akidah). Dari tempat yang kita wujudkan bersama ini pasti akan tumbuh kader-kader bangsa dan umat, yang akan membawa kehidupan bangsa dan seluruh warga serantau Asia Tenggara ini menjadi bangsa warga dunia pelopor kehidupan penuh toleran dan damai. Berbahagialah umat yang mencita-citakan kehidupan yang dicita-citakan oleh seluruh warga dunia, yaitu kehidupan yang toleran dan damai. ■

Di tengah arus globalisasi dan emansipasi dunia, perempuan Pakistan tetap bernasib buruk dan dilecehkan secara sosial.

Lima laki-laki pemerkosa itu akhirnya kembali dibekuk setelah sempat dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Lahore pada Maret lalu. Demikian, majalah *Tempo* edisi 10 Juli 2005 mengawali kisah tentang perjuangan seorang perempuan Pakistan yang mencari keadilan.

Mukhtaran Mai (33), nama perempuan itu, merupakan simbol dari kelaliman sosial yang terjadi di Pakistan terhadap kaum perempuannya. Mai adalah perempuan yang berani menyeret para lelaki yang telah memperkosanya, suatu kasus yang jarang terjadi di negeri itu.

Kasus Mai bahkan menjadi sorotan saat sejak persidangannya dimulai di Pengadilan Negeri Punjab, Agustus 2002. Sejumlah media internasional meliput persidangan itu, menjadikannya terkenal sebagai simbol perlawanan perempuan Pakistan terhadap kelaliman. Ia diundang ke berbagai forum dari Bombay-India sampai Madrid-Spanyol.

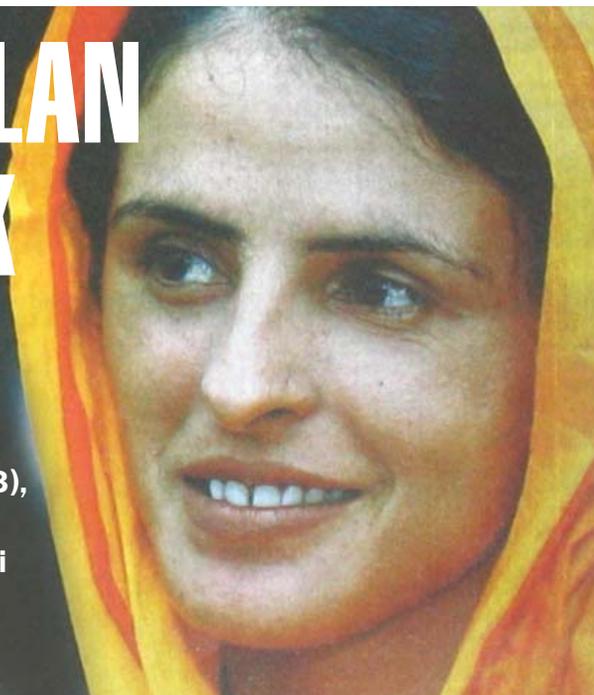
Tragedi yang menimpa Mai terjadi pada 22 Juni 2002. Ia diperkosa beramai-ramai oleh beberapa laki-laki suku Mastoi di Desa Meerwala, Provinsi Punjab, sekitar 240 kilometer di selatan Islamabad.

Pemerkosaan itu merupakan buntut dari *panchayat* (pengadilan adat) yang diselenggarakan setelah adik laki-laki Mai dipergoki berduaan di kamar dengan seorang anak perempuan asal suku Mastoi. Suku Mastoi adalah suku yang berkasta tinggi. Jauh berbeda dengan suku Mai, yakni suku Gujar, kaum penghalau ternak yang kastanya rendah di Pakistan.

Sengketa itu awalnya diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kaum Mastoi yang tak puas mendesak Dewan Desa mengirim algojo untuk merusak Mai. Maka, terjadilah pemerkosaan itu, di sebuah kebun kapas tak jauh dari rumah Mai.

KEADILAN UNTUK MAI

Mukhtaran Mai (33), merupakan simbol dari kelaliman sosial yang terjadi di Pakistan terhadap kaum perempuannya.



Teman-teman Mai dan para imam desa mendorongnya untuk menggugat keadilan. Dari mimbar masjid-masjid, mereka mendesak pemerintah Punjab agar menyeret pelaku ke pengadilan negara, bukan pengadilan rakyat yang sesat. Mai melaporkan kasusnya ke Kepolisian Punjab. Empat belas pria ditangkap karena perkara tersebut.

Ketika Pengadilan Tinggi Lahore membebaskan lima orang terdakwa, Mai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kecaman mengalir dari para aktivis hak asasi manusia terhadap pemerintah, terlebih setelah Presiden Pervez Musharraf melarang Mai pergi ke luar negeri karena khawatir mencoreng citra Pakistan.

Namun, seperti yang diberitakan *Koran Tempo*, 28 Juni 2005, Islamabad akhirnya mencabut larangan itu setelah Amerika Serikat mengatakan keputusan itu 'mencemaskan.'

Pada akhirnya, Mai pun menemukan keadilan yang dicarinya, setelah Mahkamah Agung Pakistan membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Lahore tersebut, Selasa (28/6).

Perempuan sebagai korban

Perempuan Pakistan kerap menjadi korban kebrutalan berupa pemerkosaan, pembunuhan atau penyiksaan untuk membayar kejahatan saudara lelakinya. Bahkan mereka kerap menjadi sasaran

kemarahan suami, misalnya jika tak bisa melahirkan anak lelaki.

Lebih dari 151 perempuan dari kasta rendah menjadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual sepanjang 2004. Penganiayaan juga meningkat dari tahun ke tahun. Cairan asam atau *tezab* termasuk bahan yang sering digunakan untuk menganiaya perempuan.

Catatan Human Right Watch, selama 2002 saja ada 1.030 kasus penganiayaan dengan cairan asam: 280 diantaranya meninggal, sisanya hidup dalam kondisi cacat, akibat disiram cairan asam.

Aksi protes Mai terhadap kekejaman yang menimpanya membuat kasus-kasus penganiayaan terhadap perempuan Pakistan menjadi perhatian. Selama ini, aparat hukum justru menghalang-halangi jika korban ingin melapor. Mereka menakut-nakuti bahwa biaya proses hukum itu akan sangat mahal, sehingga mereka tidak jadi menuntut.

Sebenarnya, beberapa pengadilan lokal pernah menjatuhkan hukuman berat pada pelaku. Sayangnya, putusan itu dianulir pada tingkat yang lebih tinggi, seperti yang dialami Mai.

Sejak lima tahun lalu, para aktivis gencar mengkampanyekan perlawanan terhadap penyiksaan perempuan di Pakistan. Namun, pemerintah Pakistan enggan bergerak. Mungkin juga karena kasus-kasus itu hanya menimpa para perempuan miskin. ■ RH

Anarkisme Pesta Politik Lokal

Terjadi fenomena penolakan hasil Pilkada. Belum siap menerima kekalahan atau akibat tidak netralnya panitia?



Amuk massa melanda Bintuhan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Senin (25/7). Sekitar lima ribuan warga dari sejumlah kecamatan—sebagian bersenjatakan parang dan pentungan—membakar kantor Dinas Peremukiman dan Prasarana Wilayah, Kantor Urusan Agama, kantor Camat Kaur Selatan, dan rumah dinas Ketua DPRD Kaur, serta tiga mobil yang diparkir.

Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kantor Bupati, dan gedung DPRD Kaur mereka lempari dengan batu sampai rusak parah, begitu pun semua peralatan di dalamnya. Massa adalah pendukung empat pasangan calon bupati/wakil bupati yang kalah dan tidak puas hasil Pilkada yang dinilai penuh kecurangan.

Peristiwa mengesankan pasca-prosesi pemilihan bupati/wakil bupati Kaur itu menambah daftar panjang kasus amuk massa yang merupakan eksekusi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung, yang secara nasional dimulai sejak 1 Juni 2005.

Sebelumnya, amuk massa terjadi di Surabaya (12/7). Seperti diberitakan harian *Surya* (13/7), Kota Pahlawan itu dilanda aksi anarkis massa yang merangsek masuk ke dalam gedung DPRD Surabaya. Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan atas hasil pemilihan Walikota Surabaya, massa lantas merusak sejumlah sarana di gedung wakil rakyat itu, termasuk kantor Ketua DPRD Surabaya.

Dua contoh kasus di atas menyimpulkan satu kesimpulan, perhelatan Pilkada ternyata menimbulkan eksekusi yang mungkin tidak disadari, tidak diprediksi, dan tidak diantisipasi sebelumnya oleh DPR-RI yang melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah—payung hukum pelaksanaan Pilkada.

Memang, Pilkada di sebagian daerah berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tapi, di sebagian daerah lainnya, Pilkada dianggap—'bermasalah'. Persoalan yang melingkupinya juga bermacam-macam, mulai dari yang bersifat teknis sampai nonteknis.

Sebut saja, misalnya, mulai dari manipulasi jumlah surat suara, pemilih

Potret Carut-Marut Pilkada:

Kerusuhan terjadi di Ternate, Maluku Utara, menyusul demonstrasi massa pendukung salah satu pasangan calon walikota/wakil walikota Ternate, yang kalah dalam Pilkada 27 Juni. Massa menuduh KPU Ternate berlaku curang terkait ditemukannya ribuan kartu pemilih yang tidak disalurkan di tempat sampah, termasuk kartu pemilih fiktif.

Penghitungan suara pemilihan bupati/wakil bupati Sukoharjo, Jawa Tengah, oleh KPUD sempat dihentikan menyusul desakan massa pendukung salah satu pasangan calon yang mencurigai adanya politik uang oleh pasangan calon lain, dalam Pilkada 27 Juni.

Kericuhan di Kabupaten Manggarai, NTT, menyusul penolakan salah satu pasangan calon atas hasil perhitungan suara Pilkada 27 Juni. KPUD dituduh berbuat curang karena tidak mendaftarkan ribuan pemilih sah di Desa Wae Rii.

Ribuan massa menamakan diri Komite Perjuangan Rakyat Halsei membakar kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara. Juga dibakar 5 mobil dinas DPRD dan 1 mobil dinas KPUD. Rumah Ketua DPRD Halsel rusak parah dilempari batu. Diduga, aksi itu dipicu keputusan Pengadilan Tinggi Malut yang menolak gugatan tim sukses salah satu pasangan calon bupati yang kalah dalam Pilkada 27 Juni.

Ratusan warga pendukung pasangan calon walikota/wakil walikota di Kota Bitung, Sulawesi Utara, menduduki kantor KPUD sebagai bentuk tuntutan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS yang dinilai bermasalah di Kec. Bitung Timur. Aksi itu juga terakit indikasi 200 warga negara Filipina yang diikutsertakan salah seorang calon walikota mencoblos di TPS-TPS di 3 kelurahan. ■ **RF**

yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak terdaftar atau tidak memiliki kartu pemilih, administrasi pendaftaran pemilih yang dianggap mengada-ada seperti orang yang sudah meninggal/anak Balita diberikan kartu pemilih, sampai independensi KPUD yang diragukan.

Tapi, dengan mengasumsikan bahwa pemilihan sejatinya telah berlangsung demokratis, merebaknya aksi massa pasca-Pilkada mencerminkan masih ada pihak-pihak yang belum bisa menerima kenyataan; kalah dalam pertarungan. ■ **RF/SP**

Parpol Dibantu, Dukungan Diraih

Di tengah kelangkaan BBM, pemerintah mengucurkan dana bagi partai politik peserta Pemilu 2004. Patokannya, setiap kursi di parlemen dihargai Rp 21 juta. Mengapa anggota DPD dilupakan?



Baru setahun anggota DPR-RI berkantor di Senayan, menjalankan tugas dan mengemban amanah dari rakyat. Begitu pun halnya dengan kinerja pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)-nya.

Masih begitu banyak masalah menerpa bangsa ini, mulai dari bencana alam yang meluluhlantakan sejumlah daerah sampai berbagai penyakit yang menyerang anak negeri, yang mesti diselesaikan. Dan, untuk mengatasi itu semua harus menyedot cadangan kas negara.

Tiba-tiba, pada 19 Juli 2005, Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.29/2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Sesuai dengan bunyinya, PP itu memang dimaksudkan sebagai payung hukum pemerintah untuk merogoh kocek negara sebesar Rp 11,55 miliar yang diperuntukkan bagi partai-partai politik (Parpol) peserta Pemilu Legislatif 2004 (memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD), yang memiliki kursi (wakil) di parlemen.

Uang sejumlah itu dibagi secara proporsional kepada Parpol berdasarkan jumlah kursi (wakil) yang dimilikinya di DPR-RI, dengan dasar perhitungan setiap kursi seharga dengan Rp 21 juta. Seperti dipahami, ada sebanyak 550 anggota DPR-RI.

Bukan hanya dari kursi di DPR-RI, Parpol juga akan mendapatkan dana dari jumlah kursi yang diperoleh di tingkat DPRD. Untuk kursi di DPRD, Parpol mendapat "imbalan" yang besarnya ditetapkan oleh gubernur, bupati, wali-kota masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Namun, jumlahnya tidak boleh melebihi Rp 21 juta.

Tentu saja, ini adalah kabar baik bagi Parpol-parpol yang mendapat wakil di DPR-RI dan DPRD. Apalagi, Parpol yang memiliki jatah kursi terbanyak.

Partai Golkar yang memperoleh 129 kursi di DPR akan mendapat dana bantuan terbesar (Rp 2,7 miliar). Disusul PDI Perjuangan 109 kursi (Rp 2,3 miliar), Partai Persatuan Pembangunan (58 kursi-Rp 1,2 miliar), Partai Demokrat (57 kursi-Rp 1,2 miliar), Partai Amanat Nasional (53 kursi-Rp 1,1 miliar), Partai Kebangkitan Bangsa (52 kursi-Rp 1,0 miliar) dan Partai Keadilan Sejahtera (45 kursi-Rp 945 juta).

Berikutnya Partai Bintang Reformasi (14 kursi-Rp 294 juta), Partai Damai Sejahtera (13 kursi-Rp 273 miliar), Partai Bulan Bintang (11 kursi-Rp 231 juta), Partai Persatuan dan Demokrasi Kebangsaan (4 kursi-Rp 84 juta), Partai Pelopor (3 kursi-Rp 63 juta), Partai Karya Peduli Bangsa (2 kursi-Rp 42 juta), dan PNI Marhanisme, PNBK, PKPI serta PPDI masing-masing satu kursi (Rp 21 juta).

Dalam penjelasannya, Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, penerbitan PP 29/2005 didasarkan pada UU No.31/2002 tentang Partai Politik.

Dana bantuan untuk Parpol sudah tersedia di Departemen Keuangan. Prosedur dan tahap pencairannya akan dilaksanakan Menteri Keuangan.

Pemerintah pernah mengeluarkan kebijakan serupa, yakni PP No. 51 Tahun 2001 sebagai pelaksanaan UU No.2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Saat itu, bantuan dana diberikan kepada seluruh Parpol peserta Pemilu 1999. Hanya dasar perhitungan, bukan jumlah kursi di DPR/DPRD, adalah jumlah suara yang diperoleh. Setiap suara dihargai Rp 1.000.

Menarik dicermati komentar pengamat politik Indra J. Piliang di harian

Sinar Harapan (21/7). Menurutnya, lewat bantuan itu, SBY memperkuat dukungan sekaligus terbangunnya loyalitas DPR pada pemerintahannya.

"Bantuan uang kepada Parpol justru akan menjadi jebakan sendiri bagi DPR. Presiden SBY bisa membangun mekanisme timbal balik dengan DPR karena sejak awal dia menyadari pemerintahannya tidak mendapat dukungan penuh dari DPR," ujar peneliti dari CSIS ini.

Dalam persepsi yang lebih kritis, seperti dikutip harian *Rakyat Merdeka* (20/7), Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Arif Nur Alam, menilai tidak pantas jika pemerintah memberikan bantuan dana kepada Parpol.

Pasalnya, "Keuangan negara saat ini sedang morat-marit. Untuk membiayai subsidi BBM, pemerintah merasa berat. Tapi, untuk Parpol *kok gampang* saja?" tandas Arif Nur Alam.

Harian *Kompas* (20/7), mengutip pendapat pengamat politik UI Riswandha Imawan, menulis bahwa dari sisi keadilan kebijakan itu bisa dirasakan tidak adil. Karena Parpol yang tidak mempunyai kursi akan habis dan Parpol besarlah yang akan eksis. Namun dari sisi pengendalian Parpol, kebijakan tersebut bisa diterima.

Terakhir, ada sikap tidak konsekuen di balik kebijakan pemerintah mengucurkan uang negara untuk Parpol yang 'katanya' akan disalurkan kepada konstituentennya.

Mengapa 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak diberikan sokongan dana seperti halnya partai politik? Bukankah mereka juga produk murni dan sah dari Pemilu Legislatif 2004 yang juga memiliki kontinuitas dan pemilih riil? ■ **RF/SP**

Ternyata, penerimaan siswa baru tahun ajaran 2005-2006 diwarnai pungutan dan biaya yang melangit.

Bantuan Operasional Sekolah Lain di Bibir Lain di Fakta

Kendati pemerintah bulan Juni lalu mengulirkan kebijakan sekolah gratis, namun berbagai pungutan yang menjadi beban orang tua murid tetap berjalan terus. Baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA.

Pemerintah sesungguhnya sebelumnya sudah mengalokasikan dana Rp 6,2 triliun, sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di Bidang Pendidikan, dan telah pula memperoleh persetujuan DPR. Sebesar Rp 5,6 triliun diantaranya berupa bantuan operasional sekolah (BOS), sisanya untuk beasiswa.

Kepada koran *Tempo* (20/7), Bambang Sudibyo, Menteri Pendidikan Nasional, mengatakan BOS sebesar itu dialokasikan untuk 40 juta siswa sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, di seluruh Indonesia.

Besarnya dana BOS membuat Alwi Shihab, Menko Kesra, masih kepada koran sama, memastikan setiap sekolah yang menerima bantuan lebih besar dari iuran bulanan siswa "harus membebaskan segala bentuk iuran kepada semua siswa".

Sedangkan kepada sekolah yang mendapatkan bantuan lebih kecil dari iuran siswa, urai Shihab, sekolah tersebut

berkewajiban melaksanakan sekolah gratis terbatas. "Siswa miskin harus dibebaskan dari iuran," tegasnya.

Pemerintah Tidak Berdaya

Nyatanya apa yang diucapkan tak selalu sama dengan apa yang dapat disaksikan. Malah sebelumnya *Kompas* (19/7) sebenarnya sudah menulis, upaya pemerintah mewujudkan pendidikan gratis SD-SMP dan sederajat dalam bentuk pemberian biaya operasional sekolah (BOS) pada tahun ajaran baru 2005/2006, belum terwujud.

Berdasarkan pantauan koran *ini* pada hari pertama tahun ajaran baru, Senin (18/7), sejumlah sekolah dasar di sekitar Jakarta tetap saja menarik pungutan untuk komponen-komponen yang mestinya digratiskan, karena sudah ditanggung oleh BOS. Seperti pengadaan buku pelajaran, biaya formulir pendaftaran siswa baru, dan uang bangunan. Jumlah uang ratusan ribu dengan berat hati terpaksa dibayar oleh orang tua yang memasukkan anaknya ke SD dan SMP.

Dengan kebijakan baru bantuan operasional sekolah, setiap siswa SD/MI/SD LB/SD salafiyah semestinya diasumsikan memperoleh BOS senilai Rp 235.000 per tahun. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMP LB/MTs salafiyah memperoleh Rp 324.500 per tahun.

Dari 198 peserta OBI tahun 2005, berasal dari 50 negara, Pratomo Andi menempati peringkat ke-36, Fenrico ke-45, Ihsan ke-51, dan Diaz ke-70.

Beberapa hari sebelumnya di ajang Olimpiade Fisika Internasional (OFI), berlangsung 3-12 Juli 2005 di Salamanca, Spanyol, lima siswa Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) binaan Prof Yohanes Surya PhD, berhasil merebut dua medali emas dan tiga medali perunggu (*Kompas*, 11/7).

Mereka adalah Andika Putra (SMA Sutomo 1 Medan) dan Ali Sucipto (SMA Xaverius 1 Palembang) peraih medali emas, dan tiga siswa peraih medali perunggu Purnawirman (SMA Negeri 1 Pekanbaru), Michael Adrian (SMA Regina Pacis Bogor), dan Ario Prabowo (SMA



Di seluruh Indonesia saat ini jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/MI/SD LB tercatat sebanyak 28,77 juta siswa dan SD salafiyah 108.177 siswa. SMP/MTs/SMP LB 10,62 juta siswa dan SMP salafiyah 114.433 siswa.

Dengan BOS tidak ada lagi alasan anak usia SD dan SLTP tidak mendapat layanan pendidikan dasar. Sebab kendala biaya pendidikan sudah bisa diatasi. "Karena semua komponen pokok biaya pendidikan akan ditanggung oleh negara, maka tidak ada lagi alasan bagi anak usia 7-15 tahun untuk tidak mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun", ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Depdiknas, Indra Djati Sidi menggaris bawahi penjelasan Mendiknas bulan Juni lalu.

Mendiknas mengakui pemerintah tak berdaya melarang sekolah untuk menarik pungutan dalam rangka penerimaan siswa baru (PSB). Ia juga tak bisa mengingkari fakta bahwa semua kegiatan persekolahan butuh dana. Bambang pada akhirnya hanya bisa berbuat sebatas menghimbau, agar para pengelola sekolah proporsional dalam menarik pungutan. ■ **SP,HT**

Indonesia Raih Prestasi di Olimpiade Sains

Sejumlah siswa SMA Indonesia berhasil meraih prestasi tertinggi di ajang olimpiade biologi, matematika dan fisika internasional.

Pada Olimpiade Biologi Internasional (OBI) ke-15, di Beijing, China, 10-17 Juli 2005, tiga siswa berhasil meraih medali perak masing-masing Pratomo Andi (siswa SMAN 1 Purwokerto), Fenrico Pratama (SMA Plus Riau), Ihsan Tria Pramanda (SMA Padang Panjang). Satu siswa lagi Diaz Adi Utama, dari SMA Taruna Nusantara, Magelang, berhasil meraih medali perunggu.

Taruna Nusantara Magelang).

Dalam ajang OFI yang diikuti 340 pelajar dari 76 negara, Indonesia menjadi negara yang disegani dalam kompetisi sains. Berdasarkan perolehan medali, Indonesia unggul atas Amerika Serikat, Jerman, Australia, dan Vietnam yang masing-masing meraih satu medali emas.

Posisi Indonesia sejajar dengan Iran, India, dan Korea (dua emas). Posisi teratas ditempati China dan Taiwan (lima emas), disusul Rusia (empat emas), dan Hongaria (tiga emas).

Untuk Olimpiade Matematika Internasional (OMI), yang berlangsung 9-21 Juli 2005 di Meksiko, Indonesia meraih tiga medali perunggu. ■ **HT**

Lulus Tahun Depan Lihatnya Tahun Ini

Lebih 800.000 siswa SMP dan SMA tahun ajaran 2004/2005 tidak lulus Ujian Nasional (UN). Inikah cermin buramnya dunia pendidikan kita?

Tahun 2005 ini tercatat 817.302 siswa SLTP dan SLTA dari 4.990.266 peserta Ujian Nasional (UN), atau 16,37 persen, dinyatakan tidak lulus.

Angka ini meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 403.872 siswa.

Di "kota pelajar" Yogyakarta saja, misalnya, terdapat 13 SMA yang tingkat kelulusannya nol persen. Demikian pula di Semarang, Jawa Tengah, empat SMA dinyatakan siswanya lulus nol persen.

Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tingkat ketidaklulusan yang tinggi menuai protes siswa. Fitriah, siswi yang berunjuk rasa, menyatakan dana pendidikan yang besar, mencapai Rp 21 triliun, ternyata tidak bisa membentuk pelajar yang berprestasi. Di NAD, dari 111.482 siswa SMP dan SMA, termasuk madrasah tsanawiyah dan aliyah, 48.160 siswa atau 43,3 persen dinyatakan tidak lulus. Angka ini lebih besar dari tahun lalu yang hanya 33 persen.

Di Jawa Timur, harian *Surya* (1/7) melaporkan Gubernur Imam Utomo turut kecewa berat atas hasil UN di daerahnya. Dari 451.104 siswa SMP dan SMA yang ikut UN, 55.258 siswa tidak lulus. Surabaya menjadi penyumbang terbesar, 4.691 siswa SMP dan SMA dinyatakan tidak lulus. Bahkan, ada SMP yang kelulusannya nol persen

Pemerintah Prihatin

Dari tiga mata pelajaran yang diuji secara nasional, bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika, nilai siswa umumnya jatuh pada dua mata pelajaran terakhir.

"Pemerintah prihatin atas hasil itu, tapi itulah kenyataan yang harus dibuka. Sejak dulu kualitas pendidikan kita rendah", ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla, ketika berbicara kepada pers di kantornya, Jakarta (1/7).

Adalah Jusuf Kalla tokoh yang mendorong lahirnya kebijakan pemerintah

untuk menaikkan angka kelulusan siswa, dari 4,01 menjadi 4,26. Ia memaksudkannya untuk mengetahui peta daerah-daerah yang kualitas pendidikannya rendah. Daerah itu harus diangkat dengan memberi perhatian melalui tambahan dana dan perbaikan kualitas guru.

"Suatu bangsa akan bisa maju apabila mengetahui keadaan yang sebenarnya. Apabila selama ini hanya dipoles-poles angkanya, bangsa ini tidak akan bisa maju dengan betul," ujar Kalla. Ia lalu meminta agar gubernur dan bupati/walikota bekerja keras jika kualitas pendidikan di daerahnya lebih rendah dibanding secara nasional.

Ma'had Al-Zaytun di atas Rata-rata

Walau secara nasional tingkat kelulusan siswa merosot, pondok pesantren Ma'had Al-Zaytun, yang berlokasi di Desa Gantar, Indramayu, Jawa Barat, pantas mendapat predikat sebagai sekolah unggulan baru.

Baru pertama kali melaksanakan UN, maklum, pusat pendidikan terpadu ini baru berdiri tahun 1999, prestasi peserta didiknya di tingkat aliyah sudah sangat memuaskan. Dari 1.251 siswa, terdiri 626 siswa program studi IPA dan 625 program IPS, hanya satu orang saja atau 0,079 persen yang tidak lulus. Siswa dari program studi IPA itu dinyatakan tak lulus pada bidang studi Bahasa Indonesia.

Sementara, pada tingkat tsanawiyah hanya 5 dari 1.110 peserta didik yang tidak lulus (0,45 persen). Satu anak tidak lulus pada mata pelajaran bahasa Inggris, empat orang tidak lulus pada pelajaran matematika.

Majalah *Tokoh Indonesia*, pada edisi Juli 2005 melaporkan nilai kelulusan rata-rata seluruh peserta didik Ma'had Al-

Zaytun berada di atas rata-rata nasional. Bahkan, Ma'had yang sejak 27 Agustus 2005 ini secara resmi mulai membuka perguruan tinggi baru bernama Universitas Al-Zaytun Indonesia, mencatatkan sekitar 30 persen siswanya berhasil memperoleh nilai antara 8-10.

Sebagai contoh, di tingkat tsanawiyah pada bidang studi bahasa Indonesia, sebanyak 60 orang siswa mendapat nilai 9-10 (5,41 persen), 293 siswa mendapat nilai 8-9 (26,40 persen), 451 siswa mendapat nilai 7-8 (40,63 persen), dan 283 siswa mendapat nilai 6-7 (24,50 persen). Hanya 23 siswa yang mendapat nilai antara 5-6, atau 2,07 persen.

Kemudian pada bidang studi bahasa Inggris, sebanyak 93 siswa mendapat nilai 9-10 (8,38 persen), 219 siswa mendapat nilai 8-9 (19,73 persen), 344 siswa mendapat nilai 7-8 (30,99 persen), dan 418 siswa mendapat nilai 6-7 (37,66 persen). Sisanya, 34 orang mendapat nilai 5-6 (3,06 persen) dan satu siswa (0,09 persen) dinyatakan tidak lulus.

Pada bidang studi matematika jumlah siswa yang mendapat nilai 9-10 lebih banyak dibanding dengan bidang studi bahasa Indonesia. Tercatat 68 siswa yang mendapat nilai 9-10 (6,13 persen), malahan 63 orang berhasil mendapat nilai sempurna 10.

Untuk tingkat aliyah tercatat 22 orang peserta didik program IPA mendapat nilai 10 untuk matematika. Hanya satu orang peserta didik program IPA yang tidak lulus dan itu untuk bidang studi bahasa Indonesia. ■ SP





AS Gagal Militan Irak Membara

Hasil survey sebuah lembaga penelitian politik AS terkemuka menyudutkan pemerintahan Presiden George W. Bush karena telah memberikan kesempatan kepada pemberontak Irak dengan kurangnya rencana pasca perang di Irak.

Dewan Studi Hubungan Luar Negeri mengemukakan keputusan yang menganggap pembangunan pasca perang tidak memerlukan banyak tentara seperti ketika invasi ke Irak, merupakan kesalahan perhitungan yang fatal.

Sedikitnya prajurit telah menyebabkan AS tidak memiliki kelengkapan yang memadai untuk menciptakan keamanan, pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi di Irak.

Hasil penelitian itu mengungkapkan bahwa pembangunan pasca perang harus merupakan prioritas nasional, sama dengan perang itu sendiri. Laporan itu juga menyarankan bantuan internasional sebesar US\$ 1 miliar

harus disediakan untuk membangun Irak pasca konflik.

Menurut laporan itu tanggungjawab pemerintah Irak untuk stabilitas dan pembangunan sangat tidak jelas. Pembangunan suatu bangsa bukan hanya kepedulian dari sisi kemanusiaan saja, tetapi merupakan prioritas keamanan nasional yang sangat penting yang harus disesuaikan dengan kemampuan melawan serangan.

Kegagalan dalam menciptakan keamanan dan stabilitas pasca perang memberikan konsekuensi yang serius terhadap AS, tidak hanya di Irak, tetapi lebih luas lagi.

Laporan itu secara spesifik mengatakan bahwa kegagalan mempersiapkan secara matang periode pasca perang merupakan pemicu awal terjadinya pemberontakan. Usaha Irak untuk melakukan pembangunan terhambat sejak invasi tahun 2003 di mana setiap hari terjadi penembakan dan serangan bom. ■ **BBC, CH, SH**



RIYADH: Setelah menderita sakit cukup lama Raja Fahd bin Abdul Aziz dari Arab Saudi hari Senin (1/8) wafat pada usia 84 tahun. Secara resmi ia digantikan oleh putra mahkota Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz yang telah lama disiapkan untuk mengganti posisi Raja Fahd.

Selama 10 tahun semenjak raja Fahd jatuh sakit, Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz yang merupakan saudara tiri raja Fahd, telah menjalankan secara *de facto* semua urusan. kenegaraan. Shalat jenazah bagi Raja Fahd dilakukan hari Selasa (2/8) di Masjid Imam Turki bin Abdullah. ■ **REUTERS, CH, SH**



RIO DE JANEIRO: Tentara Angkatan Udara Brasil membawa peti mati Jean Charles de Menezes ke dalam pesawat terbang menuju Brazil (28/7). Jenazah itu untuk disampaikan ke Governador Valadares, dekat daerah Gonzaga, kota di mana Menezes akan dikuburkan. Menezes meninggal setelah ditembak polisi di London yang mengira ia hendak melakukan tindakan bom bunuh diri. ■ **REUTERS, CH, SH**

NANJIN: Di daerah Nanjin, kabupaten Ziyang, barat daya Provinsi Sichuan, Cina, para petani berusaha memasukkan babi-babi ke dalam truk untuk dijual. Para petani menjual cepat ternak babinya dengan harga yang rendah karena takut akan tertular bakteri *streptococosis II* yang ada pada babi. Korban yang meninggal dunia tertular wabah penyakit ini mencapai 31 orang di Sichuan (28/7). Demikian menurut Kementerian Kesehatan Cina.

Terdapat 152 pengaduan menyangkut kasus ternak babi terinfeksi streptococosis II, di provinsi Sichuan. "Di antaranya terdapat 106 yang terbukti terjangkit *streptococosis II* dan 46 belum diketahui," kata Menteri Kesehatan dalam laporannya. ■ **REUTERS, CH, SH**



BOMBAY: Petugas Militer India menemukan sebuah mayat yang tertimpa tanah longsor di Bombay (28/7). Lebih dari 500 orang tewas akibat banjir dan tanah longsor yang terjadi di bagian barat India. Ribuan orang terperangkap di dalam kota Bombay karena hujan deras yang melanda wilayah itu. ■ **REUTERS, CH, SH**



Mengkaji Ulang Jejak Joni

Kejaksaan Agung tengah membahas kembali surat perintah penghentian penyidikan kasus Ginandjar Kartasasmita. Akan lolos lagikah ia?

Usai sudah hari-hari tenang mantan Menteri Pertambangan dan Energi Ginandjar Kartasasmita. Kini ia harus bersiap-siap menghadapi tim dari kejaksaan yang tengah meneliti kembali berkas-berkas lama keterlibatannya atas kasus *technical assistant contract* (TAC) Pertamina dengan PT Ustraindo yang mengemuka lima tahun lalu.

Tiga belas orang sudah ditunjuk Kejaksaan Agung sebagai tim pengkaji sejak Januari lalu. Di antaranya ada nama-nama yang sudah dikenal publik, seperti Harkristuti Harkrisnowo, Bambang Widjojanto, Iskandar Sonhaji, Dindin S. Maolani dan Zein Badjeber.

Beberapa tahun lalu kasus ini mewarnai berbagai media massa, menyusul kontroversi Ginandjar yang saat itu masih militer aktif dan puncaknya adalah SP3 yang dikeluarkan di masa Jaksa Agung MA Rachman. Kini saat kembali mengemuka, *Koran Tempo*, *Sinar Harapan*, *Republika* dan majalah *Tempo* tak ketinggalan melaporkan.

Kasus TAC – Ginandjar mengemuka pada November 2000. Menurut majalah *Tempo* edisi 24 Juli 2005, Ginandjar dianggap paling berperan dalam menggonkkan proyek itu. Belakangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengaudit proyek ini. Hasilnya, negara dirugikan Rp 1,5 miliar.

Bung Joni—panggilan akrab Ginandjar di kalangan terdekatnya—bukannya tidak pernah diseret ke tangan hukum. Namun, tanggal 19 Oktober 2004, Jaksa Agung MA Rachman mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan, Ginandjar tidak terbukti merugikan keuangan negara.

Kasus ini berawal dari perjanjian pengeboran minyak di Bunyu, Prabumulih, Pendopo (Sumatera Selatan) dan Jatibarang (Jawa Barat), antara Pertamina—Ustraindo, Desember 1992 dan Februari 1993. Ustraindo menjamin



memiliki teknologi untuk mengucurkan kembali sumur minyak yang katanya mulai mengering.

Kala itu, Menteri Pertambangan Ginandjar menyetujui. Belakangan, diketahui keempat sumur minyak di sana masih mengucurkan minyak dengan deras. Alhasil, negara rugi Rp 200 miliar. Pertamina juga harus membayar Rp 5 miliar plus 200 ribu barel per hari sebagai ganti uji kelayakan.

Seperti dilaporkan *Sinar Harapan*, 7 Juli 2005 dan *Koran Tempo*, 6 Juli 2005, kerugian juga terjadi ketika Ginandjar meminta Dirut Pertamina yang dijabat Faisal Abda'oe untuk memutuskan kontrak kerja dengan PT Ustraindo karena dinilai tidak mampu memenuhi target peningkatan produksi sesuai kontrak. Akibatnya negara tambah merugi Rp 1,5 miliar.

Keganjilan Ustraindo

Tempo mendapat informasi dari seorang praktisi hukum yang pernah ikut menangani kasus Ginandjar, bahwa PT Ustraindo baru didirikan sebulan sebelum menandatangani kontrak dengan Pertamina tanpa tender. BPKP juga menemukan kejanggalan. Ternyata karyawan yang dipakai Ustraindo adalah karyawan Pertamina.

Ustraindo tidak memiliki kapabilitas dalam bidang minyak dan gas diakui sendiri oleh direktur utamanya, Praptono Honggopati Tjitrohupojo, yang merupakan kerabat mantan Presiden Soeharto.

Dalam suatu pemeriksaan, Ginandjar mengaku adanya disposisi Soeharto agar Pertamina memberikan kesempatan pada perusahaan yang 49 persen sahamnya dipegang Bambang Trihatmodjo itu. Namun demikian, Ginandjar berpendapat, meskipun ditambah biaya penyusutan aset dan penyusutan cadangan, negara dan Pertamina tetap diuntungkan oleh proyek itu.

Saat ini tim pengkaji terus menelaah kasus ini dan mengumpulkan dokumentasi yang terserak dimana-mana untuk dipelajari. Harkristuti mengatakan, timnya tengah mempertimbangkan untuk memanggil para jaksa yang dulu menangani kasus Ginandjar. ■ RH

KRONOLOGI KASUS GINANDJAR

November 2000. Kejaksaan menetapkan Dirut Pertamina Faisal Abda'oe dan Dirut PT Ustraindo Petro Gas Praptono H. Tjitrohupojo sebagai tersangka.

Maret 2001. Ginandjar menjadi tersangka, tetapi belum diperiksa karena ada di Boston, AS.

21 Maret 2001. Kejaksaan menahan Faisal Abda'oe. Ginandjar tidak diperiksa karena tidak ada izin dari Panglima TNI.

3 April 2001. Tim pengacara Ginandjar menggugat praperadilan ke PN Jaksel.

2 Mei 2001. Ginandjar keluar dari tahanan berdasarkan putusan praperadilan PN Jaksel.

Maret 2002. MA mengabulkan kasasi kejaksaan dan memerintahkan penyidikan dilanjutkan.

Mei 2002. Kejaksaan membentuk tim koneksi, terdiri dari lima orang.

Juni 2002. Kejaksaan menutup kasus TAC, alasannya Faisal Abda'oe meninggal.

24 September 2002. Tim penyidik koneksi dan BPKP mulai mengaudit proyek TAC.

19 Oktober 2004. Jaksa Agung MA Rachman mengeluarkan SP3 atas kasus Ginandjar.

5 Mei 2005. Presiden SBY membentuk tim pemberantasan korupsi, diketuai JAM Pidsus Hendarman Supandji.

6 Juli 2005. Jaksa Hendarman Supandji menyatakan pihaknya mulai mengkaji kasus TAC yang melibatkan Ginandjar.

Ketika Rakyat Mulai Tak Sabar

Pemberantasan korupsi yang digembarkan sejak awal pemerintahan SBY berjalan lamban dan belum menunjukkan hasil nyata.

Ada istilah baru yang menggelitik telinga di bidang 'perkorpasian', yakni: 'koruptor memburu korupsi.' Suatu malam, istilah itu terlontar begitu saja dalam suatu *talkshow* yang membicarakan masalah pemberantasan korupsi di Radio Elshinta.

Talkshow itu memang khusus membicarakan ide Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk memerangi korupsi. Jaksa Agung akan mencoba menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum terhadap pelaku korupsi yang mau bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk membongkar jaringan korupsi.

Hal itu merupakan hak oportunitas Jaksa Agung yang tertuang dalam Pasal 35 UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Agung. Tentu saja seperti yang ditulis harian *Kompas*, Selasa, 2 Agustus 2005, ide itu disambut sejumlah dukungan maupun penentangan.

Mengapa Abdul Rahman merencanakan strategi itu? Bisa jadi karena beberapa kalangan menganggap aparat kejaksaan dan kepolisian lamban dalam mengimplementasikan semangat pemberantasan korupsi. Padahal sejak awal pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadikan pemberantasan korupsi sebagai primadona program kerjanya. Oleh sebab itu, Jaksa Agung dan Kapolri harus berani merombak aparatnya, terutama jajaran eselon I dan II.

Presiden SBY sudah membentuk

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) 28 April 2005 untuk mengusut kasus dugaan korupsi di 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah departemen. Jaksa Agung sudah memastikan 15 BUMN diantaranya terjadi korupsi.

Saat ini, seperti dilaporkan harian *Investor Daily*, 23-24 Juli 2005, BUMN yang tengah diusut Kejaksaan dan Mabes Polri adalah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, PLN, PT Telkom, PT Asuransi Jiwasraya, Perusahaan Gas Negara, PT Indofarma Tbk, RRI, PT Rajawali Nusantara I, PT Pupuk Kaltim, PT Angkasa Pura I, PT Pelabuhan Indonesia III, PT Angkatan Sungai, Danau dan Perairan, PT Djakarta Lloyd dan PT Pelindo II.

Sayangnya, sampai sekarang perkara korupsi itu belum ada yang masuk ke pengadilan satu pun. Dalam kasus Bank Mandiri, Jamsostek dan Departemen Agama, Kejaksaan maupun kepolisian baru sebatas menetapkan tersangka.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih berkutat dengan kasus penyuaipan yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk pengadaan dana taktis yang kini sudah memasuki masa persidangan.

Masih retorika

Pemberantasan korupsi masih diujung lidah dan pena. Demikian hal itu diutarakan dengan nada ironis oleh

komandan komisi pemberantasan korupsi itu sendiri, Taufiequrachman Ruki, dalam jumpa pers di Beijing, Cina, saat mengikuti kunjungan Presiden SBY, beberapa waktu lalu.

Ruki merasa, kepercayaan rakyat terhadap usaha pemerintah memberantas korupsi masih harus dibangun. Ia sendiri sangat ingin proses itu berjalan dengan cepat, tidak perlu menunggu 15 – 20 tahun lagi.

Ia menyayangkan, ada koruptor yang di pengadilan tingkat pertama dijatuhi hukuman, namun di tingkat selanjutnya mendapat penangguhan penahanan atau tahanan kota. Secara hukum, ujarnya seperti dikutip harian *Kompas*, 29 Juli 2005, hal itu memang kewenangan pengadilan tinggi. Namun hal itu juga mematikan spirit pemberantasan korupsi.

Satu hal lagi yang patut disesalkan adalah keterlibatan kalangan akademisi secara langsung maupun tidak langsung dalam menghambat pemberantasan korupsi.

Ada indikasi, para koruptor kerap memanfaatkan sejumlah guru besar dari perguruan tinggi sebagai saksi ahli yang memberikan pendapatnya sesuai dengan kepentingan terdakwa. Bahkan ada guru besar yang menjadi langganan sebagai saksi ahli untuk sidang-sidang perkara korupsi.

Fenomena ini dicermati Profesor



Muladi, ahli hukum pidana Universitas Diponegoro. Mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Soeharto dan BJ Habibie ini menganggap hal itu sebagai 'pelacuran intelektual' yang bertentangan dengan kultur akademis.

Muladi mencontohkan, perbuatan tindak pidana korupsi yang seharusnya masuk kasus hukum pidana, seringkali diblokkan menjadi hukum perdata atau hukum administrasi negara. Dan para guru besar itu tentu saja dibayar puluhan juta oleh terdakwa yang bersangkutan.

Antara janji dan kenyataan

Kalau dilihat ke belakang, sebenarnya bukan cuma SBY yang berjanji memberangus para koruptor. Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin akhir tahun lalu juga sempat melontarkan pernyataan bahwa seluruh koruptor akan dikirim ke Nusakambangan tanpa terkecuali.

Tapi Hamid tidak hanya janji. Beberapa bulan setelah jadi menteri, sudah enam orang terpidana korupsi yang dikirimnya ke pulau penjara di seberang daerah Cilacap, Jawa Tengah itu. Di antaranya adalah Pande Lubis dan kawan-kawan, para koruptor kasus Bank Bali.

Melihat begitu banyak kasus korupsi yang tengah ditangani, maka daftar Hamid akan sangat panjang. Seperti ditulis harian *Suara Pembaruan*, Minggu, 24 Juli 2005, kapasitas lembaga pemsayarakatan (LP) di Nusakambangan masih lowong. Belum terisi separuhnya.

Di sisi lain, ketidakpuasan atas kinerja pemerintah yang lamban dan tidak memuaskan dalam pemberantasan korupsi ini menimbulkan reaksi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Parpol yang terkenal berasas 'bersih dan jujur' ini berharap pemerintah masih punya *political will* dalam memperbaiki kebijakan-kebijakannya dan memenuhi harapan masyarakat untuk perubahan yang lebih baik.

Menurut Presiden PKS, Tifatul Sembiring, PKS siap melakukan perlawanan jika orang-orang yang terlibat korupsi melakukan perlawanan. Sebuah saran yang 'keras' untuk SBY bahkan dinyatakan Almuzzamil Yusuf, anggota Komisi III DPR dari F-PKS. Seperti ditulis harian *Rakyat Merdeka* dalam *headline*-nya, 2 Agustus 2005, Almuzzamil menyarankan agar isteri dan anak-anak pejabat ikut menekan kontrak politik anti KKN. Dan ketika orangtuanya terlibat korupsi, mereka juga bisa kena tuntutan. Sungguh sebuah saran yang kontroversial! ■ RH

In Absentia Bagi Penilap BLBI

Kejaksaan Agung akan memeriksa ulang kasus korupsi BLBI. Kalau perlu disidangkan tanpa kehadiran terdakwa.

Tekad Kejaksaan Agung untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya berimbas pada kasus-kasus lawas. Kejaksaan yang dikomandani Abdul Rahman Saleh sudah menyatakan akan membuka kembali kasus-kasus penyelewengan dana BLBI, terutama yang sempat di-SP3-kan.

Dalam catatan majalah *Tempo* edisi 31 Juli 2005, hingga akhir 2002, baru 20 dari 52 kasus BLBI yang diselidiki dan disidik. Yang dilimpahkan ke pengadilan hanya enam kasus. Yang tak tersentuh hukum lebih banyak. Bahkan sejumlah pejabat Bank Indonesia yang disinyalir terlibat sampai kini masih ada yang

berkursi di lembaga tersebut.

Sementara itu, sejumlah penilap BLBI buron namun sempat didengar kabarnya kini hidup enak di luar negeri. Syamsul Nursalim (BNI), Ninie Narwastu Admadjaya (Bank Danamon) dan Agus Anwar (Bank Pelita), misalnya.

Kemudian, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Hendarman Supandji menyatakan Kejaksaan segera melimpahkan berkas perkara korupsi dana BLBI ke pengadilan. Jika terdakwa kabur ke luar negeri, maka akan disidangkan secara *in absentia*. Saat ini, satu berkas yang sudah siap adalah berkas tersangka Agus Anwar yang kini berada di Singapura. Ia merugikan negara senilai Rp 700 miliar.

Sementara itu, petinggi BI yang terlibat juga banyak. Dalam catatan *Tempo*, ada nama Syahril Sabirin, Miranda Goeltom, Aulia Pohan dan Siti Fadriah. Mengomentari kasus ini, Direktur Centre for Banking Crisis, Deni Daruri, melihat ada pilih kasih dalam menciduk pelaku BLBI. Padahal, petinggi BI yang terindikasi mulai dari level kepala urusan pengawasan bank sampai gubernur. ■ RH



Setneg Mulai Diselidiki

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tipikor) mulai menyelidiki dugaan korupsi di Sekretariat Negara RI. Saat ini proses audit terhadap Setneg RI sedang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sejauh ini sudah ada pejabat yang dicurigai terlibat dalam perkara korupsi itu. Ketua Tim Tipikor Hendarman Supandji, ditulis harian *Kompas*, 2 Agustus 2005, tidak bersedia memberitakan berapa jumlah

pejabat tersebut.

Perkara itu berdasarkan laporan temuan BPK tahun ini. Namun tindak pidana korupsinya terjadi tahun 2004. Sudah sekitar 20 orang dipanggil untuk dimintai keterangan, termasuk rekanan yang berkaitan dengan Setneg.

Perkara korupsi di Setneg termasuk dalam lima perkara korupsi yang ditindaklanjuti oleh Tim Tipikor pada tahap awal. Saat ini jumlah perkara yang tengah ditangani tim ini ada 21 perkara. ■ RH

Berebut Status Bank Jangkar

Bank Indonesia meluncurkan ketentuan baru. Semua berebut posisi bank jangkar.

Cetak biru Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sudah rampung. Atas dasar itu, Bank Indonesia melakukan pembenahan perbankan nasional, baik menyangkut akuisisi maupun merger.

Belakangan ini Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah mempopularkan Peraturan Bank Indonesia (Nomor 7/2/PBI/2005) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sebenarnya Burhanuddin menandatangani PBI, 20 Januari 2005, namun baru sekarang dihebohkan oleh para bankir papan atas. Soalnya, mereka ingin memposisikan banknya masing-masing menjadi bank jangkar.

Setelah mengeluarkan peraturan tersebut, BI meminta

masing-masing bank membuat rencana bisnis sampai tahun 2007. Isinya, antara lain, mencakup upaya setiap bank untuk memenuhi kriteria bank kinerja baik (BKB). Kriteria ini sudah harus dicapai akhir tahun 2007.

Setiap bank yang punya rencana merger, BI menjanjikan insentif. Bahkan, BI bersedia mempertemukan bank yang berniat mengakuisisi dan bank yang ingin bermerger. Kriteria BKB, antara lain punya modal inti di atas Rp 100 miliar, sehat, rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) 10 persen, dan berperingkat baik dalam tata kelola.

Sejumlah ketentuan baru perbankan bermunculan terkait dengan rencana besar BI memperkuat dan merestrukturisasi

perbankan nasional. Ini tertuang dalam cetak biru API. Berdasarkan API, BI akan melakukan serangkaian merger dan akuisisi. Paling lama 15 tahun ke depan Indonesia, hanya punya dua sampai tiga bank bertaraf internasional, dengan modal minimal Rp 50 triliun.

Nantinya hanya tiga sampai lima bank nasional dengan modal Rp 10-50 triliun, serta 30-50 bank dengan modal antara Rp 100 miliar sampai Rp 10 triliun. Dengan demikian dari 132 bank yang ada saat ini, hanya tersisa maksimal 58 bank.

Di dalam ketentuan baru tersebut, modal inti bank umum minimal sebesar Rp 80 miliar sampai 31 Desember 2007. Saat ini, dari total 132 bank, sebanyak 50 bank masih bermodal di bawah Rp 100 miliar. Sebagian besar bahkan berada di bawah Rp 80 miliar.

Bank-bank yang bermodal di atas Rp 100 miliar pun masih banyak yang belum memenuhi kriteria BKB.

“Karena itu, kami meminta bank membuat rencana bisnis sampai tahun 2007,” kata Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia, Muliawan D Hadad, ke-



Sikap Bankir Papan Atas:

Achmad Fauzi, Presiden Direktur Bank IFI:

Optimistis bisa mencapai modal di atas Rp 100 miliar sebelum tahun 2007. Untuk mencapainya, Bank IFI, yang kini bermodal Rp 83 miliar, mengandalkan pertumbuhan organik atau peningkatan laba.

Agus Martowardoyo, Direktur Utama Bank Mandiri:

Optimistis bisa memenuhi kriteria bank jangkar sebelum tahun 2007. Mandiri, bank nasional terbesar, belum masuk kategori bank

jangkar karena masih memiliki rasio NPL neto di atas 5 persen.

Jos Luhukay, Presiden Direktur Bank Lippo:

Tantangan yang dihadapi untuk menjadi bank jangkar, mencapai LDR (rasio kredit terhadap dana masyarakat) di atas 50 persen. LDR Bank Lippo masih di bawah 50 persen. Rencana bisnis Bank Lippo, berupaya keras mendongkrak LDR. Modalnya, per Maret 2005, sekitar Rp 2,4 triliun. Tahun 2010, Bank Lippo ditargetkan punya modal di atas Rp 10 triliun. Karena itu butuh tambahan modal Rp 7,6 triliun.

Siswanto, Direktur BTN:

Penawaran saham perdana PT Bank Tabungan Negara (BTN) merupakan rencana bisnis jangka menengah. Dilakukan untuk memenuhi kriteria BKB dan mengejar status bank jangkar. Pada Maret 2005, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (LDR) BTN mencapai 75%, dan CAR sebesar 18%.

Peter B. Stok, Presiden Direktur Bank Niaga:

Dari dulu Bank Niaga sudah menyatakan diri ingin menjadi bank jangkar. Pros-

peknya menjadi lebih bagus setelah adanya dukungan penuh dari pemegang saham mayoritas, CAHB.

Sigit Pramono, Direktur Utama BNI:

Tahun depan BNI siap menjadi bank jangkar. Namun kepastiannya tergantung keputusan para pemegang saham. Mengacu posisinya per Desember 2004, BNI sudah memenuhi kriteria bank jangkar, tetapi tahun ini, berdasarkan kriteria NPL, kemungkinan BNI tidak bisa memenuhi kriteria bank jangkar. Sebab angka NPL-nya sudah

pada *Kompas* (14/7).

Ketentuan baru tersebut menetapkan sejumlah anak tangga yang harus dilalui setiap bank jika ingin tetap eksis. Bagi bank yang belum berkinerja baik, dalam rencana bisnisnya, wajib merinci upayanya untuk meningkatkan kinerja agar memenuhi kriteria BKB. Yang pokok, rencana penambahan modal atau merger dengan bank lain.

Bank-bank yang sudah memenuhi kriteria BKB diharapkan terus mempertahankan statusnya dan mengembangkan kegiatan usahanya sesuai fokus yang mereka tetapkan. Bank berkinerja baik mesti menapak anak tangga berikutnya untuk mencapai kriteria bank jangkar.

Untuk meraih status bank jangkar memang tak mudah. Bank-bank tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan; antara lain, perusahaannya terbuka, atau berencana segera *go public*, mampu menjadi konsolidator, kemudian secara teknis memenuhi syarat CAR minimal 12%, rasio modal inti minimal 6%, ROA minimal 1,5%, pertumbuhan kredit minimal 22%, LDR minimal 50%, dan NPL di bawah 5%. ■ HT, SH

mendekati 10%, gross sekitar 9%, tetapi neto masih sekitar 5%.

Glen Glenardi, Direktur Utama PT Bank Bukopin:

Bank Bukopin telah membentuk tim khusus untuk mengejar status bank jangkar. Persyaratan kuantitatif sudah dapat dipenuhi. Modal sudah mencapai Rp 1,3 triliun, misalnya, nilai maksimal NPL sebesar 5%. Posisi NPL-nya sudah di bawah 3%. Sudah rating GCG dan perusahaan publik. ■ HT, SH

Olahan berbagai sumber.

Privatisasi Tak Terelakkan

Meski defisit APBN-P 2005 menganga, pemerintah belum berencana melakukan privatisasi BUMN.

Boleh saja Meneg BUMN Sugiharto kelewat optimis. Dari kewajiban yang ditetapkan APBN-P2005, Rp 3,5 triliun, Sugiharto yakin bisa menyeter Rp 8,9 triliun yang berasal dari deviden. "Privatisasi belum perlu, walaupun itu mungkin dilakukan" kata Sugiharto.

Berdasarkan hasil RUPS sejumlah BUMN, pundi-pundi kementerian BUMN ini sudah mengantongi dividen sebesar Rp 11,1 triliun, atau Rp 2,2 triliun di atas target. Sesuai amanat APBN-P2005, Sugiharto tinggal mencari tambahan dana Rp 1,3 triliun. Pertamina saja diperikarakan menyumbang dividen Rp 6 triliun. Artinya, Sugiharto bisa meraih target tersebut dengan mudah.

Namun tak lama kemudian Sugiharto merasa gamang. Soalnya, tawarannya menggantikan setoran privatisasi dengan penerimaan dividen, ditolak mentah-mentah oleh pejabat yang lebih berwenang. Sugiharto mengatakan kepada

Suara Karya (19/7), pemerintah akan melepas 10 persen saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) tahun ini juga. Ini dilakukan sebagai bagian untuk memenuhi target privatisasi. Tentu untuk menutup defisit APBN-P2005.

Saham-saham milik pemerintah di sejumlah BUMN, antara lain Bank BNI, BTN, BRI, Aneka Tambang dan Jasa Marga akan dilepas. Usai rapat Tim Kebijakan Privatisasi di Jakarta (18/7), Sugiharto mengatakan BUMN yang mau diprivatisasi mulai dipresentasikan. Tak ada batasan berapa pemerintah mau menjual saham-sahamnya.

Agenda ADB

Koran Bisnis Indonesia (19/7) yang mengungkap mengapa Sugiharto akhirnya menyerah. Privatisasi ternyata terkait dengan agenda Bank Pembangunan Asia (ADB), yang meminta penyelesaian peraturan pemerintah (PP) tentang privatisasi BUMN, sebagai syarat untuk mencairkan pinjaman senilai 250 juta dolar AS (setara Rp 2,2 triliun). Pinjaman ini, seharusnya sudah dapat dicairkan akhir tahun 2004 lalu. Menkeu Jusuf Anwar dan Menko Perekonomian Aburizal Bakrie sudah mengingatkan Sugiharto, lewat surat, tentang rencana privatisasi yang belum dijalankannya.

Meski setengah hati, Sugiharto akhirnya menyatakan siap menjalankan keputusan tim. Ia akan bekerja untuk memenuhi target. Saat ini pemerintah menguasai 69,51% saham Bank Mandiri Tbk, 99,12% saham Bank Negara Indonesia Tbk, dan 59,01% saham Bank Rakyat Indonesia Tbk. Jika 30% saham BNI dilego 1,5 kali nilai buku (*price-to-book value*), pemerintah bakal mengantongi uang Rp 6,6 triliun. Sebaliknya, jika 10% saham Bank Mandiri dilepas, akan menambah kocek pemerintah sebesar Rp 2,8 triliun. Lalu, dari hasil penjualan 10% saham PGN, pemerintah bakal mengantongi sekitar Rp 1,14 triliun.

Cari Gas Alam

Sugiharto selalu dikejar target. Ia pun terbang ke Timur Tengah, mencari pasokan gas untuk mengatasi krisis gas di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), Nanggroe Aceh Darussalam. Sugiharto mengatakan pemerintah sudah membuat keputusan politik baru, yang menjamin kebutuhan gas alam PIM tetap berasal dari lapangan minyak dan gas ExxonMobil Oil Indonesia (EMOI), di Lhok Sukon, NAD. Jaminan itu berlaku minimal hingga tahun 2008, saat lapangan migas baru Blok A, di Aceh Timur, mulai berproduksi.

Pembelian gas alam dari Timur Tengah dimaksudkan untuk menggantikan kontrak ekspor gas alam produksi ExxonMobil yang sebelumnya sudah terlanjur ditandatangani dengan pembeli di luar negeri.

Karena merupakan keputusan politik, kata Sugiharto, pemerintah akan berjuang habis-habisan menjalankannya. Perjuangan Sugiharto ternyata didukung semua pihak.

"Pokoknya pasokan gas untuk PIM tidak boleh dihentikan. Kita juga memberikan kepastian ke pihak ExxonMobil," kata Sugiharto.

Berbeda dengan PIM, nasib PT Asean Aceh Fertilizer (AAF), perusahaan pupuk patungan negara-negara Asean, tidak beroperasi lagi dalam dua tahun terakhir karena ketiadaan pasokan bahan baku gas alam dari EMOI, belum menentu. Pada RUPS terbaru pertengahan Juli, Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura selaku pemilik 40% saham, telah memutuskan menjual seluruh saham-sahamnya. Akan tetapi Indonesia, pemilik 60% saham, tidak membelinya.

Direktur Produksi AAF Alita Ilyas mengatakan kepada *Investor Daily* (19/7), saat ini sulit bagi Indonesia membeli saham AAF. Pemerintah tak mampu membeli gas di pasar tunai seharga 8 dolar AS, sebab kemampuan maksimum pemerintah hanya 6 dolar AS per MMBTU.

Lalu, bagaimana masa depan AAF? Nasibnya ada di tangan PT Pusri, karena BUMN pupuk itulah yang dipercayakan pemerintah sebagai pemegang saham AAF. ■ HT, SH

Pemerintah membuka (kembali) kran ekspor rotan setengah jadi. Pengrajin rotan tanah air memprotes karena usahanya terancam bangkrut.

Jumat, 1 Juli 2005. Jarum jam tepat menunjuk pukul 09.25 pagi saat iring-iringan bis PO Sahabat jurusan Jakarta-Cirebon berhenti di muka gerbang Kantor Departemen Perdagangan di bilangan Ridwan Rais, Jakarta Pusat.

Tiga personil polisi telah berada di lokasi segera mengarahkan bis-bis itu ke lokasi parkir. Wajah-wajah lelah keluar dari bis-bis itu. Secarik kain putih terikat di kepala masing-masing.

Sembari berjalan menuju pintu gerbang yang sudah ditutup rapat, mereka membentangkan sejumlah spanduk dan poster, bertuliskan: "Pencabutan SK 355 Menyengsarakan Masyarakat Rotan Indonesia", "Ekspor Bahan Baku Rotan Sama Dengan Ciptakan Busung Lapar Baru", "Masyarakat Cirebon Menolak Ekspor Bahan Baku Rotan Dibuka Kembali".

Massa juga mengusung beberapa perangkat furnitur berbahan baku rotan, hasil karya tangan keluarga besar pengrajin rotan di Cirebon, yang tergabung dalam Masyarakat Pengrajin Rotan Indonesia (MPRI).

Massa pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 2000-an orang itu memprotes dan menentang pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M. Dag/PER/6/2005 tentang Izin Ekspor Rotan Setengah Jadi.

Mengapa peraturan yang ditandatangani Menteri Perdagangan (Mendag) Mari Elka Pangestu pada 30 Juni 2005 itu ditentang? Permendag 12/2005 itu 'menganulir' keputusan sebelumnya, yakni SK Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 355/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Ekspor Rotan. Permendag ini pada prinsipnya melarang ekspor rotan alam baik mentah maupun setengah jadi. Yang boleh diekspor hanya rotan budidaya.

Permendag, menurut juru bicara



pengunjuk rasa, akan memicu kenaikan harga jual rotan di tingkat konsumen dalam negeri. Dibukanya kembali kran ekspor rotan setengah jadi –sebagai konsekuensi keluarnya Permendag 12/2005— sangat membebani kalangan pengusaha furnitur berbahan baku rotan karena memicu kenaikan harga jual rotan untuk kebutuhan dalam negeri. Karena itu, MPRI meminta Mendag membatalkan Permendag 12/2005 itu.

Mengutip juru bicara MPRI, Badruddin Hambali, *Suara Karya* (3/7), menulis kebijakan pemerintah yang kembali memberikan izin ekspor rotan setengah jadi akan sangat menekan dan merugikan industri mebel dalam negeri.

MPRI mengkhawatirkan, pemberian izin itu akan berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku rotan untuk kebutuhan dalam negeri karena lebih banyak yang diekspor.

Dewasa ini, MPRI menunjuk contoh, pengrajin rotan di daerah Cirebon kesulitan meneruskan kegiatan usaha akibat berkurangnya pesanan.

Koran Tempo (5/7) menuliskan pendapat Ketua Umum Asosiasi Mebel In-

donesia (Asmindo), Soenoto, yang juga mengkhawatirkan hal serupa dengan MPRI mengenai dampak dari Permendag 12/2005 yaitu bahan baku rotan yang semakin sulit didapat.

Saat menerapkan kebijakan itu, kritik Soenoto, pemerintah tidak memberikan jaminan ketersediaan bahan baku rotan dalam negeri. Jika kondisi itu terus berlanjut, maka perlahan namun pasti industri mebel rotan dalam negeri akan mati. Keberadaan mereka akan digantikan oleh pengusaha mebel rotan dari Vietnam, Cina, dan Filipina.

Ironisnya, mereka memakai produk rotan setengah jadi asal Indonesia sendiri. Pengusaha dan pengrajin rotan di Cirebon saja sampai harus mencari bahan baku rotan ke Surabaya.

"Bila kekhawatiran saya itu terjadi, sulit dibayangkan bagaimana nasib sekitar 250 ribu tenaga kerja yang bergantung hidupnya di industri mebel rotan di Kabupaten Cirebon. Kalau industri mebel rotan Indonesia perlahan-lahan mati, mau di kemanakan mereka?" tandas Soenoto.

Tak aneh bila para pengusaha rotan



ATURAN IBU MENTERI

di Kota Udang itu memprotes keluarnya Permendag 12/2005. Simak saja penuturan salah seorang pengusaha rotan, Sunarto. Menyusul diberlakukannya izin ekspor rotan setengah jadi, banyak pengusaha yang memburu bahan baku sampai ke Surabaya dan membeli langsung ke pelabuhan.

Dia sendiri mengaku tidak lagi memproduksi mebel rotan karena sulit mendapatkan bahan baku. Demi menyambung 'nafas usaha', dia terpaksa beralih ke bahan baku lain, seperti eceng gondok dan pelepah pisang. "Pengalihan harus dilakukan. Jika tidak jauh-jauh hari kami sudah bangkrut!" ucapnya.

Direktur Eksekutif Asmindo Sae Tanangga Karim kepada **M. Subhan** dari *Berita Indonesia*, mengingatkan, profil ekspor rotan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Misalnya, selama periode 2002-2003, ada kenaikan sebesar 6,15 persen. Pada 2003-2004, nilai ekspor rotan sendiri memang mengalami ketimpangan dari sebelumnya 4,05 persen menjadi 3,78 persen.

Akan tetapi, pada 2004 terjadi lonjakan ekspor rotan sebesar 7,46 persen.

Untuk diingat, pada Mei 2004, pemerintah secara resmi memberlakukan SK 355/2004 yang membatasi atau melarang ekspor rotan.

"Artinya dengan adanya aturan tersebut (SK 355/2004, **red**) ekspor rotan terlihat sangat menggembirakan, dengan kenaikan mencapai 70 persen. Lantas, *kenapa* SK yang (justru) berhasil meningkatkan ekspor barang jadi *kok* sekarang malah dicabut?" ujar Angga dengan penuh tekanan.

"Permendag yang baru dikeluarkan (memang) intinya akan menggenjot ekspor barang setengah jadi. Tapi akibat yang ditimbulkannya akan memicu kekurangan bahan di dalam negeri."

Pada bagian lain, Angga juga mengkritik bahwa barang yang dibuka keran ekspornya lewat Permendag 12/2005 bukan barang yang mempunyai nilai tinggi sebab masih bersifat setengah jadi. Sebaliknya, melalui SK 355/2004, selama ini Indonesia sudah mampu mengekspor barang jadi yang memiliki nilai tambah (*added value*) tinggi.

Angga mengakui, menurut data, kebutuhan rotan dalam negeri sebesar

130.000 ton setiap tahun. Sementara, kemampuan produksi rotan dari hutan dan hutan tanaman industri dalam negeri sampai saat ini hanya 4.000 ton setiap bulan sehingga dengan demikian baru ada 48.000 ton bahan baku rotan setiap tahun.

"Kalau dari 48.000 ton bahan baku itu dialokasikan oleh Ibu Menteri (Mendag Mari Elka Pangestu) sebanyak 36.000 ton pertahun, maka bahan baku rotan yang tersedia (untuk dalam negeri) tinggal 12.000 ton. *Nah* itu habislah semua industri rotan kita saat ini," tegas Angga.

Nilai lebih seperti dikemukakan Angga senafas dengan pandangan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cirebon, Achsanudin Adi. Adi mengaku turut menyesalkan dibukanya keran ekspor rotan setengah jadi oleh pemerintah. Dibandingkan ekspor rotan setengah jadi keuntungan dari ekspor mebel rotan jauh lebih besar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Cirebon, setiap bulan bisa dihasilkan produk mebel rotan sebanyak 4500 ton.

Angka sebesar itu merupakan gambaran betapa pentingnya bahan baku rotan untuk industri mebel rotan Indonesia.

Masih kata Angga, menyertai fenomena itu, nilai lebih pada kebijakan lama adalah kemampuan dalam menyerap tenaga kerja yang sangat banyak di sektor industri mebel rotan.

Diingatkannya, produk rotan meliputi tiga hal: rotan poles, kulit rotan, dan hasil rotan. Jadi, apabila ada sebutan bahan baku, itu bukanlah bahan baku yang sebak-bakunya.

Bagaimana bisa disebut menyerap tenaga kerja bila yang produk rotan yang diekspor itu adalah rotan yang baru diolah hanya sekian persen saja. Dengan kata lain, penyerapan tenaga kerja belum terjadi kalau hanya untuk bahan baku yang belum diolah secara maksimal.

Disebut mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan memiliki nilai tinggi sebagai produk ekspor, Angga menjelaskan, apabila semua proses produksi satu produk mulai dari bahan baku sampai menjadi barang jadi bersentuhan dengan tangan tenaga kerja.

Apa argumentasi pemerintah mem-

buka kran ekspor rotan setengah jadi? Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pembukaan kran ekspor rotan setengah jadi dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara produksi dan kebutuhan.

“Banyak produk rotan yang tidak terserap di dalam negeri, akibatnya penghasil rotan di Sulawesi terpuruk.” Mereka juga ingin mendapatkan harga wajar. Faktor keseimbangan itulah yang menjadi pertimbangan (pemerintah),” ungkap Mendag, saat meninjau kerajinan di Jepara, Jawa Tengah, pada 4 Juli 2005. Jadi kebijakan ekspor rotan setengah jadi itu, menurutnya, tidak akan mengganggu industri kerajinan rotan.

Lagi pula, seperti dikutip *Bisnis Indonesia* (6/7), Mendag mengatakan, keputusan yang diambilnya, sebagaimana tersurat dalam Permendag 12/2005, didasarkan pada konsensus tiga menteri yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Kehutanan.

Karena itu, Mari Pangestu meminta Asmindo tidak mengkhawatirkan pemberian izin ekspor rotan setengah jadi tersebut. Mendag berjanji, kegiatan ekspor baru diizinkan apabila kebutuhan rotan alam setengah jadi di dalam negeri sendiri sudah terpenuhi.

Selain itu, katanya, ada syarat yang harus dipenuhi pengusaha yang ingin mengekspor rotan yakni memasukkan permohonan untuk mendapatkan kuota tersebut.

Masih menurut Mari, jika ekspor rotan dilarang, para pemungut rotan di Sulawesi dan Kalimantan akan kehilangan mata pencaharian akibat banyak produk rotan mereka yang menumpuk tidak tertampung.

Mari juga mengingatkan ekspor rotan setengah jadi juga dikenakan pajak ekspor sebesar 15 persen dan jumlah produksi rotan alam pun tidak mengganggu kelestarian alam.

Tapim, berseberangan pendapat dengan Mari, Dirjen Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian, Sakri Widhinato, justru meminta Mendag agar meninjau ulang kebijakannya. Sakri khawatir, hal ini akan menyebabkan kelangkaan pasokan rotan untuk pengrajin dalam negeri.

“Sebaiknya kembali ditutup saja. Walaupun menggunakan kuota, telah terjadi ketakutan kekurangan pasokan di kalangan pengrajin. Apalagi di kemudian hari bisa menyebabkan harga rotan dalam negeri naik sesuai dengan harga ekspor rotan,” tandas Sakri. ■ **RF,SB**

INDUSTRI MEBEL DI AMBANG KEMATIAN

Kebijakan Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, menerbitkan Permendag 12/2005) menuai protes dari MPRI dan pengusaha mebel di tanah air yang tergabung Asmindo.

Masalahnya, “Kebijakan pemerintah membuka kran ekspor rotan setengah jadi sangat merugikan industri mebel dalam negeri. Pemberian izin itu berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku rotan untuk kebutuhan dalam negeri karena lebih banyak yang diekspor,” ungkap Ir. Soenoto, Ketua Umum Asmindo, kepada wartawan *Berita Indonesia*, **M.Subhan**, dalam sebuah kesempatan, di Jakarta, pertengahan Juli lalu. Berikut petikan lengkap wawancara.

Sejauh apa dampak buruk konsekuensi dari Permendag No 12/2005 terhadap pangsa pasar untuk produk jadi dalam negeri?

Kalau kita memberi kekuatan kepada pasar kita, kita ketahui bersama bahwa pasar furniture dari Indonesia nyaris diekspor ke seluruh dunia. Hampir tidak satu benua pun yang terlewat oleh produk kita.

Dewasa ini, Cina juga telah menjadi eksportir terbesar furnitur bagi kebutuhan dunia. Karena itu, dampak terbesar yang kami rasakan adalah rusaknya pasar kita di dunia internasional karena telah dicaplok negara-negara eksportir lainnya, seperti Vietnam dan Filipina.

Selama ini, kita sudah bisa menguasai pasar yang kita telah bangun sekian lama tetapi dengan mudahnya pasar itu diserahkan kepada pesaing-pesaing kita. Jelas, itu satu kondisi baru yang sangat kami sayangkan. Dan, kondisi seperti dulu ini yang akan kami pertahankan.

Dampak yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah membengkaknya angka pengangguran. Ratusan ribu orang yang menggantungkan nasibnya di sektor industri ini akan menganggur. Dan ini akan menjadi suatu resiko yang tidak kecil.



Ir. Soenoto, Ketua Umum Asmindo

Ada fakta-fakta konkret yang bisa diceritakan akibat buruk dari Permendag 12/2005, misalnya dalam hal ketersediaan pasokan bahan baku rotan untuk kebutuhan dalam negeri?

Sekarang saja dampaknya sudah mulai terasa. Baru sebentar saja Permen-dag itu diteken bahan baku rotan sudah mulai berkurang, bahkan sudah ada kenaikan-kenaikan harga.

Setelah dikeluarkannya Permendag 12/2005, saya mendapatkan banyak laporan dari rekan-rekan pengusaha industri rotan di Cirebon. Mereka mengeluh karena sulit untuk mendapatkan bahan baku.

Jika selama ini untuk memperoleh bahan baku cukup di Cirebon, maka kini para pengusaha bahkan sampai-sampai harus ke Surabaya. Kalaupun tersedia, harga bahan baku telah menjulang tinggi.

Apakah ada hal sangat prinsip yang hilang dari semangat penerbitan Permendag 12/2005 itu?

Dalam SK itu tidak dicantumkan klausul atau ketentuan standar yang menekankan bahwa setiap eksportir harus memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri. Setelah itu baru boleh mengekspor bahan baku. Itu artinya pemerintah tidak memberikan jaminan kepada kami bahwa kebutuhan dalam negeri pasti dicukupi.

Bukankah pemerintah akan

membuat ketentuan dan batasan tentang jenis rotan yang boleh diekspor?

Saya tidak yakin aturan itu bisa berjalan efektif di lapangan. Sekalipun dipisahkan antara rotan hasil budidaya dan rotan hasil alam, tetap saja kedua jenis rotan tersebut bisa keluar dari Indonesia.

Apalagi petugas di lapangan belum tentu bisa membedakan antara rotan budi daya dan rotan alam. Apa mereka dibekali pengetahuan semacam itu?

Mengapa Asmindo dan masyarakat pengrajin rotan meminta Menteri Perdagangan agar mengundurkan diri?

Ada sejumlah alasan mengapa kami lantas mengusulkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengganti Menteri Perdagangan.

Alasan yang terpenting adalah karena Menteri Perdagangan lah yang paling besar perannya dalam melahirkan kebijakan (Permendag 12/2005) ini. Keputusan itu jelas ditandatangani oleh Menteri Perdagangan, bukan oleh Menteri Perindustrian dan/atau Menteri Kehutanan. Atas dasar itu lah, permintaan pengunduran diri itu kami arahkan kepada Menteri Perdagangan.

Apa langkah ke dalam yang akan ditempuh Asmindo sendiri dalam menyikapi masalah ini?

Kami akan terus berjuang dan memperjuangkan keinginan kami agar bisa menjembatani kepentingan anggota kami. Kami akan berusaha untuk meredakan berbagai eksekusi yang mungkin muncul akibat penerbitan Permendag 12/2005 itu. Termasuk, konsekuensinya, kami akan berjuang juga dengan cara politis, misalnya.

Bersamaan dengan itu, kami akan melakukan pembenahan-pembenahan secara internal agar kami sendiri tetap eksis dalam memperjuangkan nasib pengusaha dan pengrajin rotan.

Terakhir, apa yang ingin Asmindo sampaikan kepada pemerintah?

Kami mengajak, mari kita berpikir dan berbuat untuk membuat produk bernilai tambah (*added value*) yaitu dalam bentuk furniture. Jadi bukan semangat dan pikiran untuk menjual bahan bakunya.

Kami sekarang terus berjuang untuk menerobos untuk membuat nilai tambah berupa barang jadi yang punya nilai jual tinggi. ■



Sae Tanangga Karim
(Direktur Eksekutif Asmindo)

Asmindo sangat berkepentingan untuk menolak pemberlakuan Permendag No. 12/2005 yang membuka kran ekspor rotan setengah jadi. Selama ini, ekspor barang jadi berupa rotan cukup menjanjikan.

Dengan SK Memperindag 355 yang baru berumur 11 bulan yang dikeluarkan oleh Memperindag Rini Suwandi pada bulan Mei 2004, yang menutup kran ekspor bahan baku rotan cukup melegakan pengusaha rotan dan pengrajin rotan dalam negeri.

Bahkan, tercatat ada kenaikan berkisar 70 persen dari tahun sebelumnya. Dengan kondisi itu, kami sangat menyayangkan mengapa SK 355 dicabut dan diganti dengan peraturan baru yang membuka kembali kran ekspor bahan baku rotan setengah jadi.

Sebelum Permendag 12/2005 diterbitkan, kami dari Asmindo sudah bertemu dan berdialog dengan Ibu Menteri Perdagangan guna memberikan masukan.

Namun argumentasi yang kami kemukakan rupanya tidak dapat mencegah Permendag itu keluar. Ujung-ujungnya, kami sebagai Asosiasi merasa keberatan karena dengan dibukanya ekspor bahan setengah jadi itu akan berdampak terhadap ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Untuk diketahui, Asmindo memiliki 2016 anggota. Dari jumlah itu yang memproduksi rotan dan tersebar di seluruh Indonesia sekitar 2800 sampai 3000. dan mereka adalah selama ini telah menjadi eksportir dan pemegang lisensi. Meski sebagian belum terdaftar sebagai anggota Asmindo namun boleh dikatakan 90 persen adalah eksportir, dan itu adalah anggota Asmindo.

Kebutuhan rotan dalam negeri sebesar 130.000 ton pertahun. Sedangkan, kemampuan kita di Sulawesi untuk menghasilkan rotan sampai saat ini yang terealisasi 4.000 ton perbulan.

Kebutuhan itu memang bukan dipasok dari Sulawesi saja melainkan juga dari Kalimantan dan Sumatera.

Ibu Menteri Perdagangan mengatakan akan menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi para eksportir seperti keharusan menyuplai kebutuhan industri

dalam negeri.

Ini yang juga kami kritisi sebagai kelemahan dari Permendag itu. Permasalahannya, dalam Permendag itu tidak dicantumkan secara eksplisit klausul yang mensyaratkan setiap ETR untuk memasok dulu untuk kebutuhan dalam negeri sebelum bisa mengekspor ke luar negeri.

Memang Mendag selalu mengatakan itu, tapi tidak tertulis secara eksplisit di dalam Permen itu. Itu artinya tidak ada yang bisa jadi pegangan kita.

Selain itu, kami khawatir, aturan itu nanti potensial sekali menimbulkan praktik kolusi. Bukan tidak mustahil setiap batas minimum akan ada nilai yang diberikan untuk mendapatkan tender sebagai eksportir itu. Memang ada juga beredar rumors bahwa setiap pengeksportir akan menyeter Rp 50 juta sebagai kompensasinya.

Padaahal, untuk mengekspor harus tercatat sebagai ETR (Ekspor Terdaftar Rotan). Belum lagi harus mengurus izin ke Departemen Perdagangan. Ini bisa menciptakan sebuah birokrasi yang juga bernilai uang. Berapa lagi yang harus dikeluarkan pengusaha untuk mendapatkan ETR?

Salah satu alasan kami menolak Permendag 12/2005 terkait dengan nasib para tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya dari usaha ini.

Sekadar gambaran, dibukanya kembali izin ekspor bahan setengah jadi itu akan berdampak signifikan pada sekitar 500.000 tenaga kerja. Mereka terancam kehilangan pekerjaan. Sebab, pola ekspor bahan baku setengah jadi itu relatif belum sempat memakai tenaga kerja.

Lain halnya kalau ekspor barang jadi. Itu sudah pasti melalui proses yang dikerjakan oleh tangan-tangan putra bangsa ini. Kalau barang setengah jadi itu dikategorikan sudah mencapai katakana lah 80-90 persen dan tinggal *finishing* saja.

Dalam Permendag 12/2005 tidak dicantumkan spesifikasi bahan baku setengah jadi itu sejauh mana sudah disentuh oleh tangan tenaga kerja. Belum lagi kalau kita bicara dampaknya terhadap pihak-pihak lain yang terkait dengan proses produksi barang jadi, seperti perusahaan produsen cat, perusahaan produsen paku, dan lain sebagainya. Mereka tidak mempunyai pasar lagi untuk dipasok.

Dampak lain dari kebijakan ekspor bahan setengah jadi ini adalah akan terciptanya iklim pembelian yang monopolistik. Harga bahan baku rotan kita di luar negeri lebih gampang ditekan oleh pihak luar, karena mereka adalah pembeli tunggal.

Bila di kemudian hari industri rotan dalam negeri menjadi terkapar, sementara di lain pihak industri luar negeri berkibar, maka produsen rotan dalam negeri akan ditekan habis oleh pembeli. ■ **AF,SB**

Solusi Terbaik BBA

Dr Kurtubi

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) terjadi karena setiap tahun kebutuhan dalam negeri meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Sedangkan produksi minyak bumi menurun drastis dalam enam tahun terakhir.

Sekarang, tingkat konsumsi BBM jauh lebih besar dari kemampuan produksi dalam negeri. Akibatnya, kita mengimpor minyak mentah dan BBM olahan, juga dalam jumlah cukup besar. Itu terjadi justru ketika harga minyak mentah dunia melonjak sampai 60 dolar AS per barel. Karena itu, biaya pengadaan BBM untuk seluruh Indonesia juga melonjak. Sedangkan harga jual dalam negeri masih murah, jauh di bawah harga pasar internasional.

Kenyataan ini memaksa pemerintah membayar subsidi BBM yang sangat besar, bisa mencapai Rp 120 triliun per tahun. Keadaan ini terus berjalan selama kita tidak mampu meningkatkan produksi dan kapasitas kilang. Dari sisi pemasokan kita menghadapi dua masalah besar; menurunnya produksi selama enam tahun, dan kapasitas kilang yang tidak bertambah selama 12 tahun terakhir.

Jadi pemerintah harus meningkatkan produksi minyak mentah dan menambah kapasitas kilang, atau membangun kilang-kilang baru. Sekarang, kapasitas kilang harus ditingkat menjadi sekitar 1.400.000 barel per hari. Kapasitas yang ada hanya sekitar 1.050.000 b/h. Artinya, masih diperlukan 350.000 b/h. Ini baru kebutuhan di tahun 2005.

Mesti ada pembangunan kilang-kilang minyak baru yang punya kapasitas tiga kali dari kilang Balongan, Cirebon. Atau perlu dibangun tiga kilang baru masing-masing setara kapasitas kilang Balongan 100.000 b/h, agar Indonesia tidak mengimpor BBM olahan pada tingkat konsumsi tahun 2005. Sedangkan untuk lima sampai sepuluh tahun ke depan, tentu diperlukan lebih banyak kilang minyak.

Mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang lebih menarik di bidang perminyakan. Investasi untuk mencari cadangan minyak baru dan membangun kilang baru. Hanya dengan cara ini, pemerintah bisa swasembada di dalam pengadaan



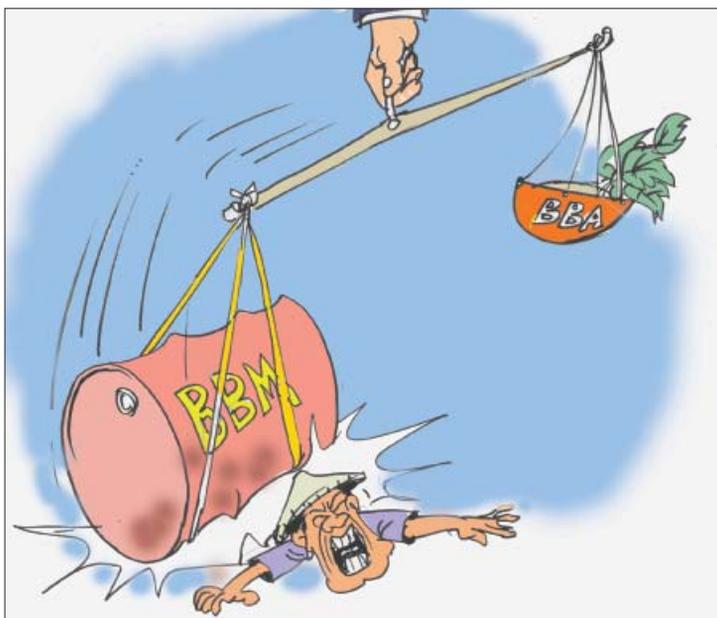
BBM. Ini mesti dilakukan untuk mengamankan kebutuhan tahun-tahun mendatang.

Namun dalam jangka panjang, Indonesia harus mengurangi ketergantungannya pada BBM, mengembangkan sumber-sumber energi alternatif. Misalnya, energi *bioetanol* bisa dihasilkan dari singkong atau tebu. *Bioetanol* bisa menjadi bahan bakar pengganti bensin. Atau bioetanol bisa dicampurkan dengan premium untuk menghasilkan bensin baru yang lebih bersih serta ramah lingkungan. Sedangkan energi *biodiesel* bisa diolah dari minyak kelapa, kelapa sawit atau biji jarak. *Biodiesel* bisa digunakan untuk menggantikan solar.

Selain mengurangi ketergantungan terhadap minyak, pengembangan sumber-sumber energi alternatif bisa menyerap tenaga kerja. Dan ini dikerjakan di pedesaan, karena singkong dan jarak ditanam di pedesaan. Dengan demikian,

ketersediaan sumber bahan bakar akan lebih terjamin untuk jangka panjang. Untuk itu pemerintah harus bisa menggalakkan investasi. Baik untuk cadangan minyak mentah, BBM olahan, maupun investasi untuk pengembangan sumber-sumber energi alternatif.

Kita melihat BPPT dan kalangan perguruan tinggi sudah banyak melakukan penelitian untuk menghasilkan energi alternatif. Baik *bioetanol* maupun *biodiesel*. Sebenarnya teknologinya sudah ada, sedangkan di dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu menjabarkannya secara jelas. Dengan demikian bisa dioperasionalkan dan di-



produksi secara besar-besaran.

Bila perlu, mereka yang mengembangkan sumber-sumber energi alternatif diberi insentif, misalnya, dalam masalah pajak dan kredit. Maksudnya, dalam jangka panjang agar energi *biodiesel* dan *bioetanol* bisa berkembang.

Dalam hal ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan Inpres atau Keppres. Yang perlu adalah mengamandemen UU Migas Nomor 22 tahun 2001. Sebab dalam UU tersebut dalam banyak hal menghambat investasi. UU itu perlu diamandemen agar investasi di bidang Migas dapat bergairah kembali.

Penulis: Chairman & Executive Director CPEES (Center for Petroleum & Energy Economics Studies).

Kapolri Jangan “Kencang” di Awal

Belum genap satu minggu setelah dilantik oleh Presiden SBY sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru, Jenderal (Pol) Sutanto langsung membuat gebrakan. Seluruh Kapolda diberi waktu sepekan untuk memberantas perjudian di daerah masing-masing.

Publik pun terkagum-kagum dan menyambut dengan antusias. Tapi, belakangan, antusiasme publik mengendor dan meragukan efektivitas dari gebrakan mantan Kalakhar Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.

Ternyata, fakta menunjukkan polisi hanya mampu men-jaring 1.257 tersangka dari 409 kasus perjudian di seluruh Indonesia. Yang ditangkap bukan bandar judi kelas kakap. *Test-case* awal Sutanto terbilang tidak memuaskan.

Dalam artikel opini berjudul “Sutanto Mampukah Benahi Polri?”, di harian *Kompas* (1/7), Ketua Presidium *Indonesia Police Watch*, Neta S. Pane, menilai bukan perkara mudah bagi Sutanto membenahi lembaga Polri, termasuk membangun kepercayaan publik bahwa polisi adalah manusia yang baik.

Alasannya? “Banyak aparat polisi keranjingan bertindak mengabaikan hukum (*disregarding the law*) dan cenderung berlaku tidak hormat terhadap hukum (*disrespecting the law*). Sikap kriminal dan korup menggerogoti polisi,” tulis Neta S. Pane.

“Perilaku ini sudah menghan-curkan semangat pelayanan yang seharusnya menjadi roh kepolisian. Selain itu, kini amat sulit mencari perwira Polri yang tidak memiliki hubungan emosional dengan para mafia kriminal (baca: bandar judi).”

Memang tak mudah mengukur berhasil-tidaknya seseorang memimpin Polri. Namun, menurut Neta, adanya komitmen di depan DPR saat tes kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) ditambah target dari Presiden, publik bisa menilai, apakah Kapolri berhasil atau gagal.

Saran Neta, Sutanto memberi kejutan dalam menyadarkan aparatnya. Tetapi kejutan ini membutuhkan mekanisme kontrol yang intensif dari seorang Kapolri.

Buruknya kinerja dan mental aparat Polri karena mekanisme kontrol di lembaga itu terlalu birokratis. Tugas Sutanto lah untuk mengefektifkan mekanisme kontrol itu.

Kontrak kerja

Strategi Sutanto untuk membenahi Polri dilakukan dengan menandatangani surat kontrak kerja dengan seluruh Kapolda. Dalam kontrak itu dicantumkan sejumlah target yang harus

dicapai setiap Kapolda, disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

Jika tidak dapat memenuhi sebagian besar target itu, si Kapolda harus siap-siap digantikan.

Namun, pada kolom “Sorotan Hukum” di *Sinar Harapan* (14/7), advokat Humphrey R. Djemat menilai, kontrak kerja itu relatif tidak mudah dijalankan oleh para Kapolda karena sejumlah faktor dan alasan. Ada kekuasaan-kekuasaan di luar institusi Polri, yang secara psikologis tidak bisa dilampaui seorang Kapolda.

“Kapolda mungkin tidak dapat memberantas perjudian atau *illegal logging* di daerahnya karena harus berhadapan dengan otoritas yang besar, seperti Panglima Kodam. Kasus seperti ini menuntut intervensi dari Kapolri, jika tidak ingin aparatnya baku tembak dengan aparat TNI yang berada di bawah komando

Pangdam,” tulis Ketua AAI (Asosiasi Advokat Indonesia) DKI Jakarta ini, dalam tulisan bertajuk “Kontrak dengan Kapolri Baru”, memberikan contoh.

“Ilustrasi kasus semacam ini mengisyaratkan, Kapolri tidak seharusnya terlalu percaya diri bahwa masalah perjudian atau *illegal logging* di daerah pasti bisa diselesaikan hanya dengan sepuuk kontrak kerja.”

Dia mengingatkan, selain dengan pejabat Polri di bawahnya, Sutanto telah membuat ‘kontrak’ dengan seluruh rakyat Indonesia, yakni saat memaparkan visi, misi, dan program dalam *fit and proper test* di hadapan Komisi III DPR-RI, sebelum terpilih sebagai Kapolri.

“Kapolri yang baru mesti konsisten dan konsekuen dengan janji dan komitmennya. Jangan seperti Kapolri sebelumnya, hanya kencang di awal tapi ujung-ujungnya terkontaminasi oleh lingkungan yang tidak bersih!” tandas Humphrey Djemat.

Pengajar pascasarjana UI, Kas-torius Sinaga, berpendapat rendahnya kinerja dan profesionalitas Polri akibat dari berbagai masalah internal manajemen Polri sendiri.

“Manajemen Polri boleh dikata kacau-balau bila diukur dari prinsip-prinsip organisasi modern. Ia amat sentralistik, superbirokratis, tidak transparan, dan kurang akuntabel,” tulis Kastorius dalam opininya berjudul “Revitalisasi Polri”, yang diangkat *Kompas* (13/7).

Revitalisasi Polri tidak segampang membalik telapak tangan, lanjut Kastorius, tapi citra dan kepercayaan publik kepada Polri dapat ditingkatkan dengan figur kepemimpinan yang tegas, bersih, dan konsisten. Figur Sutanto memberikan harapan akan revitalisasi Polri ke depan. ■ **af**



Simalakama BBM

Polemik terus bergulir di tengah-tengah krisis BBM yang berkepanjangan. Selain BBM, masih ada sejumlah masalah yang patut jadi perhatian, yaitu perjudian, perdamaian di NAD, flu burung, Ahmadiyah, dan bunuh diri di kalangan siswa miskin.

Topik-topik tersebut diulas surat kabar harian *Kompas*, *Suara Pembaruan*, *Media Indonesia*, *Bisnis Indonesia*, *Investor Daily*, *Suara Karya* dan *Koran Tempo* di dalam tajuk rencana mereka.

Kepanikan pemerintah menghadapi krisis BBM masih mendominasi pemberitaan dan tajuk rencana berbagai media massa cetak, baik di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya.

Tiga koran terkemuka Jakarta, *Kompas* (20/7), *Suara Pembaruan* (19/7) dan *Media Indonesia* (12/7), menyorot krisis BBM dari berbagai sudut pandang.

Tajuk *Kompas* yang berjudul “Mengelola Fiskal”, mencermati, krisis BBM menempatkan kemampuan fiskal pemerintah pada kondisi yang sangat sulit. Subsidi BBM yang meningkat tidak mampu ditopang oleh APBN.

Naiknya harga minyak mentah dunia sampai 60 dolar AS per barel, memaksa pemerintah menanggung subsidi BBM sekitar Rp 150 triliun sampai akhir tahun ini. Setiap kenaikan harga minyak 1 dolar, pemerintah menanggung defisit Rp 150 sampai Rp 300 miliar.

Harian yang menempatkan tajuknya di halaman 6 ini meragukan kebijakan menaikkan pajak penjualan kendaraan dan pajak mobil ketiga berdampak berarti pada pola konsumsi BBM.

Koran bermotto “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini menyarankan jalan klasik: menaikkan harga BBM dalam negeri, karena hanya cara ini yang bisa me-

nyelamatkan fiskal.

Namun *Suara Pembaruan* (19/7), di dalam tajuknya “Harga BBM Naik Lagi?”, memberi isyarat dini, menaikkan harga BBM akan merugikan masyarakat karena daya beli yang rendah. Apalagi, masyarakat belum sepenuhnya bisa menerima kenaikan harga BBM pada 1 Maret 2005.

Lepas dari itu, *SP* berharap menaikkan harga BBM adalah opsi paling akhir setelah memperhitungkan dampaknya secara cermat. Esensi penyelesaian: menghemat BBM.

Koran berpengaruh lainnya, *Media Indonesia* (14/7), dalam tajuk di halaman satu, “Televisi dan BBM”, menyorot krisis dan penghematan BBM dari sudut pandang berbeda.

MI mengkritik tajam kebijakan pembatasan jam tayang televisi oleh pemerintah lewat Inpres 10/2005. Mempertanyakan hubungan acara televisi dan stelan jas dengan penghematan BBM, koran bermotto “Pembawa Suara Rakyat” ini menilai pemerintah lari dari persoalan pokok.

Sebab yang memboros BBM bukan televisi, tetapi kendaraan bermotor. Inpres itu sama sekali tidak menyentuh sektor paling boros pada BBM: kendaraan roda dua dan roda empat.

Televisi bukanlah penyumbang berarti bagi pemborosan BBM. Kerugian masyarakat karena sulit mengakses informasi jauh lebih besar ketimbang penghematan beberapa liter BBM. Karena informasi merupakan sumber kecerdasan.

Penghematan terletak pada dua perkara pokok: Harga dan regulasi kendaraan bermotor, dan opsi menaikkan harga BBM untuk meniadakan subsidi atau mengatur volume kendaraan bermotor.

Koran yang menempatkan rubrik editorialnya di halaman satu ini menutup pendapatnya dengan sindiran tajam: “Bila pejabat *bobo*, informasi juga disuruh *bobo*. Aneh bin ajaib, gatal di mana garuk di mana.”

Tajuk berjudul “Tragedi Fifi Tragedi Kaum Miskin” diangkat koran ini pada edisi 18 Juli 2005. *MI* menilai, tindakan bunuh diri dari seorang siswa kelas 2 SMP Negeri 10 Bekasi, Fifi Kusri (14) ber-



kaitan erat dengan kemiskinan.

Dia nekat gantung diri (15/7) lantaran malu menunggak uang sekolah hampir Rp 300.000. Dan, yang membuatnya memilih jalan kematian karena ejekan kawan-kawannya, Fifi anak tukang bubur.

Jika benar itu alasan Fifi mengakhiri hidupnya ini sungguh persoalan yang amat serius. Karena anak-anak sekolah, tidak tahu bagaimana menghargai mereka yang mencari nafkah secara halal.

“Para guru, orang tua dan kita semua ikut bertanggung jawab atas cara pandang siswa yang sempit seperti itu,” tulis *MI*.

Sementara itu, tajuk *Bisnis Indonesia* (21/7) meragukan gebrakan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto untuk memberantas perjudian dalam tempo hanya sepekan.

Buktinya, sudah lewat batas waktu tujuh hari, polisi hanya mampu menjangkau 1.257 tersangka dari 409 kasus perjudian di seluruh Indonesia.

Tak seorang pun di antara yang ditangkap berkategori penjudi kelas kakap. Polisi berdalih, penangkapan harus berdasarkan aturan hukum, memenuhi tiga unsur: pelaku, alat perjudian, dan taruhan. Kalau begitu, jangan berharap para penjudi kelas kakap bisa ditangkap.

Tajuk Lain

Kedaulatan Rakyat:

Tahun ajaran mendapat perhatian utama dari koran yang terbit di koya Yogyakarta ini. “Selamat Datang Siswa Baru”, demikian judul tajuk *KR* (19/7).

Tahun ajaran baru memberi beban baru bagi para orang tua murid. Murid jadi sapi perahan yang harus tunduk, tidak hanya membayar sumbangan untuk sekolah, tetapi juga seperangkat pakaian seragam.

Biaya pendidikan yang ditarik menjadi terasa sangat membebani apabila dilakukan dengan kesewenangan. Tanpa dibicarakan dulu dengan Komite Sekolah dan perwakilan para murid.

Posisi kesewenangan pengaturan dari tingkat dasar sampai menengah atas, sejak berlakunya otonomi daerah, berada di tangan Dinas Pendidikan. Mendiknas telah mengeluarkan ketetapan Standardisasi Biaya Pendidikan Nasional. Kita menunggu realisasinya dengan harap-harap cemas.

Mengakhiri tajuknya, *BI* menyarankan beberapa hal: operasi pemberantasan judi tidak boleh berhenti, kesejahteraan polisi harus ditingkatkan, dan perlu dipikirkan melokalisasi perjudian, seperti yang diterapkan pemerintah Malaysia.

Suara Karya (18/7), dalam tajuknya “Selamat Datang Damai di NAD”, menerima baik nota perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia. Tapi, bagi koran milik *Partai Golkar* ini, perjanjian itu tidak mudah diimplementasikan di lapangan.

Di satu sisi, misalnya, pembubaran GAM, penyerahan senjata GAM dan pemulihan hak para anggota GAM. Di sisi lain, penarikan bertahap pasukan non-organik TNI dari wilayah ‘Serambi Mekah’.

Perlu Dialog

Penyerbuan dan kekerasan yang terjadi di Kampus Mubarak, markas Jemaat Ahmadiyah Indonesia, di Parung, Bogor (15/7), menjadi fokus perhatian *Koran Tempo* (18/7).

Dengan editorial “Setelah Ahmadiyah Diserbu”, harian ini menilai kelompok penyerbu yang berkostum islami sesungguhnya sedang menciderai ajaran

Islam, apalagi dilakukan terhadap kelompok Islam yang lain.

Ahmadiyah sama-sama percaya kepada Allah SWT, Nabi Muhammad, Al Quran dan Hadist. Gerakan ini tersebar di 178 negara, dianut 200 juta orang, di antaranya 10 juta di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Gerakan Ahmadiyah, yang masuk ke Indonesia tahun 1935, bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. “Yang berbeda, kelompok ini mengakui Ahmad Ghulam sebagai nabi terakhir, bukan Muhammad,” tulis *KT*.

Koran yang diterbitkan penerbit majalah *Tempo* ini menyayangkan keluarnya fatwa MUI Bogor, sehari sebelum penyerbuan; yang memberi Ahmadiyah cap sebagai aliran sesat.

Merebaknya isu flu burung (*avian influenza*) yang menimbulkan tiga korban pertama di Indonesia menjadi perhatian utama *Investor Daily*. Di dalam tajuknya (21/7), harian ekonomi ini mengkritisi masih belum jelasnya dari mana sumber penyakit mematikan itu, padahal sudah dipastikan sebagai faktor penyebab kematian Iwan Siswara Rafei (38) serta dua putrinya Sabrina Nurul Azizah (8) dan Thalita Nurul Azizah (1).

Kematian tiga warga Kabupaten Tangerang, Banten, itu menebarkan teror curiga di tengah masyarakat. ■ **SH**

Bali Post:

Koran yang terbit di Denpasar ini menyorot titik lemah pemerintah dalam mengendalikan tata ruang di Bali, daerah yang menjadi pusat pariwisata domestik dan mancanegara.

“Selama ini belum ada sanksi jelas bilamana terjadi pelanggaran tata ruang,” tulis BP di dalam tajuknya (18/7).

Sebenarnya, rusaknya tata ruang di Bali tidak perlu dicemaskan sebab Bali sudah punya konsep pengaturan tata ruang yang berusia berabad-abad. Yang jadi persoalan, penerapannya yang menyimpang.

Sangat pantas ditolak bila investor dari luar tidak peduli dengan tata ruang Bali. Sayangnya, pemerintah selama ini tutup mata. Padahal kunci pengendalian ada di pemerintah. Ada kekhawatiran, lemahnya pengawasan karena adanya perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha.

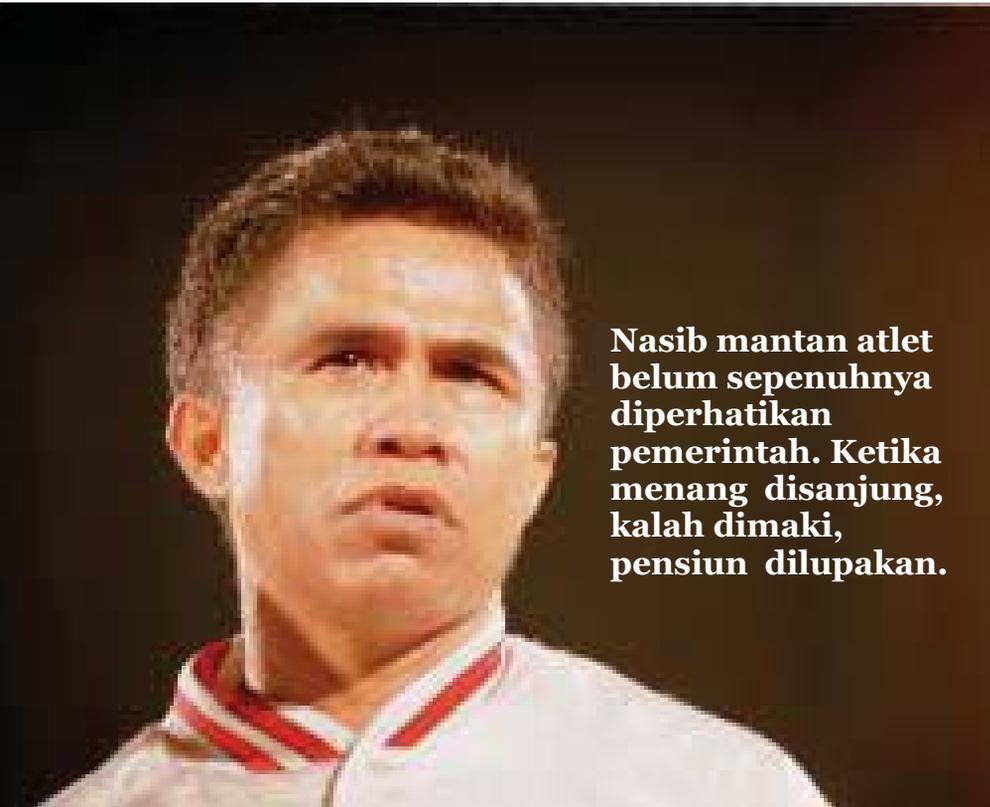
Pikiran Rakyat:

Tajuk rencana (16/7) koran yang terbit di Bandung ini menyorot aksi-aksi menentang Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo. Ada dua tuduhan yang menimpa Arroyo. Pertama, sebuah rekaman pembicaraan yang mengindikasikan Arroyo ikut merekayasa jumlah suara pemilihan presiden. Kedua, keluarga dan suami Arroyo menerima uang dari bandar judi.

Awalnya, desakan pihak oposisi mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk mantan Presiden Qory Aquino dan gereja Katolik. Arroyo hampir di pinggir jurang. Tapi belakangan pihak gereja mengendor, menyerahkan pada proses hukum.

Agaknya, perubahan sikap Gereja karena tak ingin mengulang pengalaman terdahulu, terjadi kekerasan menjelang kejatuhan rezim Ferdinand Marcos. ■ **SH**

Belajar dari Kasus Ellyas Pical



Nasib mantan atlet belum sepenuhnya diperhatikan pemerintah. Ketika menang disanjung, kalah dimaki, pensiun dilupakan.

Senyum khas Ellyas Pical setiap kali berhasil mengandaskan lawan-lawannya di atas ring pada medio 1980-an, kini tinggal kenangan.

Setelah tertangkap tangan menguasai tiga butir pil ekstasi, di Dikotek Mille's, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (13/7) pukul 00.30 WIB, mantan petinju juara dunia yang biasa dipanggil Elly Pical ini terlihat bergerak memasuki ruang pemeriksaan Polda Metro Jaya (14/7). Ia terus saja menutupi wajahnya dari kilatan kamera wartawan foto dan televisi. Ketika dicecar pun dengan pertanyaan singkat ia tak jua mau melayani.

Nama Elly Pical sangat melegenda di tanah air karena dialah petinju Indonesia pertama yang berhasil menyandang gelar juara dunia tinju. Prestasi itu dia ukir di Jakarta 8 Mei 1985, setelah menganvaskan petinju Korea Selatan, Judo Chun. Ia merebut gelar juara dunia tinju kelas bantam junior versi IBF.

Tragis

Begitu tertangkap tangan, wajah dan kisah nyong Ambon kelahiran Saparua 24

STEFFI GRAF KEMBALI TAMPIL

Penggemar bintang tenis dunia Steffi Graf boleh lega menyaksikan bintang pujaannya kembali berlaga mengayun raket. Tapi kemunculannya tentu tak lagi seperti dulu.

Peraih 107 gelar juara tenis tunggal putri itu, 22 di antaranya gelar juara tunggal putri *grand slam*, sejak Agustus 1999 sudah mundur dari dunia tenis saat peringkatnya masih tiga besar dunia.

Kompas (13/7) menulis, istri Andre Agassi petenis putra asal Amerika Serikat ini dalam wawancara pertelepon dengan wartawan kantor berita *Associate Press* Senin (11/7), mengatakan, ia telah kembali menggenggam raket dan memperkuat Houston Wrangler untuk Liga Tim Tenis Dunia (WTT).

Liga tenis WTT terdiri dari 12 tim, setelah bermain selama tiga pekan, yang berakhir 24 Juli, dua teratas dari



dua pul akan kembali bertanding di final, yang berlangsung pada 16-17 September di Sacramento, AS.

Petenis putri asal Jerman ini mengaku adalah sulit untuk mengatakan telah kembali lagi ke lapangan. Apalagi telah banyak yang berubah pada diri wanita berusia 36 tahun yang sudah memiliki dua orang anak ini. Ia mengatakan pula, terlalu awal menyebutkan akan tampil lagi terlebih dikaitkan dengan jadwalnya yang begitu ketat.

Graf melahirkan anak pertama, lelaki,

dua tahun setelah berhenti main tenis. Dua tahun kemudian ia melahirkan anak kedua, kali ini perempuan.

Graf menyebutkan, waktu menjadi faktor yang paling menentukan dalam karir dan kehidupannya. Pada beberapa tahun pertama usai pensiun, misalnya, adalah tidak mudah baginya merasakan jarang bermain tenis apalagi jika suaminya ikut tur. "Adalah satu tantangan untuk tetap berada dalam kondisi fit," ujarnya.

Graf menyatakan tidak mudah memadukan tugasnya sebagai seorang ibu, tugas kemanusiaan, serta latihan tenis sekaligus. "Tahun ini saya baru beberapa kali mengangkat raket, ketimbang lima tahun yang lalu. Saya latihan baru dua pekan terakhir. Jadi, jangan heran kalau saya cukup gugup dan sekaligus begitu antusias," kata Graf.

Graf tentu tak akan mampu tampil seperti dulu. Seperti diakuiya kepada AP, "Bagaimana mungkin saya bisa seperti dulu." ■ HT

Maret 1957, ini sekonyong-konyong mengisi seluruh media massa cetak maupun elektronik.

Banyak tulisan seolah memojokkan perilaku Elly yang mau saja terjun ke dunia malam. Atau, media menunjukkan keprihatinan yang mendalam atas ke-luguan pemilik telinga yang kurang sempurna berfungsi sebab sering terlalu dalam menyelam laut mencari mutiara, di kampung halamannya ketika masih anak-anak demi membantu nafkah keluarga. Romantisme menggenggam gelar juara dunia yang bergemilang uang dan sanjungan, juga ikut diangkat media.

Ada juga media yang mencoba melihat posisi hukum Elly. *Media Indonesia*, misalnya, mengutip pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Tjiptono, menuliskan, adalah Lisdianah, karyawan Mile's, yang menawarkan tiga butir ekstasi ke petugas yang sedang menyamar sebagai pembeli, dengan harga Rp 100 ribu perbutir. Dan selanjutnya, Lisdianahlah yang mengaku pil itu sebagai milik Elly. Petugas kemudian menggelandang Elly, bersama Lisdianah, ke markas Polda Metro Jaya dengan sangkaan melanggar pasal 62 UU Psikotropika.

Gugah Kesadaran

'Naiknya' kembali nama Elly Pical dimanfaatkan pula untuk secara serius menggugah kesadaran bersama akan nasib dan masa depan para atlet yang, ketika berjaya pernah memiliki nama harum di forum olahraga nasional dan



internasional.

Bukan hanya atlet semacam Elly Pical, yang selain lugu juga hanya lulusan kelas V SD. Tulisan tentang nasib mantan pebulutangkis dunia, seperti Tati Sumirah, turut muncul ke permukaan.

Berita Kota (18/7), misalnya, menurunkan tulisan tentang Tati Sumirah.

Tati adalah pebulutangkis putri Indonesia yang, bersama Imelda Wiguna Kurniawan, Utami Dewi, Theresia Widiastuti, Regina Masli, dan Minarni (Alm) tahun 1975 berjaya memenangkan Indonesia untuk pertamakali merebut Piala Uber dari tangan Jepang. Indonesia sekaligus berhasil mengubur keperkasaan Jepang yang sebelumnya seolah legenda berkuasa tanpa lawan berarti.

Tati di masa tua sehari-hari bekerja menjaga sebuah apotek, serta menjual jasa permainan playstation untuk anak-anak di rumahnya. Karena itu, begitu memperoleh hadiah sepeda motor dari panitia penyelenggara duel para legenda bulutangkis dunia, di Jakarta pertengahan Juli, kesukaan Tati tak lagi berbilang haru.

Masa depan Elly sesungguhnya akan terangkat. Seorang produser acara televisi, HB Neveen, berniat menggelar tayangan *reality show* bertajuk *The Next Great Champ*, yang menceritakan kisah keperkasaan Ellyas Pical sebagai pelatih tinju. Sasarannya, kisah "Sang Legenda Hidup Tinju Indonesia" ini bisa menularkan semangat juangnya kepada petinju muda Indonesia. Tapi episode itu agaknya harus tertunda akibat tiga butir pil. ■ SB

STADION JEBOL PENONTON TEWAS

Kapasitasnya hanya 50.000 penonton namun disesaki 80.000 orang. Akibatnya fatal, stadion jebol. Seorang Aremania tewas.

Karena Panitia Pelaksana pertandingan lanjutan Liga Djarum Indonesia 2005 kurang siap mengantisipasi lonjakan penonton, Fajar Lidia Nugraha (17) meninggal dunia terinjak-injak. Padahal ia hendak menonton pertandingan sepakbola Arema Malang melawan Persija Jakarta, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Rabu (13/7).

Pertandingan disaksikan 80.000 penonton, jauh melebihi kapasitas yang hanya 50.000 orang. Lintasan atletik yang seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk menonton, sore itu dipadati *Aremania*. *The Jackmania*, atau pendukung Persija hadir hanya berkekuatan 200 orang.

Setelah 10 menit pertandingan dimulai masih saja banyak penonton bertiket di luar stadion. Mereka tidak bisa masuk karena pintu sudah ditutup. Namun penjualan tiket di

loket maupun oleh para calo masih saja terus berjalan. Seluruh pintu masuk stadion akhirnya dijebol penonton.

Kompas (14/7), mengutip pernyataan seorang saksi mata, Yanuar (29), menjelaskan peristiwa diawali jebolnya pagar pembatas stadion akibat desakan penonton. Di pintu terjadi penonton saling dorong memaksa masuk sehingga ada tekanan dari belakang. Akibatnya sejumlah penonton di tribun selatan terjun dari ketinggian dua meter.

Fajar meninggal akibat desakan penonton yang mendobrak pintu stadion di sisi selatan tribun VIP. Selain dia, terdapat 15 korban luka-luka lain dirawat di RSUD Kepanjen, dan satu korban gegar otak Imam Rohman dirawat di RSI Gondanglegi.

Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) menyalahkan Panitia Pelaksana pertandingan. Panitia dinilai tidak dapat mengatasi lonjakan jumlah penonton.

"Kejadian ini adalah hal yang serius.

Harus diperhatikan bahwa faktor keamanan tidak boleh dikorbankan demi meraih pendapatan dalam jumlah besar," kata Sekjen AFC Dato Peter Vellapan, sebagaimana ditulis *Kompas* (16/7) yang mengutip dari kantor berita AP (15/7).

Melalui sepucuk surat yang disampaikan lewat faksimili, pengurus Arema Malang menjelaskan pihaknya menjual jumlah tiket pertandingan kurang dari kapasitas stadion. Hal ini dilakukan untuk menghindari melonjaknya jumlah penonton.

Namun upaya untuk menciptakan keamanan, diantaranya menghadirkan 800 personel keamanan, tidak mendapat dukungan dari sebagian penonton sehingga ada penonton yang jatuh ke parit dan luka-luka.

"Kami menganggap kejadian itu semata-mata musibah," bunyi pernyataan yang ditandatangani oleh Taufan, Humas Arema Malang.

Arema ketika itu berhasil mengalahkan Persija 1-0, hasil gol tunggal penyerang asal Kamerun Emaleu Serge. ■ HT

Soe Hok Gie, sosok seorang anak muda angkatan 1966 difilmkan dan menjadi simbol semangat anak muda masa kini.

Sama seperti Che Guevara yang wajah dan namanya tertempel di kaos, buku, dan segala macam pernak khas anak muda di seluruh dunia, Soe Hok Gie mulai menjadi ikon. Meski ia tidak *go international* seperti Guevara dan jadi panutan anak muda seluruh dunia, namun sosok Gie juga simbol perjuangan di zamannya.

Soe Hok Gie, seorang tokoh muda revolusioner di tahun 1966, di mana Indonesia tengah dalam kemelut krisis akibat korupsi, inflasi dan rongrongan komunis. Perjuangannya sekaligus kegelisahannya memandang kemelut bangsa ini mengilhami sutradara muda Riri Riza (35) dan produser Mira Lesmana (41) untuk memvisualisasikannya dalam sebuah film.

Berbagai ulasan menarik dilaporkan media massa tentang film ini, diantaranya harian *Kompas* (Jumat, 5 Juli 2005), *Koran Tempo* (Minggu, 10 Juli 2005), majalah *Gatra* No. 36 (23 Juli 2005) dan majalah *Tempo* (17 Juli 2005).

Film berjudul Gie itu, ditulis *Gatra*, menyinggung periode penting sejarah bangsa ini seputar 1966, ketika Presiden Soekarno dijatuhkan oleh mahasiswa yang salah satunya adalah Soe Hok Gie.

Tak banyak generasi sekarang yang mengenal Soe Hok Gie. Meski beberapa buku tentang tokoh ini pernah diterbitkan, bahkan buku hariannya dibukukan dengan judul "Catatan Harian Seorang Demonstran." Riri Riza memperkenalkan tokoh ini kepada penonton Indonesia, yang mayoritas anak-anak muda, dengan tegas.

Film ini menampilkan sosok seorang pemuda kritis keturunan Cina— adik kandung pengamat politik Arief Budiman— yang terus menerus gelisah dan menuliskan kegelisahannya sejak SMP sampai menjadi mahasiswa. Perhatian utamanya senantiasa pada kesewenang-wenangan. Gie selalu mencatat dinamika zaman, demikian ujar Riri kepada *Tempo* yang mengulasnya mendalam dalam rubrik Selingan Layarnya.

Ikon Baru Seorang DEMONSTRAN



Dan itulah yang paling menarik dari Gie. Meski demikian, film ini bukan seratus persen film dokumenter atau biografi.

Sosok Soe Hok Gie dimainkan oleh Nicholas Saputra, yang melambung lewat film layar lebar "Ada Apa dengan Cinta." Memang ada sedikit pertanyaan ketika Nico, panggilan Nicholas, dipilih. *Tempo* menulis, kesannya film ini menjadi agak 'berjualan.' Namun, Riri dan Mira berkilah, mereka sudah setengah mati mencari calon pemeran Gie, bahkan sampai ke Glodok. Tetapi sulit mencari yang bisa berakting. Pada akhirnya, Nico dipilih karena penekanan pada kemampuan berakting dengan wajar, bukan sekedar kemiripan wajah.

Memberi inspirasi

Sebelum film itu beredar, sejumlah penerbit ramai-ramai mencetak ulang buku-buku tentang Soe Hok Gie. "Catatan Seorang Demonstran" yang terbit pertama kali 1983 oleh LP3ES telah dicetak ulang tujuh kali dalam sepuluh tahun. Buku ini berisi catatan harian Gie sejak 4 Maret 1957 sampai 8 Desember 1969, yang menggambarkan sepak terjangnya

dalam politik Indonesia saat itu, juga pikiran-pikirannya tentang kemanusiaan, hidup, cinta dan kematian.

Bentang Budaya Yogyakarta sempat menerbitkan kumpulan esai Gie "Zaman Peralihan" (1995), "Di Bawah Lentera Merah, Riwayat Sarekat Islam Semarang 1917-1920" (2005) yang merupakan skripsi sarjana muda Gie di Fakultas Sastra UI, dan "Orang-orang di Perimpangan Kiri Jalan" (1969) yang adalah skripsi sarjana Gie.

Penerbit Grafiti menerbitkan "Soe Hok Gie: Pergulatan Intelektual Melawan Tirani" (2001) yang ditulis John Maxwell. Mapala UI, lembaga yang ikut dibidani Gie karena kecintaannya pada alam — ia adalah mahasiswa UI yang senang mendaki gunung — menerbitkan dua buku: "30 Tahun Mengenang Soe Hok Gie" (1999) dan "Jejak Kampus di Jalan Alam" (2005).

Membuat film dengan latar belakang sosok-sosok nyata, memang memiliki tantangan berlipat ganda dibanding film-film fiksi. Riri harus bekerja keras meriset semua data dengan serius selama empat tahun.

Tragis. Tanggal 16 Desember 1969, Soe Hok Gie mati di puncak Semeru, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Ia selalu melahirkan kontroversi, ketika hidup maupun setelah mati. Namun sosoknya yang jujur, keras, gigih dan nasionalis seperti terpancar dalam film dan buku-bukunya memang harus dihidupkan kembali untuk memberi inspirasi bagi generasi masa kini. ■ RH



Gamelan di Panggung Global

Bunyi tetabuhan asli Indonesia itu kini dipadu dengan jazz swing Spanyol, musik Bollywood India dan lesno Serbia.

Empat lelaki bule di atas panggung. Mereka meniup terompet ditingkahi bunyi reyong, kendang dan gong. Para penari di depan mereka dengan lincah menghentak kaki mempertunjukkan *tap dance* yang dinamis dan ritmis. Selain *tap dance*, musik yang rancak itu juga mengiringi tari kontemporer dan *hip-hop*.

Itu hanyalah salah satu gambaran betapa gamelan telah mendunia. Terbukti saat diselenggarakannya Festival Gamelan Yogyakarta (FGY) ke-10 di Taman Budaya Yogyakarta, tanggal 5-9 Juli 2005.

Majalah *Tempo* edisi 24 Juli 2005 dan harian *Republika*, Minggu, 24 Juli 2005 menyetengahkan laporan mengenai festival ini. Festival kali ini, menurut kedua media tersebut, pesertanya terus bertam-

bah dari tahun ke tahun. Festival kali ini diikuti 19 kelompok peserta. Enam dari luar negeri, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, Perancis dan Selandia Baru.

Menurut ketua panitia FGY, Sapto Raharjo, lebih dari 31 negara mengenal gamelan. Bahkan ada festival gamelan yang diselenggarakan pihak asing seperti World Gamelan Festival di Kanada.

Acara tahun ini bertema *Dasa Warsa YGF*. Diharapkan, festival ini bisa disejajarkan dengan festival musik tingkat dunia. Untuk mewujudkan cita-cita itu, Sapto membuat *grand design* YGF untuk 10 tahun mendatang sampai 2015, yang merupakan hasil perenungan dan evaluasi selama 10 tahun festival itu digelar. *Grand design* itu dijabarkan dalam konsep 5W2H. Yaitu *who, what, where, when, why, how* dan *howgh*. Kata Sapto, pada akhirnya orang harus mengucapkan *howgh* sebagai tanda kemandapan.

Sapto bukan orang pertama yang memperkenalkan gamelan ke mancanegara. Adalah Ki Tjokrowarsito alias KPH Notoprojo yang berhasil membina perawat di Amerika. YGF pun bukan sekedar festival, melainkan kerja budaya dalam mempertahankan kearifan budaya lokal yang bisa diterima kultur global. Hal ini, menurut Sapto kepada *Republika*, sejalan untuk mendukung ide Sri Sultan

Hamengkubuwono X yang ingin menjadikan Yogya sebagai pusat budaya dunia tahun 2020.

Gamelan sebagai spirit

PT Gamelan Hangeka Buwana didirikan tahun 2001 untuk mendukung profesionalitas penyelenggaraan YGF. Sumbangan dana dari luar negeri juga masuk dengan jumlah lumayan. Banyak musisi yang ikut menghidupkan festival seperti Djadug Ferianto dan I Wayan Sadra.

Sapto ingin gamelan menjadi spirit, bukan sekedar alat. Senada dengannya, Sadra berpendapat bahwa gamelan adalah sebuah sub kultur. Orang bisa dengan cepat memainkan gamelan. Yang sulit adalah menafsirkan energi bunyi menjadi sebuah citra.

Energi bunyi itu oleh Djadug diterjemahkan sebagai rasa. Sejauh pengalamannya mengajari orang asing menabuh gamelan, ia mengatakan yang paling sulit adalah mengajarkan rasa itu. Teknik bermain bagi orang asing memang mudah, tetapi kepekaan rasa belum tentu mudah dikuasai.

Menjaga genre murni gamelan yang pentatonik di era serba diatonik tak mudah. Orang Indonesia sendiri mencoba memodifikasi. Sapto Raharjo dengan gamelan kontemporer, Manthous dengan musik campursari dan Djadug dengan menggabungkan gamelan dengan instrumen musik diatonik tanpa sedikitpun melaraskannya.

Menurut Sadra yang juga ketua Jurusan Karawitan STSI Solo itu, jangan pernah menyamakan nada pentatonik dan diatonik. Kalau dipaksa, yang terjadi justru pemiskinan bunyi. Gamelan memiliki sistem *embat*, karakter bunyi yang tidak dimiliki oleh alat musik barat. Namun baik nada pentatonik maupun diatonik bisa dicari kesesuaiannya dengan langsung memainkannya.

Justru dalam sebuah wawancara dengan *Tempo*, Tjokrowarsito mengatakan, musik gamelan dan musik modern tidak bisa disatukan karena tangga nadanya berbeda. Kalau dilakukan sinkronisasi, sebaiknya diambil sebagian instrumennya saja. Ia juga tidak setuju bila nada dasar gamelan disamakan dengan nada dasar musik diatonik.

Namun terlepas dari perbedaan pendapat itu, YGF diharapkan kelak bisa menjadi ajang mengukur kemampuan karawitan dan ajang sinergi untuk komunitas gamelan dunia. Sehingga komponen kultur lokal akan menyatu dengan kultur lainnya. ■ RH

Jaksa Agung yang Mumpuni

Sebagai Jaksa Agung, Singgih tidak segan-segan memecat jaksa yang nakal atau yang menyalahgunakan jabatan.

Tanggal 3 Juli lalu semestinya menjadi hari penuh keceriaan bagi mantan Jaksa Agung Singgih, SH. Hari itu, ia dan keluarganya merayakan ulang tahunnya yang ke-72. Namun, di tengah gelak tawa dan canda ceria anak-anak dan cucu-cucunya, ia mendadak terjatuh dan muntah-muntah. Keluarganya langsung membawanya ke Rumah Sakit Ongkomulyo, Jakarta Pusat dan langsung masuk ke ruang ICU. Hari berikutnya, ia dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam Gleneagles, Karawaci, Tangerang.

Karena serangan stroke itu, kondisi Singgih terus menurun. Hingga akhirnya tanggal 30 Juli 2005 pukul 15.05, ia meninggal dunia. Dokter mendiagnosanya mengalami *aneurysm* (pecahnya pembuluh otak). Kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi dunia penegakan hukum, karena sepanjang karirnya sebagai jaksa agung, Singgih telah mengukir banyak prestasi.

Sepanjang hidupnya, kejaksaan adalah dunia Singgih. Ia kemudian diangkat menjadi jaksa agung RI keempat belas sejak tahun 1990 – 1998. Ia pernah mendapat penghargaan Bintang Pratama-Bhorn Knight Grand Cross of the Most Exalted Order of the White Elephant dari Raja Thailand (1993) dan juga Bintang Mahaputera Adiprana dari pemerintah RI.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Barman Zahir, yang di masa jabatan Singgih menjabat

sebagai Kepala Bagian Humas Kejaksaan Agung, mengenang Singgih sebagai sosok yang berwibawa, pandai, bertanggung jawab dan tegas dalam bertindak. Singgih tidak segan-segan memecat jaksa yang nakal atau yang menyalahgunakan jabatan.

Dalam kasus mantan Presiden Soeharto, ia memerintahkan anak buahnya tetap menyelidiki. Kelebihannya yang lain, Singgih menguasai pembinaan SDM. Ia juga pemimpin, ayah, pendidik sekaligus teman bagi seluruh bawahannya.

Putra kelahiran Jombang, Jawa Timur, 23 Juni 1934 ini meninggalkan seorang isteri, Ny. Renny Singgih (66), empat anak serta enam cucu.

Reny Hambarwati, salah seorang puterinya, menceritakan bahwa sehari sebelum ayahnya meninggal, ia kelihatan sehat. Saat ulang tahunnya itu, Singgih berpesan pada keluarganya untuk selalu menghargai waktu dan selalu menjalankan 3B (bersyukur, berikhtiar dan bertawakal).

Sementara itu, menurut Kapuspenkum Kejaksaan Soehandoyo yang di masa jabatan Singgih menjabat Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan, mengenang mantan atasannya itu sebagai orang yang selalu memberi teladan untuk bersikap profesional dan berintegritas. Yang selalu diingatkannya adalah nasehat Singgih, bahwa menjadi jaksa harus benar-benar mumpuni.

Selain dikenal sebagai man-

tan jaksa agung, Almarhum juga dikenal sebagai kolektor mata uang (numismator) yang ditekuninya sejak 1970-an. Karena hobinya itu, ia dipilih menjadi Ketua Asosiasi Numismatika Indonesia.

Penghormatan terakhir di-



Singgih, SH

berikan para koleganya di Kejaksaan Agung, sebelum ia dimakamkan, Minggu, 31 Juli lalu. Kini, mantan jaksa agung yang mumpuni itu sudah berbaring tenang di Taman Makam Pahlawan Kalibata. ■

Dari berbagai media/RH

Tutup Usia

Mantan Menteri Negara Sekretaris Negara Kabinet Pembangunan VII Saadillah Mursjid meninggal dunia akibat stroke, Kamis, 28 Juli 2005, pukul 15.57 di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta. Ia sempat dirawat di rumah sakit tersebut selama dua hari, sejak Selasa.

Selasa, 26 Juli lalu, saat tengah memimpin rapat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Saadillah yang juga Manajer TMII merasa sakit dan meminta rapat dihentikan. Saat itu, ia merasa pusing sekali dan bicaranya menjadi cadel. Ia sudah tak bisa bangkit dari kursinya dan segera dilarikan ke RSPP.

Saadillah lahir di Barabai, Kalimantan Selatan, 7 September 1937. Ia meninggalkan seorang isteri, Ny. Halimah Ratna S. Mursjid dan tiga anak. Jenazahnya dimakamkan hari Jumat, 29



Saadillah Mursjid

Juli pukul 13.00 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Selama masa hidupnya, selain ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Sekretaris Negara di Kabinet Pembangunan V, Direktur Utama PT Dua Satu Tiga Puluh dan Komisaris Utama PT Hanurata. Saadillah juga pernah mendapatkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana tahun 1992. ■ RH

www.esero.com

ESERO WEB DESIGN

 **ESERO**

Web Design & Hosting